



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**Kabupaten Barito Utara
Tahun 2022**



Muara Teweh, 2023

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, yang merupakan alat kendali dan penilai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Selain itu LKIP merupakan salah satu instrumen bagi Kepala Daerah untuk memantau dan memacu peningkatan kinerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini menyajikan pencapaian setiap sasaran strategis Kabupaten Barito Utara sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan ini juga berisi analisis faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan serta langkah tindak lanjut untuk memenuhi target kinerja di tahun yang akan datang.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pembangunan daerah atas anggaran yang telah diamanahkan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Selain itu keberadaan LKIP ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan aktif memberikan masukan terhadap kesempurnaan Penyusunan LKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2022. Kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Pengawasan yang telah memberikan masukan dan koreksi terhadap dokumen-dokumen SAKIP Kabupaten Barito Utara. Kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan tim penyusun LKIP Kabupaten Barito Utara serta pihak-pihak lain yang terkait.

Muara Teweh, Maret 2023

BUPATI BARITO UTARA,



H. NADALSYAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berupaya berkomitmen dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*) dan selalu berorientasi pada hasil sebagaimana tuntutan pada era reformasi sekarang ini. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan wajib terpenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kabupaten Barito Utara sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022.

Untuk mencapai visi lima tahun kedepan, telah ditetapkan 5 misi, 5 tujuan, 20 sasaran strategis dan 24 indikator kinerja utama. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama yang diperjanjikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- ✓ Misi I terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 3 indikator kinerja:

Capaian indikator kinerja, 2 indikator atau 66,67% kategori baik sekali (capaian lebih dari 100%) dan 1 indikator atau 33,33% kategori baik (capaian lebih dari 75% sd. 100%).

- ✓ Misi II terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja:

Capaian indikator kinerja, sebanyak 3 indikator atau 75% kategori baik sekali (capaian lebih dari 100%) dan 1 indikator sasaran atau 25% kategori baik (capaian lebih dari 75% sd. 100%).

- ✓ Misi III terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 8 indikator kinerja:

Capaian indikator kinerja, sebanyak 5 indikator atau 62,5% kategori baik sekali (capaian lebih dari 100%) dan 3 indikator sasaran atau 37,5% kategori baik (capaian lebih dari 75% sd. 100%).

- ✓ Misi IV terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 5 indikator kinerja:

Capaian indikator kinerja, seluruh indikator atau 100% kategori baik sekali (capaian lebih dari 100%).

- ✓ Misi V terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja:

Capaian indikator kinerja, sebanyak 1 indikator atau 25% kategori baik sekali (capaian lebih dari 100%) dan 3 indikator sasaran atau 75% kategori baik (capaian lebih dari 75% sd. 100%).

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 107,50% (predikat Baik Sekali) mengalami peningkatan dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 104,85%. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2022, yaitu 16 indikator atau 66,67% bermakna Baik Sekali dan 8 indikator atau 33,33% bermakna Baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mampu memenuhi target dengan capaian kinerja 100% atau lebih antara lain:

1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah
2. Persentase desa/kelurahan *blankspot*

3. Rata-rata lama sekolah
4. Angka Harapan Hidup
5. Pengeluaran perkapita pertahun
6. PDRB sektor perkebunan
7. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah
8. PDRB sektor perdagangan
9. PDRB sektor industri
10. Pendapatan Perkapita Penduduk
11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
12. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)
13. Persentase kunjungan wisata
14. Persentase penyelesaian konflik sosial
15. Persentase PMKS yang mandiri
16. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
17. Opini BPK

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mampu mencapai target 100% antara lain:

1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik
2. Angka Melek Huruf
3. PDRB sektor pertanian
4. PDRB sektor perikanan
5. Angka pengangguran terbuka
6. Indeks Reformasi Birokrasi
7. Nilai SAKIP

Persentase capaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	107,36	Baik Sekali
2	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	97,80	Baik
3	Menurunnya desa/kelurahan <i>blankspot</i>	124,97	Baik Sekali
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	101,71	Baik Sekali
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	100,27	Baik Sekali
6	Meningkatnya daya beli masyarakat	103,63	Baik Sekali
7	Meningkatnya sektor pertanian	91,10	Baik
8	Meningkatnya sektor perikanan	98,02	Baik
9	Meningkatnya sektor perkebunan	133,84	Baik Sekali
10	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM, perdagangan serta industri	112,11	Baik Sekali
11	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	127,00	Baik Sekali
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	104,56	Baik Sekali
13	Meningkatnya daya saing pariwisata	113,81	Baik Sekali
14	Meningkatnya ketertiban masyarakat	114,29	Baik Sekali
15	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	125,00	Baik Sekali
16	Menurunnya penyandang masalah sosial	112,52	Baik Sekali
17	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	83,87	Baik
18	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	94,49	Baik

No.	Sasaran	Capaian (%)	Kategori
19	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	103,65	Baik Sekali
20	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	Baik
Rata-rata		107,50	Baik Sekali

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Barito Utara.....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	6
1.4 Isu Strategis Daerah.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023.....	15
2.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara	28
2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2022	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	33
3.2 Analisis Capaian Kinerja	42
3.3 Analisis Program dan Efisienasi Sumber Daya.....	166
3.4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	184
BAB IV PENUTUP	187
4.1 Kesimpulan	187
4.2 Rencana Tindak Lanjut	188
LAMPIRAN	
• Tabel Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2022	
• Tabel Penjelasan/Perhitungan IKU	
• Tabel Perbandingan Realisasi dengan Target pada RPJMD Tahun 2022	
• Indikator Kinerja Utama	
• Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2022	
• Pernyataan Reviu	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Luas Daerah Perkecamatan Kabupaten Barito Utara	3
Tabel 2	: Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022	5
Tabel 3	: Jumlah Eselon Sebelum dan Sesudah Penyederhanaan Birokrasi	9
Tabel 4	: Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023	16
Tabel 5	: Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran	26
Tabel 6	: Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara	28
Tabel 7	: Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2022	31
Tabel 8	: Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2022	34
Tabel 9	: Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022	37
Tabel 10	: Kategori indikator untuk masing-masing sasaran	38
Tabel 11	: Capaian kinerja sasaran ke-1 tahun 2022	42
Tabel 12	: Jumlah desa/kelurahan yang terhubung akses jalan darat ke pusat wilayah tahun 2018-2022	43
Tabel 13	: Perbandingan capaian kinerja indikator desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah pada Tahun 2018-2022	47
Tabel 14	: Perbandingan capaian kinerja indikator desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah terhadap target RPJMD	47
Tabel 15	: Pohon Program Pendukung Sasaran-1	48
Tabel 16	: Capaian kinerja sasaran ke-2 tahun 2022	49
Tabel 17	: Ketersediaan jaringan listrik di desa/kelurahan tahun 2020-2022	50

Tabel 18	: Perbandingan capaian kinerja indikator desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik tahun 2018-2022	53
Tabel 19	: Perbandingan capaian kinerja indikator desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik terhadap target RPJMD.....	54
Tabel 20	: Pohon Program Pendukung Sasaran-2	55
Tabel 21	: Capaian kinerja sasaran ke-3 tahun 2022.....	57
Tabel 22	: Jumlah Desa/Kelurahan berdasarkan status ketersediaan jaringan GSM di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022	57
Tabel 23	: Perbandingan capaian kinerja indikator desa/kelurahan <i>blankspot</i> Tahun 2018-2022	58
Tabel 24	: Perbandingan capaian kinerja indikator persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i> terhadap target RPJMD	59
Tabel 25	: Pohon Program Pendukung Sasaran-3	60
Tabel 26	: Capaian kinerja sasaran ke-4 tahun 2022.....	61
Tabel 27	: Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022	62
Tabel 28	: Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Utara dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia	63
Tabel 29	: Perbandingan capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah terhadap target RPJMD	63
Tabel 30	: Perbandingan capaian kinerja indikator Angka Melek Huruf Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022	64
Tabel 31	: Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Barito Utara dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia	65
Tabel 32	: Perbandingan capaian kinerja indikator Angka Melek Huruf terhadap target RPJMD 2018-2023	65

Tabel 33	: Pohon Program Pendukung Sasaran-4	66
Tabel 34	: Capaian kinerja sasaran ke-5 tahun 2022.....	68
Tabel 35	: Perbandingan Capaian kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022.....	68
Tabel 36	: Perbandingan capaian kinerja Angka Harapan Hidup terhadap target RPJMD 2018-2023	70
Tabel 37	: Pohon Program Pendukung Sasaran-5	71
Tabel 38	: Capaian kinerja sasaran ke-6 tahun 2022.....	73
Tabel 39	: Perbandingan capaian kinerja indikator pengeluaran perkapita pertahun tahun 2018-2022	74
Tabel 40	: Perbandingan capaian kinerja indikator Pengeluaran perkapita pertahun terhadap target RPJMD 2018-2023 .	75
Tabel 41	: Pohon Program Pendukung Sasaran-6	76
Tabel 42	: Capaian kinerja sasaran ke-7 tahun 2022.....	77
Tabel 43	: Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB sektor pertanian tahun 2018-2022	78
Tabel 44	: Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB Sektor Pertanian terhadap target RPJMD 2018-2023	79
Tabel 45	: Produksi Tanaman Pangan dan Produksi Peternakan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022.....	79
Tabel 46	: Pohon Program Pendukung Sasaran-7	80
Tabel 47	: Capaian kinerja sasaran ke-8 tahun 2022.....	83
Tabel 48	: Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB sektor perikanan tahun 2018-2022	84
Tabel 49	: Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB Sektor Perikanan terhadap target RPJMD 2018-2023.....	85
Tabel 50	: Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2019-2022	85
Tabel 51	: Pohon Program Pendukung Sasaran-8	87
Tabel 52	: Capaian kinerja sasaran ke-9 tahun 2022.....	89
Tabel 53	: Perbandingan Realisasi PDRB Sektor Perkebunan Tahun 2018-2022	89

Tabel 54	: Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB sektor perkebunan tahun 2018-2022.....	90
Tabel 55	: Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB Sektor Perkebunan terhadap target RPJMD 2018-2023.....	90
Tabel 56	: Pohon Program Pendukung Sasaran-9	92
Tabel 57	: Capaian kinerja sasaran ke-10 tahun 2022	93
Tabel 58	: Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB sektor Koperasi dan UKM tahun 2018-2022	94
Tabel 59	: Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB Sektor Koperasi dan UKM terhadap target RPJMD 2018-2023...	95
Tabel 60	: Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB sektor perdagangan tahun 2018-2022	97
Tabel 61	: Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB Sektor Perdagangan terhadap target RPJMD 2018-2023	97
Tabel 62	: Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB sektor industri tahun 2018-2022.....	99
Tabel 63	: Perbandingan Capaian kinerja indikator PDRB Sektor Industri terhadap target RPJMD 2018-2023.....	100
Tabel 64	: Pohon Program Pendukung Sasaran-10	100
Tabel 65	: Capaian kinerja sasaran ke-11 tahun 2022.....	102
Tabel 66	: Perbandingan capaian kinerja indikator Angka Pengangguran Terbuka tahun 2018-2022	103
Tabel 67	: Perbandingan capaian kinerja indikator Angka Pengangguran Terbuka terhadap target RPJMD 2018-2023	104
Tabel 68	: Perbandingan capaian kinerja indikator pendapatan perkapita tahun 2018-2021	106
Tabel 69	: Perbandingan capaian kinerja indikator Pendapatan Perkapita terhadap target RPJMD 2018-2023.....	106
Tabel 70	: Pohon Program Pendukung Sasaran-11	107
Tabel 71	: Capaian kinerja sasaran ke-12 tahun 2022	109
Tabel 72	: Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	

	Tahun 2022.....	110
Tabel 73	: Perbandingan capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2018-2022	111
Tabel 74	: Perbandingan capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terhadap target RPJMD 2018-2023...	111
Tabel 75	: Pohon Program Pendukung Sasaran-12	112
Tabel 76	: Capaian kinerja sasaran ke-13 tahun 2022.....	115
Tabel 77	: Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase kunjungan wisata tahun 2018-2022	115
Tabel 78	: Rekapitulasi Data Wisatawan Tahun 2018-2022	116
Tabel 79	: Objek Wisata di Kabupaten Barito Utara	116
Tabel 80	: Perbandingan capaian kinerja indikator persentase kenaikan jumlah wisatawan terhadap target RPJMD 2018-2023	119
Tabel 81	: Pohon Program Pendukung Sasaran-13	120
Tabel 82	: Capaian kinerja sasaran ke-14 tahun 2022.....	122
Tabel 83	: Perbandingan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 tahun 2018-2022	122
Tabel 84	: Perbandingan capaian kinerja indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 tahun 2018-2021	123
Tabel 85	: Perbandingan capaian kinerja indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 terhadap target RPJMD 2018-2023.....	123
Tabel 86	: Pohon Program Pendukung Sasaran-14	124
Tabel 87	: Capaian kinerja sasaran ke-15 tahun 2022.....	125
Tabel 88	: Perbandingan capaian kinerja indikator Angka Konflik Sosial tahun 2018-2022.....	126
Tabel 89	: Perbandingan capaian kinerja indikator Angka Konflik Sosial terhadap target RPJMD 2018-2023	126
Tabel 90	: Pohon Program Pendukung Sasaran-15	128
Tabel 91	: Capaian kinerja sasaran ke-16 tahun 2022.....	130
Tabel 92	: PMKS Mandiri Tahun 2022	131

Tabel 93	: Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase PMKS yang mandiri tahun 2018-2022.....	131
Tabel 94	: Perbandingan capaian kinerja indikator PMKS yang tertangani terhadap target RPJMD 2018-2023	132
Tabel 95	: Pohon Program Pendukung Sasaran-16	133
Tabel 96	: Capaian kinerja sasaran ke-17 tahun 2022	134
Tabel 97	: Rekapitulasi Penilaian Indeks RB Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2022.....	135
Tabel 98	: Perbandingan capaian kinerja indikator Indeks RB tahun 2018-2022	135
Tabel 99	: Perbandingan capaian kinerja indikator Indeks RB terhadap target RPJMD 2018-2023	136
Tabel 100	: Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang diharapkan	136
Tabel 101	: Program Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan.....	137
Tabel 102	: Pohon Program Pendukung Sasaran-17	143
Tabel 103	: Capaian kinerja sasaran ke-18 tahun 2022	146
Tabel 104	: Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP	147
Tabel 105	: Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022	147
Tabel 106	: Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Tahun 2018-2022	148
Tabel 107	: Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai SAKIP terhadap target RPJMD 2018-2023.....	148
Tabel 108	: Pohon Program Pendukung Sasaran-18	152
Tabel 109	: Capaian kinerja sasaran ke-19 tahun 2022	154
Tabel 110	: Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	155
Tabel 111	: Hasil SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022.....	156

Tabel 112 :	Perbandingan capaian kinerja indikator Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2022.....	158
Tabel 113 :	Perbandingan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Barito Utara terhadap target RPJMD 2018-2023	158
Tabel 114 :	Pohon Program Pendukung Sasaran-19	160
Tabel 115 :	Capaian kinerja sasaran ke-20 tahun 2022	162
Tabel 116 :	Perbandingan Opini BPK untuk Laporan Keuangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2022	163
Tabel 117 :	Perbandingan capaian kinerja indikator Opini BPK tahun 2018-2022	163
Tabel 118 :	Perbandingan capaian kinerja indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara terhadap target RPJMD 2018-2023.....	164
Tabel 119 :	Pohon Program Pendukung Sasaran-20	165
Tabel 120 :	Program Pendukung Sasaran Strategis dan IKU Kabupaten Barito Utara	166
Tabel 121 :	Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Kabupaten Barito Utara TA 2022	177
Tabel 122 :	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran serta Tingkat Efisiensi Tahun 2022	180
Tabel 123 :	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021.....	184

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Utara	2
Gambar 2	: Analisis isu strategis yang menghasilkan permasalahan utama daerah	10
Gambar 3	: Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022	62
Gambar 4	: Grafik Perbandingan AHH Kabupaten Barito Utara dengan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022	69
Gambar 5	: Grafik Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Barito Utara dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	74
Gambar 6	: Perbandingan Realisasi PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022	78
Gambar 7	: Perbandingan Realisasi PDRB Sektor Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022	84
Gambar 8	: Grafik Produksi Perikanan Tahun 2018-2022	86
Gambar 9	: Grafik Produksi Perkebunan Tahun 2018-2022	91
Gambar 10	: Perbandingan Realisasi PDRB Sektor Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022	94
Gambar 11	: Perbandingan Realisasi PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022	96
Gambar 12	: Perbandingan Realisasi PDRB Sektor Industri Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022	99
Gambar 13	: Grafik Perbandingan APT Kabupaten Barito Utara dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	103
Gambar 14	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Perkapita Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022	105

Gambar 15 : Nilai SAKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2022	149
Gambar 16 : Grafik Hasil SKM Tahun 2017-2021	159

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, yang secara eksternal merupakan alat kendali dan penilai pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka menuju terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Governance*. Secara Internal LKIP merupakan salah satu instrumen bagi Kepala Daerah untuk memantau dan memacu peningkatan kinerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

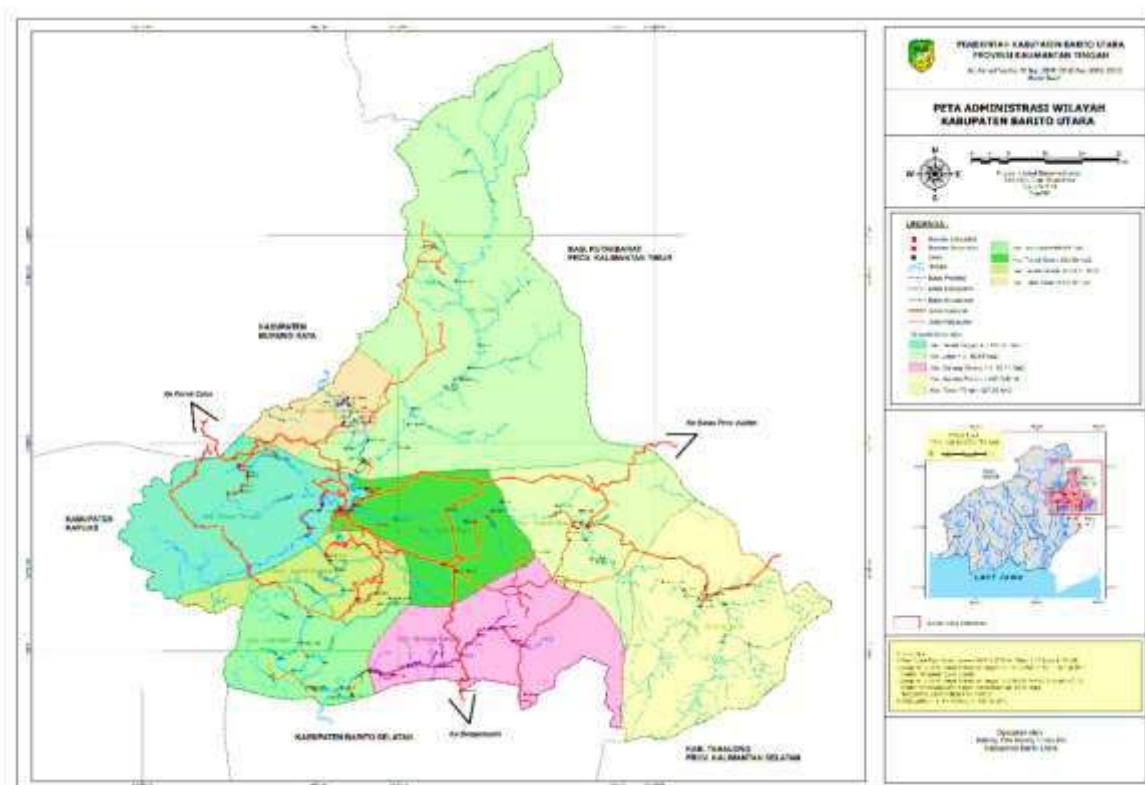
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Barito Utara

1.2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Barito Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di tengah-tengah pulau Kalimantan dan terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada posisi 114°27'3,32"–115°50'47" Bujur Timur dan 0°49'00" Lintang Utara–1°27'00" Lintang Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Murung Raya.



Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Utara

Luas wilayah Kabupaten Barito Utara secara hukum tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 sebagaimana yang dipublikasikan BPS Kabupaten Barito Utara dalam katalog Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2023, luas wilayah Kabupaten Barito Utara adalah 10.152,25 km² atau seluas 6,51% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 93 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Barito Utara adalah Kecamatan Lahei dengan luas wilayah 3.219,39 km², atau 31,84% terhadap luas Kabupaten Barito Utara, kemudian Kecamatan Gunung Purei seluas 1.435,80 km² atau 14,20% dari luas Kabupaten Barito Utara; sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Lahei Barat yaitu 340,26 km² atau 3,36% dari luas Kabupaten Barito Utara.

Tabel 1.

Luas Wilayah Kabupaten Barito Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase Luas (%)
1	Montallat	Tumpung Laung II	10	694,63	6,87
2	Gunung Timang	Kandui	16	1.066,31	10,54
3	Gunung Purei	Lampeong	11	1.435,80	14,20
4	Teweh Timur	Benangin I	12	921,58	9,11
5	Teweh Tengah	Muara Teweh	10	1.144,40	11,32
6	Teweh Baru	Hajak	10	808,70	8,00
7	Teweh Selatan	Trahean	10	481,17	4,76
8	Lahei	Lahei II	13	3.219,39	31,84
9	Lahei Barat	Benao Hulu	11	340,26	3,36
Barito Utara			103	10.152,25	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2023

Topografi dan morfologi daerah Kabupaten Barito Utara terdiri dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Bagian wilayah dengan kelerengan 0-2% terletak dibagian selatan tepi Sungai Barito yaitu kecamatan Montallat dan Teweh Tengah seluas 165 km² (29,2%). Bagian wilayah dengan kemiringan 2-15% tersebar di semua kecamatan seluas 4.785 km² (21,5%). Kemiringan 15-40% tersebar di semua kecamatan seluas 4.275 km² (51,5%) dan bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% seluas 2.075 km² (25%).

Berdasarkan keadaan tanah yang ada, maka jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barito Utara yaitu Aluvial terdapat di aliran sungai, regosol terdapat menyebar di bagian selatan wilayah kabupaten Barito Utara, podsolik merah kuning dengan induk batu-batuan dan batuan beku terdapat di wilayah perbukitan, kambisol dan okisol (laterit) terdapat di wilayah bagian atas dan paling luas, keadaan bergelombang dan berbukit.

Iklim di Kabupaten Barito Utara termasuk iklim basah, dengan suhu udara berkisar antara 23,4°C sampai dengan 33,5°C. Rata-rata curah hujan tercatat 291 mm³ dan rata-rata hari hujan sebanyak 20 hari setiap bulan. Kelembaban udara rata-rata 84 persen.

Sungai utama yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah Sungai Barito. Sungai Barito mengalir dari daerah hulu di Kabupaten Murung Raya melewati Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, hingga ke Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Sungai ini tercatat mempunyai panjang lebih kurang 900 km (dapat dilayari 780 km), lebar rata-rata 650 meter dengan kedalaman 8 meter dan bermuara ke Laut Jawa. Selain itu sungai yang cukup berperan dalam sistem hidrologi di Kabupaten Barito Utara adalah sungai Montallat, sungai Teweh dan sungai Lahei yang merupakan anak sungai Barito.

1.2.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Barito Utara pada tahun 2022 berjumlah 160.235 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2022 tergolong jarang yaitu 16 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Teweh Tengah, yaitu sebesar 54 jiwa/km². Hal tersebut dikarenakan ibukota Kabupaten Barito Utara yaitu Muara Teweh yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi masyarakat terletak di Kecamatan Teweh Tengah.

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	KECAMATAN	Laki-laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Montallat	6.447	52,38	5.861	47,62	12.308	7,68
2	Gunung Timang	6.615	51,43	6.248	48,57	12.863	8,03
3	Gunung Purei	1.425	51,13	1.362	48,87	2.787	1,74
4	Teweh Timur	3.385	52,17	3.103	47,83	6.488	4,05
5	Teweh Tengah	31.436	51,26	29.885	48,74	61.321	38,27
6	Teweh Baru	12.040	52,33	10.970	47,67	23.010	14,36
7	Teweh Selatan	8.248	52,73	7.395	47,27	15.643	9,76
8	Lahei	7.390	52,37	6.721	47,63	14.111	8,81
9	Lahei Barat	6.201	52,98	5.503	47,02	11.704	7,30
Jumlah		83.187	51,92	77.048	48,08	160.235	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2023

Berdasarkan data di dalam katalog Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2023 yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Barito Utara, penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2022 mencapai 160.235 jiwa yang terdiri dari 83.187 jiwa penduduk laki-laki atau 51,92% dan 77.048 jiwa penduduk perempuan atau 48,08%. Jumlah penduduk tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 157.231 jiwa sehingga laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 sebesar 1,99%.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Dalam perubahan pertama Peraturan Daerah berisi penguatan kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Evaluasi kelembagaan dilakukan menyangkut struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi. Struktur organisasi meliputi besaran organisasi, susunan, perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.

Adapun susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Tipe A
2. Sekretariat DPRD Tipe C
3. Inspektorat Tipe B
4. Dinas Daerah :
 - 1) Dinas Pendidikan Tipe A;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe B;

- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B;
 - 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
 - 6) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A;
 - 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
 - 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A;
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B;
 - 11) Dinas Perhubungan Tipe B;
 - 12) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B;
 - 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
 - 14) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A;
 - 15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B;
 - 16) Dinas Pertanian Tipe A;
 - 17) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B;
 - 18) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C; dan
 - 19) Satuan Polisi Pamong Praja dan Tipe B.
5. Badan Daerah :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe B;
 - 2) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A;
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tipe A;
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C;
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A; dan
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A.
6. Kecamatan :
- 1) Kecamatan Teweh Tengah Tipe A ibu kota di Muara Teweh;
 - a) Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah;

- b) Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah;
- 2) Kecamatan Teweh Baru Tipe A ibu kota di Hajak;
 - a) Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru;
 - b) Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru;
- 3) Kecamatan Teweh Selatan Tipe A ibu kota di Trahean;
- 4) Kecamatan Montallat Tipe A ibu kota di Tumpung Laung;
 - a) Kelurahan Tumpung Laung I Kecamatan Montallat;
 - b) Kelurahan Tumpung Laung II Kecamatan Montallat;
 - c) Kelurahan Montallat I Kecamatan Montallat;
 - d) Kelurahan Montallat II Kecamatan Montallat;
- 5) Kecamatan Gunung Timang Tipe A ibu kota di Kandui;
- 6) Kecamatan Teweh Timur Tipe A ibu kota di Benangin;
- 7) Kecamatan Gunung Purei Tipe A ibu kota di Lampeong;
- 8) Kecamatan Lahei Tipe A ibu kota di Muara Lahei;
 - a) Kelurahan Lahei I Kecamatan Lahei;
 - b) Kelurahan Lahei II Kecamatan Lahei;
- 9) Kecamatan Lahei Barat Tipe A ibu kota di Benao;

Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas sebanyak 20 (termasuk Satpol PP);
2. Badan sebanyak 6;
3. Sekretariat Daerah sebanyak 1;
4. Sekretariat DPRD sebanyak 1;
5. Inspektorat sebanyak 1; dan
6. Kecamatan sebanyak 9, termasuk 10 Kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menindaklanjuti dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah.

Desain Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) diusulkan melalui Surat Bupati Barito Utara No.065/47/RG tanggal 28 Juni 2021 mendapatkan pengantar dari Gubernur Kalimantan Tengah No.060/290/ORG dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri melalui surat No.061/4250/OTDA Hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Saat ini struktur organisasi untuk 26 Perangkat Daerah yang mengalami penyederhanaan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara tentang SOTK perangkat daerah masing-masing. Penyederhanaan Struktur Organisasi selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyetaraan jabatan dari pejabat struktural ke jabatan fungsional.

Penyetaraan jabatan telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Sesuai Surat Nomor 800/8498/OTDA tanggal 24 Desember 2021. Jumlah jabatan yang mendapat persetujuan dari Kemendagri untuk disetarakan sebanyak 243 Jabatan. Dilaksanakan pelantikan pejabat eselon IV ke jabatan fungsional pada tanggal 30 Desember 2021 sesuai Keputusan Bupati Barito Utara No 188.45/422/2021.

Adapun perubahan jumlah jabatan eselon sebelum dan sesudah penyederhanaan birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

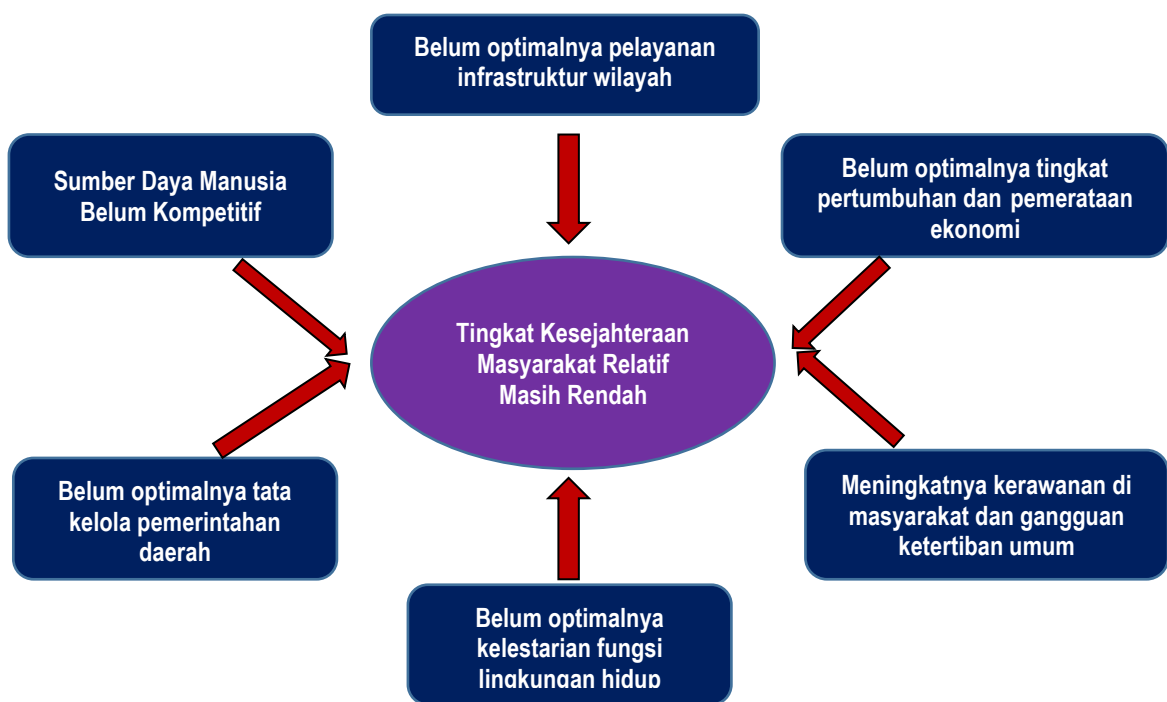
Jumlah Eselon Sebelum dan Sesudah Penyederhanaan Birokrasi

No.	Eselon	Jumlah		Jumlah disederhanakan
		Sebelum	Sesudah	
1	Eselon II a	1	1	-
2	Eselon II b	32	32	-
3	Eselon III a	50	50	-
4	Eselon III b	101	101	-
5	Eselon IV a	446	203	243
6	Eselon IV b	92	92	-
Jumlah		722	479	243

1.4 Isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara yang diperoleh dari analisis permasalahan daerah secara singkat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah.
2. Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif.
3. Belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
4. Meningkatnya kerawanan di masyarakat dan gangguan ketertiban umum.
5. Belum optimal kelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah.



Gambar 2. Analisis Isu Strategis yang menghasilkan permasalahan utama daerah

Masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara adalah tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Rendahnya kesejahteraan tersebut bermula dari belum optimalnya pelayanan

infrastruktur wilayah karena infrastruktur merupakan barang komplementer yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Terjaminnya ketersediaan infrastruktur dapat mendorong kegiatan ekonomi wilayah dan peningkatan pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan tetapi memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur, kesenjangan antar wilayah dapat diminimalisasi, namun untuk memadukan pembangunan infrastruktur maka dilakukan pendekatan pembangunan melalui wilayah pertumbuhan. Membangun infrastuktur saat ini harus berbasis kewilayahan, sehingga pembangunan infrastruktur tidak sekedar dalam bentuk fisik saja, tapi membangun kawasan yang terkoneksi satu sama lain. Kemudian juga suatu kawasan digali potensi yang ada, sehingga dapat berkembang dan juga memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Barito Utara akan memajukan daerah, menggerakkan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan.

Sejumlah kendala membuat lambatnya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara seperti kualitas sumber daya manusia yang belum kompetitif, kelembagaan dan struktur sosial ekonomi dan ketersediaan infrastruktur yang kurang mendukung. Sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup potensial tetapi belum bisa mendatangkan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat karena berbagai permasalahan salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia yang belum kompetitif. sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan. Pada era globalisasi dan otonomi daerah. Sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas merupakan syarat penting bagi tercapainya pembangunan ekonomi. Pendidikan yang didukung oleh kesehatan dan fasilitas infrastruktur yang baik memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Peningkatan kualitas pendidikan memiliki makna bagi perbaikan kualitas bangsa, sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan potensi dasar yang dimiliki bangsa. Kebijakan fiskal menjadi instrumen penting dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Peningkatan pengeluaran kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan akumulasi aset/modal SDM (*human capital*). Penanganan SDM sebagai *human capital* menunjukkan bahwa hasil dari investasi non fisik jauh lebih tinggi dibandingkan investasi berupa pembangunan fisik. Peningkatan *human capital* diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta dapat mendorong kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memutus rantai kemiskinan. Kedepannya Kabupaten Barito Utara harus mengutamakan aspek pembangunan sumber daya manusia yang memiliki tiga pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan serta pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya.

Hal lain yang sangat berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat adalah belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Karena meskipun pertumbuhan ekonomi di Barito Utara dari tahun ke tahun terjadi pertumbuhan yang positif, namun pertumbuhan yang diraih masih belum mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain belum ada pemerataan kesejahteraan.

Menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Barito Utara, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas penting karena secara empiris berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan

lainnya. Secara sederhana kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan tersebut ditandai oleh tiga hal yang fundamental. Pertama, semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin Kedua, semakin kecilnya jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur. Ketiga, semakin mengecilnya kesenjangan ekonomi antar sesama masyarakat di suatu daerah.

Kondisi keamanan dan ketertiban di Barito Utara harus ditingkatkan kualitasnya, dengan peningkatan penegakan perda, dan peningkatan pelayanan perijinan (kemudahan akses, transparan dan cepat) karena kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan akan sangat berpengaruh kepada tingkat kemandirian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin daerah saja, melainkan tanggung jawab setiap masyarakat. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Kedepannya pemerintah Kabupaten Barito Utara agar lebih memperhatikan efek negatif Pembangunan, karena yang merasakan dampak negatif langsung adalah masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Tata kelola pemerintahan dari segi ekonomi sangat berdampak kepada tingkat kesejahteraan, bahwa suatu daerah telah mencapai tata kelola yang baik apabila telah berhasil menyelenggarakan sistem pengaturan pembangunan daerah yang kuat, serta bertanggung jawab, dengan tetap beriringan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pasar yang

efisien. Di samping itu, dalam tata kelola pemerintah yang baik akan menghindari kesalahan dalam alokasi dana pembangunan, termasuk penanggulangan dini tindak pidana korupsi. *Good governance* juga akan menjalankan anggaran secara disiplin sehingga aktivitas usaha rakyat dapat tumbuh dengan baik.

Pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari masyarakat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi masyarakat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya; kesejahteraan spiritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Rencana Strategis Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. RPJMD Kabupaten Barito Utara diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2018-2023 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018-2023 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. RPJMD dilaksanakan dengan penajaman sasaran, strategi dan program dan penetapan prioritas dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah.

2.1.1 Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 adalah:
“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.

Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya pembangunan ekonomi kerakyatan	Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Barito utara serta mendorong perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi potensi SDA dan SDM daerah dengan kinerja ekonomi berdasarkan kearifan lokal, sehingga pembangunan ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat akan mampu memberikan dampak nyata kepada masyarakat luas di Kabupaten Barito Utara.
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur	Pembangunan lima tahun mendatang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar daerah terencana dan berkelanjutan yang memperhatikan pada keserasian tata ruang, lingkungan hidup, nilai-nilai sosial dan budaya serta kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Pembangunan lima tahun mendatang guna peningkatan kapasitas dan kualitas daerah melalui pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul, dan merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental merupakan modal utama dalam mendukung pembangunan, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah.
	Masyarakat Barito Utara yang religius	Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan sosial yang tinggi, harga diri dan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. Masyarakat Barito Utara yang taat dan patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain, sehingga nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati
	Masyarakat Barito Utara yang mandiri	Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat menghasilkan kemandirian pada tataran masyarakat yaitu masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak, sehingga mampu menunjukkan masyarakat Kabupaten Barito Utara yang telah berkembang secara normal bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten/Kota lainnya Pada tataran pemerintah daerah, mandiri adalah mampu membiayai pembangunannya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya sehingga ketergantungan dengan luar semakin berkurang. Wujud riil dari kemandirian ini adalah ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh modal sosial yang melembaga dalam sikap dan perilaku sehari-harinya. Dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatif dan kompetitif Kabupaten Barito Utara, sehingga dapat berdaya saing dalam kancah pembangunan, baik di tingkat lokal, regional dan nasional.
	Masyarakat Barito Utara yang sejahtera	Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, masyarakat dapat tercukupi kebutuhan hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan, pelayanan pendidikan, kesehatan secara merata

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		maupun memiliki pendapatan secara layak. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang sudah terpenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materi juga kebutuhan mental spiritual, telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), makmur (telah terpenuhinya atau tercukupinya seluruh kebutuhan dasarnya) sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting kehadiran masyarakat Barito Utara bagi daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah maupun pada tataran nasional.

Visi tersebut dimaknai sebagai:

Cita-cita luhur untuk melaksanakan pembangunan menuju cita-cita masyarakat yang religius, mandiri dan sejahtera yang berbasiskan potensi sumber daya lokal (kesesuaian lahan dan karakteristik masyarakat setempat), adat dan budaya yang dimiliki, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, laki-laki maupun perempuan) dan lembaga yang ada (asosiasi, perguruan tinggi dan swasta) secara aktif, dengan menitikberatkan percepatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa dan kelurahan agar secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Barito Utara dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secara merata.

2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2018-2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi berbeda penafsiran dan ketidakjelasan dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 1 Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi

Misi meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energi perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Sehingga sektor unggulan di Kabupaten Barito Utara dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur dasar akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan mengembangkan konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur yang telah tersedia. Sedangkan peningkatan ketersediaan energi khususnya listrik kepada masyarakat pengguna di Kabupaten Barito Utara akan dapat memicu kemudahan berusaha dan menciptakan lapangan usaha, tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Misi 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang, sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kualitas pendidikan dan kesehatan sangat berpengaruh pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan salah satu variabel yang menentukan adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal.

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara dan perhatian pada kesejahteraan tenaga pendidikan dan kesehatan sesuai wilayah pelayanannya. Melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan daerah, diharapkan mampu menghasilkan masyarakat Barito Utara yang semakin cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi. Kemudian BLUD RSUD Muara Teweh diharapkan semakin mandiri dan profesional dalam penyediaan layanan kesehatan. Selain itu masyarakat dan swasta berpartisipasi aktif dalam peningkatan derajat kesehatan serta pengendalian angka kelahiran.

Misi 3 Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Misi meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah. Selain itu diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lainnya melalui pembinaan kelompok-kelompok usaha serta upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan produktif dalam kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Misi 4 Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup

Penguatan nilai-nilai sosial budaya dimaksudkan untuk mengangkat dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya setempat untuk menciptakan kondisi sosial budaya yang mantap dan kondusif dalam rangka mendorong proses pembangunan. Nilai-nilai yang diangkat memiliki interkoneksi dengan tatanan lain terutama sejalan dengan perkembangan pembangunan, masih dipelihara dan diakui oleh masyarakat setempat bahkan sangat berperan dalam menciptakan

keharmonisan dan ketentraman didalam masyarakat. Nilai-nilai sosial budaya tersebut merupakan suatu “Kearifan Lokal” yang menjadi perekat, semangat, identitas kebanggaan dan kehormatan sebagai suatu persekutuan dalam menghadapi tantangan, hambatan dan permasalahan pembangunan. Aneka ragam suku bangsa yang hidup bersama-sama di wilayah Barito Utara tentu membawa adat istiadat, budaya dan berbagai nilai-nilai kearifan dalam kehidupan sehari-hari. Aset budaya dan kearifan lokal ini harus dikelola sebagai sebuah kekuatan dalam pembangunan daerah. Daerah harus maju, masyarakat harus maju namun tidak harus melupakan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki. Kemajuan harus bercirikan budaya dan kearifan lokal. Nilai budaya dan kearifan lokal yang telah lama ada ditengah-tengah masyarakat bila diterus dipelihara, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari akan dapat memberi warna masyarakat yang khas/unik.

Pariwisata merupakan salah satu fokus pembangunan untuk meraih pemasukan daerah, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Pengelolaan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya serta memajukan kebudayaan. Dengan demikian, pembangunan pariwisata memiliki potensi dalam menyumbang perekonomian suatu daerah dan mendukung perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Namun, di sisi lain, pembangunan pariwisata seringkali justru mendukung terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan pengembangan pariwisata dengan melibatkan peran masyarakat (*civil society*), sehingga pembangunan pariwisata tidak cenderung merusak tetapi justru mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kedepannya Kabupaten Barito Utara harus dapat memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan kehidupan yang baik, sehingga

daerah harus maju namun tetap juga harus lestari. Semua hal tersebut diatas dapat tercapai tentunya juga harus didukung oleh suasana Kabupaten Barito Utara yang aman, tertib dan tentram.

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh *stakeholder* pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh *stakeholders* pembangunan.

Kedepannya pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup harus tepat, efisien untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui manajemen profesional pada even-even seni, budaya dan olah raga yang secara teratur dilaksanakan setiap tahunnya sehingga masuk dalam kalender even Barito Utara. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur destinasi pariwisata, perhotelan, kuliner, produk kerajinan oleh-oleh (buah tangan) dan berbagai kegiatan ekonomi yang mengiringinya. Sehingga pada muaranya, sektor budaya, pariwisata dan lingkungan hidup menjadi lebih produktif dalam kontribusinya menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah.

Misi 5 Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Misi mewujudkan peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandas pada prinsip *good governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkualitas, menjamin penegakkan hukum, HAM, perlindungan perempuan dan anak serta perlindungan sosial, dalam rangka terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Wujud keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik antara lain diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk pengelolaan keuangan, penilaian “Baik” pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Kemen PAN & RB, Penghargaan Pangripta Nusantara atas Kualitas Perencanaan yang Baik oleh Kementerian PPN/Bappenas, Penghargaan Adipura oleh Kemen LH & Kehutanan dan berbagai pengakuan lain oleh instansi eksternal.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

2.1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah.
2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera.
3. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya.
5. Terwujudnya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.1.3.2 Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah;
2. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik.
3. Menurunnya desa/kelurahan blankspot.
4. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
6. Meningkatnya daya beli masyarakat.
7. Meningkatnya sektor pertanian.
8. Meningkatnya sektor perikanan.
9. Meningkatnya Sektor perkebunan.
10. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM, perdagangan serta industri.
11. Meningkatnya daya saing tenaga kerja.
12. Menurunnya pencemaran lingkungan.
13. Meningkatnya daya saing pariwisata.
14. Meningkatnya ketertiban masyarakat.
15. Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat.
16. Menurunnya penyandang masalah sosial.
17. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi.
18. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja.
19. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik.

20. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, keterkaitan antara visi dan misi yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.

Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1 Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat kota	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah
			Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik
			Menurunnya desa/kelurahan blankspot	Persentase desa/ kelurahan <i>blankspot</i>
Misi 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah 2. Angka melek huruf
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
			Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun
Misi 3 Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini 3. Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian
			Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan
			Meningkatnya Sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan
			Meningkatnya	1. PDRB sektor

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	Koperasi dan usaha kecil menengah 2. PDRB sektor perdagangan 3. PDRB sektor industri
			Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1. Angka pengangguran terbuka 2. Pendapatan Perkapita Penduduk
Misi 4 Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya.	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Angka kriminalitas yang tertangani 3. Angka Konflik	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata
			Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)
			Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik sosial
			Menurunnya penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang tertangani
Misi 5 Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Terwujudnya Kepemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	Nilai SAKIP
			Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK

2.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Utara ditetapkan melalui Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/356/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara.

Tabel 6.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/formula IKU	Sumber Data
1	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	$\frac{\text{jumlah desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	Dinas PUPR
2	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	$\frac{\text{jumlah desa/kelurahan yang terhubung jaringan listrik}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	1. PLN 2. Bagian Adm Perekonomian dan SDA Setda
3	Menurunnya desa/kelurahan <i>blankspot</i>	Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	$\frac{\text{jumlah desa/kel blankspot}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	Diskominfo-sandi
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang tamatkan	Dinas Pendidikan
		Angka melek huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk} \geq 15\text{thn yang melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk} \geq 15\text{thn}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.	Publikasi BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/formula IKU	Sumber Data
6	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	$\frac{\text{Jumlah total pengeluaran}}{\text{Jumlah penduduk}}$	Publikasi BPS
7	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan sektor pertanian	Publikasi BPS
8	Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan sektor perikanan	Publikasi BPS
9	Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	Jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan sektor perkebunan	Publikasi BPS
10	Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Publikasi BPS
		PDRB sektor perdagangan	Jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan sektor perdagangan	Publikasi BPS
		PDRB sektor industri	Jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan sektor industri	Publikasi BPS
11	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran terbuka}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Publikasi BPS
		Pendapatan Perkapita Penduduk	Pendapatan yang didapat dari keseluruhan rata-rata penduduk pada suatu periode tertentu	Publikasi BPS
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
13	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah realisasi kunjungan wisata}}{\text{Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan}} \times 100\%$	Disbudparpora
14	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang terjadi}} \times 100\%$	Satpol PP Damkar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/formula IKU	Sumber Data
		(Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)		
15	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase penyelesaian Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah kasus konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus konflik yang terjadi}} \times 100\%$	1. Polres Barito Utara 2. Badan Kesbangpol
16	Menurunnya penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang mandiri	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial PMD
17	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.	Kementerian PANRB
18	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Kementerian PANRB
19	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Bagian Organisasi Setda
20	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Penilaian opini yang di keluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	BPK RI

Dokumen Indikator Kinerja Utama lebih lengkap tersaji pada lampiran

2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

Perencanaan Kinerja Tahun 2022 telah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara yang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD 2018-2023 dan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2022. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang telah ditandatangani oleh Bupati Barito Utara pada tanggal 19 Januari 2022. Sesuai dengan hasil revisi target pada Perubahan RPJMD 2018-2023, maka juga dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2022.

Tabel 7.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	92,23
2.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	88,35
3.	Menurunnya desa/kelurahan blankspot	Persentase desa/kelurahan blankspot	%	7,77
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	tahun	8,6
		Angka Melek Huruf	%	99,60
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	tahun	71,31
6.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	juta rupiah	9.825
7.	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	juta rupiah	618,194,5
8.	Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	juta rupiah	180.593,6
9.	Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	juta rupiah	387.784,1
10.	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM, perdagangan serta industri	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	juta rupiah	149.466,1
		PDRB sektor perdagangan	juta rupiah	714.179,3
		PDRB sektor industri	juta rupiah	933.619,3
11.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka	%	4,19
		Pendapatan Per Kapita Penduduk	juta rupiah	52,79
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai	73,54

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
13.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata	%	95,70
14.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,50
15.	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik sosial	%	80
16.	Menurunnya penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang mandiri	%	21,40
17.	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	B (61)
18.	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	B (65)
19.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (Nilai)	B (76,90)
20.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	WTP (1)

Dokumen Perjanjian Kinerja lebih lengkap tersaji pada lampiran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja utama (IKU) dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sehingga akan diketahui celah kinerja (*performance gap*) yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk mengukur capaian kinerja untuk masing-masing indikator digunakan rumus:

1. Tingkat Realisasi Positif:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Tingkat Realisasi Negatif:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Persentase capaian sasaran = rata-rata persentase capaian IKU

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Rentang Capaian	Kategori Capaian
>100%	= Baik Sekali (BS)
>75% - 100%	= Baik (B)
55% - 75%	= Cukup (C)
< 55%	= Kurang (K)

3.1.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja untuk masing-masing indikator kinerja tersaji sebagai berikut:

Tabel 8.

Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	92,23	99,02	107,36	BS
2. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	88,35	86,41	97,80	B
3. Menurunnya desa/kelurahan <i>blankspot</i>	Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	%	7,77	5,83	124,97	BS
4. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	tahun	8,6	8,90	103,49	BS
	Angka Melek Huruf	%	99,60	99,53	99,93	B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	tahun	71,31	71,50	100,27	BS
6. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	juta rupiah	9.825	10.182	103,63	BS
7. Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	juta rupiah	618,194,5	563.159,9	91,10	B
8. Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	juta rupiah	180.593,6	177.025,5	98,02	B
9. Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	juta rupiah	387.784,1	519.022,1	133,84	BS
10. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM, perdagangan serta industri	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	juta rupiah	149.466,1	163.084,2	109,11	BS
	PDRB sektor perdagangan	juta rupiah	714.179,3	797.189,4	111,62	BS
	PDRB sektor industri	juta rupiah	933.619,3	1.079.245,6	115,60	BS
11. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka	%	4,19	4,82	84,96	B
	Pendapatan Perkapita Penduduk	juta rupiah	52,79	89,23	169,03	BS
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai	73,54	76,89	104,56	BS
13. Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase Kunjungan wisata	%	95,70	108,92	113,81	BS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
14. Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,50	100	114,29	BS
15. Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase Penyelesaian konflik sosial	%	80	100	125	BS
16. Menurunnya penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang mandiri	%	21,40	24,08	112,52	BS
17. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	B (60,01)	CC (51,16)	83,87	B
18. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	B (65)	B (61,42)	94,49	B
19. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (Nilai)	B (76,90)	B (79,71)	103,65	BS
20. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	WTP (1)	WTP (1)	100	B

Perhitungan untuk masing-masing indikator terlampir

Persentase Pencapaian sasaran strategis merupakan rata-rata persentase pencapaian indikator kinerja utama (IKU) untuk masing-masing sasaran tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 9.
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No.	Sasaran	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	107,36	Baik Sekali
2	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	97,80	Baik
3	Menurunnya desa/kelurahan <i>blankspot</i>	124,97	Baik Sekali
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	101,71	Baik Sekali
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	100,27	Baik Sekali
6	Meningkatnya daya beli masyarakat	103,63	Baik Sekali
7	Meningkatnya sektor pertanian	91,10	Baik
8	Meningkatnya sektor perikanan	98,02	Baik
9	Meningkatnya sektor perkebunan	133,84	Baik Sekali
10	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM, perdagangan serta industri	112,11	Baik Sekali
11	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	127,00	Baik Sekali
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	104,56	Baik Sekali
13	Meningkatnya daya saing pariwisata	113,81	Baik Sekali
14	Meningkatnya ketertiban masyarakat	114,29	Baik Sekali
15	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	125,00	Baik Sekali

No.	Sasaran	Capaian (%)	Kategori
16	Menurunnya penyandang masalah sosial	112,52	Baik Sekali
17	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	83,87	Baik
18	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	94,49	Baik
19	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	103,65	Baik Sekali
20	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	Baik
Rata-rata		107,50	Baik Sekali

Dari 20 (dua puluh) sasaran dengan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk masing-masing kategori adalah:

Tabel 10.

Kategori indikator untuk masing-masing sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
Sasaran 1 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	1	100%
2	Baik (B)	-	-
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 2 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	1	100%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 3 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	1	100%
2	Baik (B)	-	-
3	Cukup (C)	-	-

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 4 (2 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	1	50%
2	Baik (B)	1	50%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 5 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	1	100%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 6 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	1	100%
2	Baik (B)	-	-
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 7 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	1	100%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 8 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	1	100%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 9 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	1	100%
2	Baik (B)	-	-
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 10 (3 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	3	100%

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
2	Baik (B)	-	-
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 11 (2 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	1	50%
2	Baik (B)	1	50%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 12 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	1	100%
2	Baik (B)	-	-
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 13 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	1	100%
2	Baik (B)	-	-
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 14 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	1	100%
2	Baik (B)	-	-
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 15 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	1	100%
2	Baik (B)	-	-
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 16 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	1	100%
2	Baik (B)	-	-
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
Sasaran 17 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	1	100%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 18 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	1	100%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 19 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	1	100%
2	Baik (B)	-	-
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Sasaran 20 (1 indikator)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	1	100%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-

Hasil Pengukuran Kinerja terhadap 24 (dua puluh empat) indikator kinerja utama, diketahui bahwa 16 indikator atau 66,67% bermakna Baik Sekali dan 8 indikator atau 33,33% bermakna Baik. Capaian kinerja untuk sasaran strategis, dari 20 (dua puluh) sasaran strategis, 14 sasaran atau 70% dengan kategori Baik Sekali dan 6 sasaran strategis atau 30% dengan kategori capaian Baik.

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 107,50% atau dalam kategori Baik Sekali. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 104,85%.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2022, dapat dijelaskan beberapa capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Satu, Meningkatnya Desa/Kelurahan yang Terhubung dengan Pusat Wilayah

Keterhubungan antar wilayah masih menjadi isu strategis di Kabupaten Barito Utara. Secara umum di wilayah Kabupaten Barito Utara tidak ada desa/kelurahan yang terisolasi namun sebagian masih terhubung hanya melalui jalur sungai. Pembukaan akses untuk jalur darat perlu dilakukan karena akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam lalu-lintas barang/orang.

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 11.

Capaian kinerja sasaran ke-1 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Desa/Kelurahan yang Terhubung dengan Pusat Wilayah				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	92,23	99,02	107,36

a. Analisis Indikator

Pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Barito Utara untuk meningkatkan desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah diupayakan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah berupa peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan. Tahun 2018, tercatat sudah ada 87 dari total 103 (84,47%) desa/kelurahan di Kabupaten Barito Utara yang memiliki akses jalan darat ke pusat kecamatan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 91 (88,35%) desa/kelurahan di tahun 2019 dan 2020. Tahun 2021 bertambah 1 desa dan tahun 2022 bertambah 10 desa sehingga jumlah desa/kelurahan di

Kabupaten Barito Utara yang memiliki akses jalan darat ke pusat kecamatan tahun 2022 sebanyak 102 dari 103 desa/kelurahan (99,02%).

Tabel 12.

Jumlah desa/kelurahan yang terhubung
akses jalan darat ke pusat wilayah tahun 2018-2022

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Total Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan terhubung jalan darat				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Montallat	Tumpung Laung	10	5	6	6	6	10
2	Gunung Timang	Kandui	16	16	16	16	16	16
3	Gunung Purei	Lampeong	11	11	11	11	11	11
4	Teweh Timur	Benangin	12	12	12	12	12	12
5	Teweh Tengah	Muara Teweh	10	10	10	10	10	10
6	Teweh Baru	Hajak	10	10	10	10	10	10
7	Teweh Selatan	Trahean	10	9	9	9	9	9
8	Lahei	Lahei	13	6	7	7	7	13
9	Lahei Barat	Benao	11	8	10	10	11	11
Jumlah			103	87	91	91	92	102

No.	Rincian Nama Kecamatan/ Desa/Kelurahan	Terhubung (✓)/Belum (-)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kecamatan Montallat					
	1) Rubei	-	-	-	-	✓
	2) Ruji	-	-	-	-	✓
	3) Paring Lahung	-	-	-	-	✓
	4) Kamawen	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Montallat I	-	✓	✓	✓	✓
	6) Montallat II	-	-	-	-	✓
	7) Tumpung Laung I	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Tumpung Laung II	✓	✓	✓	✓	✓
	9) Sikan	✓	✓	✓	✓	✓
	10) Pepas	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Kecamatan Gunung Timang					
	1) Malungai	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Rincian Nama Kecamatan/ Desa/Kelurahan	Terhubung (✓)/Belum (-)				
		2018	2019	2020	2021	2022
	2) Rarawa	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Ketapang	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Walur	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Baliti	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Jaman	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Sangkorang	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Majangkan	✓	✓	✓	✓	✓
	9) Kandui	✓	✓	✓	✓	✓
	10) Payang Ara	✓	✓	✓	✓	✓
	11) Pelari	✓	✓	✓	✓	✓
	12) Siwau	✓	✓	✓	✓	✓
	13) Tongka	✓	✓	✓	✓	✓
	14) Batu Raya I	✓	✓	✓	✓	✓
	15) Batu Raya II	✓	✓	✓	✓	✓
	16) Tapen Raya	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Kecamatan Gunung Purei					
	1) Tanjung Harapan	✓	✓	✓	✓	✓
	2) Linon Besi I	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Linon Besi II	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Muara Mea	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Lawarang	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Lampeong I	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Lampeong II	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Payang	✓	✓	✓	✓	✓
	9) Berong	✓	✓	✓	✓	✓
	10) Baok	✓	✓	✓	✓	✓
	11) Tambaba	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Kecamatan Teweh Timur					
	1) Sampirang I	✓	✓	✓	✓	✓
	2) Sampirang II	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Liju	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Benangin III	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Benangin II	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Benangin V	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Benangin I	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Muara Wakat	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Rincian Nama Kecamatan/ Desa/Kelurahan	Terhubung (✓)/Belum (-)				
		2018	2019	2020	2021	2022
	9) Mampuak I	✓	✓	✓	✓	✓
	10) Jamut	✓	✓	✓	✓	✓
	11) Sei.Liju	✓	✓	✓	✓	✓
	12) Mampuak II	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Kecamatan Teweh Tengah					
	1) Lanjas	✓	✓	✓	✓	✓
	2) Melayu	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Lemo I	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Lemo II	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Pendreh	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Rimba Sari	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Sei. Rahayu I	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Sei Rahayu II	✓	✓	✓	✓	✓
	9) Beringin Raya	✓	✓	✓	✓	✓
	10) Datai Nirui	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Kecamatan Teweh Baru					
	1) Panaen	✓	✓	✓	✓	✓
	2) Liang Buah	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Jingah	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Jambu	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Liang Naga	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Sabuh	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Hajak	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Malawaken	✓	✓	✓	✓	✓
	9) Sikui	✓	✓	✓	✓	✓
	10) Gandring	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Kecamatan Teweh Selatan					
	1) Butong	✓	✓	✓	✓	✓
	2) Trahean	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Trinsing	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Bintang Ninggi I	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Bintang Ninggi II	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Buntok Baru	-	-	-	-	-
	7) Bukit Sawit	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Tawan Jaya	✓	✓	✓	✓	✓
	9) Pandran Raya	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Rincian Nama Kecamatan/ Desa/Kelurahan	Terhubung (✓)/Belum (-)				
		2018	2019	2020	2021	2022
	10) Pandran Permai	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Kecamatan Lahei					
	1) Muara Bakah	✓	✓	✓	✓	✓
	2) Juju Baru	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Muara Pari	-	-	-	-	✓
	4) Mukut	-	-	-	-	✓
	5) Lahei I	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Lahei II	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Ipu	-	-	-	-	✓
	8) Muara Inu	-	✓	✓	✓	✓
	9) Bengahon	-	-	-	-	✓
	10) Rahaden	-	-	-	-	✓
	11) Haragandang	✓	✓	✓	✓	✓
	12) Karendan	✓	✓	✓	✓	✓
	13) Hurup Enep	-	-	-	-	✓
9.	Kecamatan Lahei Barat					
	1) Karamuan	-	-	-	✓	✓
	2) Nihan Hilir	-	✓	✓	✓	✓
	3) Nihan Hulu	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Luwe Hilir	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Luwe Hulu	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Jangkang Baru	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Jangkang Lama	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Papar Pujung	✓	✓	✓	✓	✓
	9) Teluk Malewai	-	✓	✓	✓	✓
	10) Benao Hilir	✓	✓	✓	✓	✓
	11) Benao Hulu	✓	✓	✓	✓	✓
Jumlah		87	91	91	92	102

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, 2023

Adanya peningkatan jumlah desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah dari 87 desa/kelurahan di tahun 2018 menjadi 91 desa/kelurahan di tahun 2020, karena terbukanya jalur darat melalui infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa lokasi, antara lain: Kelurahan Montallat I di kecamatan Montallat, Desa Muara Inu di Kecamatan Lahei,

Desa Nihan Hilir dan Teluk Melawai di Kecamatan Lahei Barat yang telah berjalan sejak tahun 2019. Tahun 2021 jumlah desa yang terhubung bertambah sebanyak 1 desa yaitu dengan pembangunan akses jalan menuju desa Karamuan Kecamatan Lahei Barat dan tahun 2022 bertambah 10 desa melalui pembangunan jalan di kecamatan Montallat dan Lahei.

Tabel 13.

Perbandingan capaian kinerja indikator desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah pada Tahun 2018-2022

Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	%	84,47	84,47	84,47	85,35	92,23
Realisasi	%	84,47	88,35	88,35	89,32	99,02
Capaian	%	100	104,59	104,59	104,65	107,36

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Pencapaian kinerja tahun 2022 telah melampaui target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan capaian 107,36%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD di tahun 2023 mendatang yaitu sebesar 92,23% maka telah melampaui target.

Tabel 14.

Perbandingan capaian kinerja indikator desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	84,47	92,23	99,02	107,36	92,23	107,36%

Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian target kinerja pada tahun 2022 antara lain :

- 1) Perencanaan yang matang dalam pembukaan akses darat di beberapa lokasi yang telah ditentukan dimana perencanaan sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (N-1).
- 2) Tersedianya anggaran yang cukup untuk mengeksekusi perencanaan yang dibuat.
- 3) Terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan penghubung yang telah ada sebelumnya dalam kondisi baik dan fungsional.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program-program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja daerah tersaji pada pohon program sebagai berikut:

Tabel 15.

Pohon Program Pendukung Sasaran-1

Sasaran Strategis: Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah			
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian IKU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
		Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	

Pencapaian target kinerja tahun 2022 didukung dengan keberhasilan pelaksanaan program penyelenggaraan jalan dengan kegiatan pembangunan jalan baru di kecamatan Montallat dan Kecamatan Lahei, paket pekerjaan jembatan dan pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan oleh Dinas PUPR sebagai langkah membuka akses dan mempertahankan daya dukung jalan dan jembatan.

3.2.2 Sasaran Dua, Meningkatnya Desa/Kelurahan yang Terhubung Listrik

Ketersediaan energi khususnya listrik berperan penting dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. ketersediaan listrik bagi masyarakat masih menjadi salah satu isu penting di Kabupaten Barito Utara terutama dalam memenuhi ketersediaan jaringan listrik hingga pedesaan. Oleh sebab itu mulai RPJMD 2018-2023, meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik menjadi salah satu sasaran startegis pembangunan daerah.

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-2 pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 16.

Capaian kinerja sasaran ke-2 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Desa/Kelurahan yang Terhubung Listrik				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	88,35	86,41	97,80

a. Analisis Indikator

Tahun 2022 ditargetkan ada 91 dari 103 (88,35%) desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Barito Utara telah terhubung dengan jaringan listrik. Jaringan listrik dimaksud berasal dari jaringan listrik PLN maupun listrik non PLN baik dari PLTD maupun PLTS. Realisasi untuk tahun 2022, ada 89 desa/kelurahan (86,41%) yang sudah terhubung dengan rincian 80 yang terhubung dengan jaringan listrik PLN dan 9 desa dengan listrik non PLN. Sehingga pencapaian kinerja tahun 2022 sebesar 97,80% atau dalam kategori baik.

Tabel 17.

Ketersediaan jaringan listrik di desa/kelurahan tahun 2020-2022

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Ketersediaan Jaringan Listrik					
		2020		2021		2022	
		PLN	non PLN	PLN	non PLN	PLN	non PLN
1.	Kecamatan Montallat	8	0	8	0	9	0
	1) Rubei	√		√		√	
	2) Ruji	√		√		√	
	3) Paring Lahung	√		√		√	
	4) Kamawen	√		√		√	
	5) Montallat I					√	
	6) Montallat II	√		√		√	
	7) Tumpung Laung I	√		√		√	
	8) Tumpung Laung II	√		√		√	
	9) Sikan						
	10) Pepas	√		√		√	
2.	Kecamatan Gunung Timang	16	0	16	0	16	0
	1) Malungai	√		√		√	
	2) Rarawa	√		√		√	
	3) Ketapang	√		√		√	
	4) Walur	√		√		√	
	5) Baliti	√		√		√	
	6) Jaman	√		√		√	
	7) Sangkorang	√		√		√	
	8) Majangkan	√		√		√	
	9) Kandui	√		√		√	
	10) Payang Ara	√		√		√	
	11) Pelari	√		√		√	
	12) Siwau	√		√		√	
	13) Tongka	√		√		√	
	14) Batu Raya I	√		√		√	
	15) Batu Raya II	√		√		√	
	16) Tapen Raya	√		√		√	
3.	Kecamatan Gunung Purei	0	3	4	3	4	4
	1) Tanjung Harapan						
	2) Linon Besi I						
	3) Linon Besi II						
	4) Muara Mea		√		√		√
	5) Lawarang		√		√		√

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Ketersediaan Jaringan Listrik					
		2020		2021		2022	
		PLN	non PLN	PLN	non PLN	PLN	non PLN
	6) Lampeong I			√		√	
	7) Lampeong II			√		√	
	8) Payang			√		√	
	9) Berong						√
	10) Baok			√		√	
	11) Tambaba		√		√		√
4.	Kecamatan Teweh Timur	3	2	3	2	3	2
	1) Sampirang I		√		√		√
	2) Sampirang II						
	3) Liju						
	4) Benangin III						
	5) Benangin II	√		√		√	
	6) Benangin V	√		√		√	
	7) Benangin I	√		√		√	
	8) Muara Wakat						
	9) Mampuak I						
	10) Jamut						
	11) Sei Liju		√		√		√
	12) Mampuak II						
5.	Kecamatan Teweh Tengah	10	0	10	0	10	0
	1) Lanjas	√		√		√	
	2) Melayu	√		√		√	
	3) Lemo I	√		√		√	
	4) Lemo II	√		√		√	
	5) Pendreh	√		√		√	
	6) Rimba Sari	√		√		√	
	7) Sei. Rahayu I	√		√		√	
	8) Sei Rahayu II	√		√		√	
	9) Beringin Raya	√		√		√	
	10) Datai Nirui	√		√		√	
6.	Kecamatan Teweh Baru	9	0	9	0	9	0
	1) Panaen	√		√		√	
	2) Liang Buah						
	3) Jingah	√		√		√	
	4) Jambu	√		√		√	
	5) Liang Naga	√		√		√	
	6) Sabuh	√		√		√	

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Ketersediaan Jaringan Listrik					
		2020		2021		2022	
		PLN	non PLN	PLN	non PLN	PLN	non PLN
	7) Hajak	√		√		√	
	8) Malawaken	√		√		√	
	9) Sikui	√		√		√	
	10) Gandring	√		√		√	
7.	Kecamatan Teweh Selatan	8	0	9	0	9	1
	1) Butong						√
	2) Trahean	√		√		√	
	3) Trinsing	√		√		√	
	4) Bintang Ninggi I	√		√		√	
	5) Bintang Ninggi II	√		√		√	
	6) Buntok Baru			√		√	
	7) Bukit Sawit	√		√		√	
	8) Tawan Jaya	√		√		√	
	9) Pandran Raya	√		√		√	
	10) Pandran Permai	√		√		√	
8.	Kecamatan Lahei	5	4	5	4	9	2
	1) Muara Bakah					√	
	2) Juju Baru		√		√	√	
	3) Muara Pari					√	
	4) Mukut	√		√		√	
	5) Lahei I	√		√		√	
	6) Lahei II	√		√		√	
	7) Ipu	√		√		√	
	8) Muara Inu						
	9) Bengahon						
	10) Rahaden		√		√		√
	11) Haragandang		√		√		√
	12) Karendan	√		√		√	
	13) Hurup Enep		√		√	√	
9.	Kecamatan Lahei Barat	10	0	10	0	11	0
	1) Karamuan	√		√		√	
	2) Nihan Hilir	√		√		√	
	3) Nihan Hulu					√	
	4) Luwe Hilir	√		√		√	
	5) Luwe Hulu	√		√		√	
	6) Jangkang Baru	√		√		√	

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Ketersediaan Jaringan Listrik					
		2020		2021		2022	
		PLN	non PLN	PLN	non PLN	PLN	non PLN
	7) Jangkang Lama	√		√		√	
	8) Papar Pujung	√		√		√	
	9) Teluk Malewai	√		√		√	
	10) Benao Hilir	√		√		√	
	11) Benao Hulu	√		√		√	
Jumlah		69	9	73	9	80	9
		78		82		89	

Sumber : PLN ULP Muara Teweh dan Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, 2023

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2018-2022 terjadi peningkatan jumlah desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik sebanyak 27 desa (26,21%).

Tabel 18.

Perbandingan capaian kinerja indikator desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik tahun 2018-2022

	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah desa/kelurahan terhubung jaringan listrik	Desa	62	66	78	82	89
Persentase yang terhubung listrik dari total 103 desa/kelurahan	%	60,19	64,08	75,73	79,61	86,41
Target kinerja	%	-	66,99	74,76	81,55	88,35
Capaian kinerja	%	-	95,66	101,30	97,62	97,80

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Pencapaian target pada RPJMD untuk tahun 2022 sebesar 97,80%, belum mencapai target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 sebesar 95,15% (98 desa/kelurahan) dengan realisasi tahun 2022 sebesar 86,41% (89 desa/kelurahan) maka

masih terdapat selisih (*gap*) sebesar 15,53% atau sebanyak 16 desa lagi yang perlu dikejar pemenuhannya sampai dengan akhir tahun 2023.

Tabel 19.

Perbandingan capaian kinerja indikator desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	60,19	88,35	86,41	97,80	95,15	90,81

Faktor penghambat pencapaian target kinerja tahun 2021 adalah:

- 1) Belum tersedianya akses jalan yang baik menuju desa-desa yang masih belum teraliri listrik sehingga memperlambat proses pembangunan jaringan karena harus mengangkut material melalui sungai.
- 2) Kendala pembebasan jalan (row) pembangunan jaringan listrik.

Sehubungan dengan kewenangan pembangunan jaringan listrik berada pada PLN dan kewenangan suburusan ketenagalistrikan berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maka solusi yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang antara lain:

- 1) Meningkatkan dukungan dan koordinasi dengan PLN dalam rangka penanganan permasalahan pembangunan jaringan listrik berkaitan masalah pembebasan jalan (row) dengan memediasi pertemuan antara warga beserta dengan perwakilan dari PLN. Telah dibentuk tim terpadu yang melibatkan seluruh *stakeholder* dalam penanganan permasalahan pembebasan lahan.
- 2) Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terutama dalam pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum

berkembang, daerah terpencil dan perdesaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

- 3) Meningkatkan kinerja pembangunan akses jalan dan jembatan dari pusat kecamatan menuju desa-desa yang belum teraliri listrik.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program-program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja daerah pada sasaran ke-2 tersaji pada pohon program sebagai berikut:

Tabel 20.

Pohon Program Pendukung Sasaran-2

Sasaran Strategis: Meningkatnya Desa/Kelurahan yang Terhubung Listrik			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	Program pembangunan infrastruktur perdesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah (Bag. Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk suburusan ketenagalistrikan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sehingga untuk masalah pembangunan jaringan listrik Pemerintah Kabupaten Barito Utara tidak bisa mengeksekusi secara langsung.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah melaksanakan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan berupa koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan ketenagalistrikan. Selain itu

berkoordinasi dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam pembangunan jaringan listrik baru di wilayah Kabupaten Barito Utara.

Secara umum program dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah berjalan baik dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam hal ini Provinsi Kalimantan Tengah dan PT. PLN selaku yang memiliki kewenangan dalam membangun jaringan listrik. Kendala yang dihadapi dalam percepatan pelaksanaan program perluasan jaringan listrik di beberapa daerah di Barito Utara antara lain:

- 1) Kendala akses jalan yang rusak dan sulit dijangkau sehingga PT. PLN harus memngangkut material melalui jalur sungai yang memakan biaya tinggi dan waktu yang lebih lama.
- 2) Kendala pembebasan jalan (row).

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Barito Utara melakukan beberapa alternatif solusi antara lain:

- 1) Memfasilitasi dan mendampingi kegiatan peninjauan lapangan persiapan Pra Pekerjaan Listrik Desa yang masuk wilayah kecamatan bersama dengan rombongan PT. PLN UP2K Kalimantan Tengah.
- 2) Memfasilitasi kendala pembebasan jalan (row) dengan melibatkan seluruh *stakeholder* termasuk dengan masyarakat jika terjadi konflik dalam proses pembebasannya.

3.2.3 Sasaran Tiga, Menurunnya Desa/Kelurahan *Blankspot*

Ketersediaan layanan komunikasi bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting terutama para era digital. Ketersediaan layanan komunikasi terutama sinyal seluler masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat Barito Utara. Oleh karena itu salah satu sasaran strategis pembangunan daerah adalah menurunkan desa/kelurahan yang *blankspot*.

Perbandingan target dan realisasi kinerja untuk sasaran ke-3 adalah sebagai berikut:

Tabel 21.

Capaian kinerja sasaran ke-3 tahun 2022

Sasaran: Menurunnya Desa/Kelurahan <i>Blankspot</i>				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	%	7,77	5,83	124,97

a. Analisis Indikator

Tahun 2022 ditargetkan tersisa 7,77% (8 dari 103) desa/kelurahan *blankspot*. Berdasarkan data jaringan komunikasi (signal GSM) yang dihimpun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara, pada tahun 2022 tersisa 6 desa (5,82%) yang berada dalam status *blankspot* sehingga capaian kinerja untuk tahun 2022 sebesar 124,97% atau dalam kategori baik sekali.

Tabel 22.

Jumlah desa/kelurahan berdasarkan status ketersediaan jaringan GSM di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Total Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan berdasarkan status ketersediaan jaringan (signal GSM)		
			Baik	Lemah	Tidak ada (<i>blankspot</i>)
1.	Montallat	10	8	2	-
2.	Gunung Timang	16	9	7	-
3.	Gunung Purei	11	2	3	6
4.	Teweh Timur	12	12	-	-

No	Kecamatan	Jumlah Total Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan berdasarkan status ketersediaan jaringan (signal GSM)		
			Baik	Lemah	Tidak ada (<i>blankspot</i>)
5.	Teweh Tengah	10	6	4	-
6.	Teweh Baru	10	9	1	-
7.	Teweh Selatan	10	8	2	-
8	Lahei	13	6	7	-
9.	Lahei Barat	11	6	5	-
Jumlah		103	66	31	6

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Barito Utara, 2023

Desa yang masih dalam kondisi *blankspot* antara lain Desa Baok, Linon Besi I, Linon Besi II, Tambaba, Tanjung Harapan dan Berong yang semuanya berada pada wilayah Kecamatan Gunung Purei. Jumlah 6 desa tahun 2022 ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 23.

Perbandingan capaian kinerja indikator desa/kelurahan *blankspot* tahun 2018-2022

Satuan		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah desa/kelurahan <i>blankspot</i>	Desa	43	18	16	15	6
Persentase yang <i>blankspot</i> dari total 103 desa/kelurahan	%	41,75	17,48	15,53	14,56	5,83
Target kinerja	%	66,02	46,60	27,18	17,18	7,77
Capaian kinerja	%	136,76	162,49	142,85	115,25	124,97

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Pencapaian target pada RPJMD untuk tahun 2022 sebesar 124,97% (baik sekali) melebihi target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 sebesar 0% atau tidak ada lagi desa dengan kondisi *blankspot* maka masih ada 6 desa yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2023. Selain itu kinerja juga perlu ditingkatkan dan diperluas cakupannya terutama untuk mengatasi desa/kelurahan yang masih dalam kondisi signal lemah.

Tabel 24.

Perbandingan capaian kinerja indikator persentase desa/kelurahan
blankspot terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	%	60,19	7,77	5,83	124,97	0	94,17

Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian target kinerja pada tahun 2022 antara lain :

- 1) Adanya percepatan perluasan jaringan telekomunikasi dengan pembangunan menara BTS (*Base Transceiver Station*).
- 2) Penggunaan alternatif alat penguat sinyal/*repeater*.
- 3) Adanya dukungan dari perusahaan *provider* penyedia layanan GSM dalam peningkatan jangkauan layanan.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja daerah pada sasaran ke-3 tersaji pada pohon program sebagai berikut:

Tabel 25.

Pohon Program Pendukung Sasaran-3

Sasaran Strategis : Menurunnya Desa/Kelurahan Blankspot			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	Program pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Aplikasi Informatika	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	

Dalam memperluas jangkauan sinyal komunikasi, Pemerintah Kabupaten Barito Utara tidak berwenang dalam pembangunan menara BTS (*Base Transceiver Station*). Sehingga untuk mencapai target kinerja tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DiskominfoSandi) secara aktif mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dalam pembangunan menara BTS.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan telah direspon dengan disetujuinya jumlah desa yang masuk dalam daftar pembangunan menara BTS Tahun 2021 – 2022 sebanyak 51 desa. Sampai saat ini telah terbangun menara BTS baru di 3 desa (Benangin I, Tawan Jaya dan Montallat II) dan telah dilakukan kegiatan survei pada lokasi lain.

Sambil menunggu realisasi pemasangan menara BTS, DiskominfoSandi Kabupaten Barito Utara melakukan pemasangan alat penguat sinyal/*repeater* sebagai alternatif untuk memperluas jangkauan signal GSM termasuk bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengalokasikan dana DD/ADD untuk pembelanjaan *repeater* tersebut. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan perusahaan *provider* penyedia layanan GSM dalam peningkatan jangkauan layanan.

3.2.4 Sasaran Empat, Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-4 adalah sebagai berikut:

Tabel 26.

Capaian kinerja sasaran ke-4 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan					
No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rata-rata lama sekolah	tahun	8,60	8,90	103,49
2.	Angka melek huruf	%	99,60	99,53	99,93
Rata-rata					101,71

a. Analisis Indikator 1, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Salah satu variabel dari komponen pembangunan manusia yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh penduduk. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan.

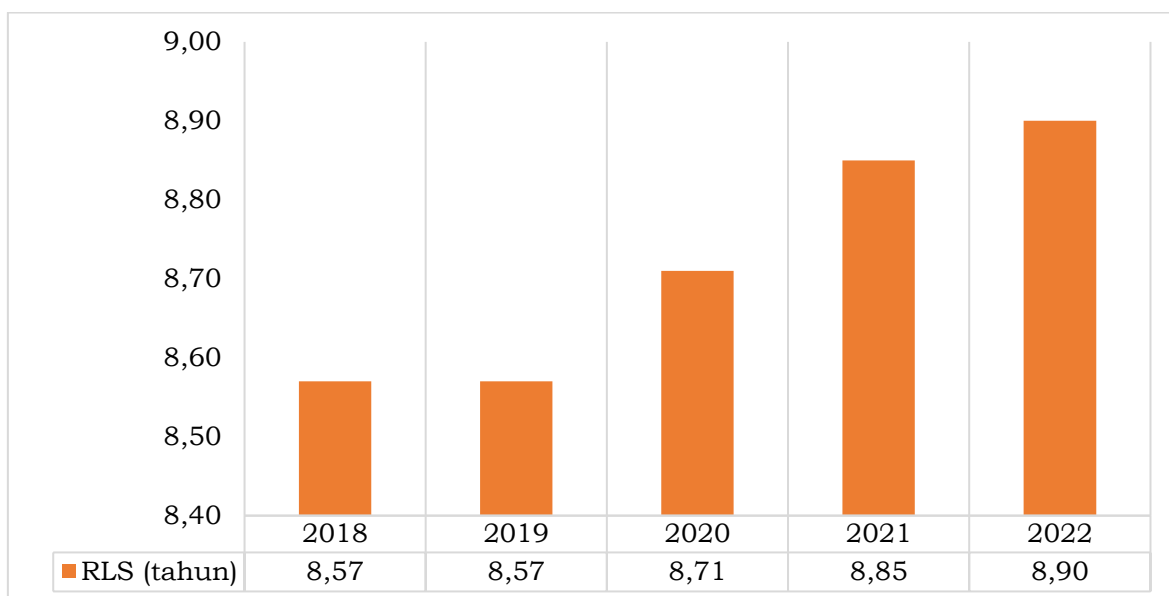
Tahun 2022 ditargetkan rata-rata lama sekolah Kabupaten Barito Utara sebesar 8,6 tahun dan mampu terealisasi 8,9 tahun dengan capaian kinerja 103,49% atau dalam kategori baik sekali. Sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, Angka rata-rata lama sekolah tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dan 2020.

Tabel 27.

Perbandingan capaian kinerja indikator Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022

Rata-rata lama sekolah	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	tahun	8,57	8,60	8,70	8,50	8,60
Realisasi	tahun	8,57	8,57	8,71	8,85	8,90
Capaian	%	100	99,651	100,11	104,12	103,49

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023



Gambar 3. Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2018-2022

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Utara berada di atas angka provinsi Kalimantan Tengah dan angka nasional. Menurut data terakhir yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 8,65 tahun dan angka rata-rata lama sekolah Indonesia adalah 8,69 tahun.

Tabel 28.

Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Utara dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)		
Kabupaten Barito Utara	Provinsi Kalimantan Tengah	Indonesia
8,90	8,65	8,69

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pencapaian target pada RPJMD untuk tahun 2022 sebesar 103,49%, telah memenuhi target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir perubahan RPJMD di tahun 2023 untuk rata-rata lama sekolah yaitu 8,7 tahun dengan realisasi tahun 2022 sebesar 8,90 tahun, maka realisasinya sebesar 102,30%.

Tabel 29.

Perbandingan capaian kinerja indikator Rata-Rata Lama Sekolah terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Rata-Rata Lama Sekolah	%	8,57	8,6	8,9	103,49	8,7	102,30

Beberapa faktor pendukung tercapainya target kinerja tahun 2022 adalah:

- 1) Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya angka partisipasi Pendidikan anak usia dini
- 2) Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar ditunjukkan dengan semakin meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar
- 3) Berjalannya program dan kegiatan untuk peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Pendidikan dasar.

b. Analisis Indikator 2, Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan sehingga Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Proporsi AMH merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tahun 2022 ditargetkan Angka Melek Huruf Kabupaten Barito Utara sebesar 99,60% dan realisasinya sebesar 99,53% sehingga capaian kinerja untuk tahun 2022 sebesar 99,33% dengan kategori baik. Angka melek huruf diperoleh dari jumlah penduduk di usia >15 tahun yang melek huruf sebanyak 121.417 jiwa dibanding jumlah total penduduk usia >15 tahun sebanyak 121,988 jiwa.

Dalam kurun tahun 2018-2022 Angka Melek Huruf di Kabupaten Barito Utara cenderung mengalami peningkatan. Secara kumulatif sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 4,31%.

Tabel 30.

Perbandingan capaian kinerja indikator Angka Melek Huruf Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas (jiwa)	114.735	146.200	121.988	121.988	121.988
2	Jumlah Melek Huruf (jiwa)	112.603	145.629	119.751	121.417	121.417
Angka Melek Huruf (%)		98,14	99,61	98,14	99,53	99,53
Target Angka Melek Huruf (%)		98,14	98,80	99,00	99,20	99,60
Capaian Kinerja (%)		100	100,82	99,13	100,33	99,93

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Barito Utara, 2023

Angka Melek Huruf Kabupaten Barito Utara berada di atas angka provinsi Kalimantan Tengah dan di atas angka nasional. Menurut data

terakhir yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Utara adalah 99,53% sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah adalah 99,10% dan untuk tingkat Nasional adalah 96,04%.

Tabel 31.

Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Barito Utara dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia

Angka Melek Huruf		
Kabupaten Barito Utara	Provinsi Kalimantan Tengah	Indonesia
99,53%	99,12%	96,35%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022) dan Dinas Pendidikan Kab. Barito Utara (2022)

Pencapaian target pada RPJMD untuk tahun 2022 sebesar 99,93%. Bila dibandingkan antara target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 untuk angka melek huruf sekolah yaitu 99,6% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 99,53%, maka masih terdapat *gap* sebesar 0,07%.

Tabel 32.

Perbandingan capaian kinerja indikator Angka Melek Huruf terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Angka Melek Huruf	%	98,14	99,60	99,53	99,93	99,6	99,93

Beberapa faktor penyebab target kinerja tahun 2022 tidak tercapai adalah:

- 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan.
- 2) Tingkat gengsi yang masih tinggi sehingga untuk memenuhi pendidikan penyelesaian buta aksara terabaikan.

- 3) Kurangnya motivasi untuk mengikuti paket A dan B masih sangat rendah, terutama yang berdomisili pada pedalaman atau perkampungan yang jauh selain itu faktor pekerjaan atau mata pencarian seperti pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan.

Solusi yang dilaksanakan untuk mengatasi faktor tersebut antara lain:

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan pendekatan intensif kepada kelompok masyarakat tentang pentingnya Pendidikan.
- 2) Melaksanakan kampanye dan pembudayaan gemar membaca sampai ke tingkat desa.
- 3) Meningkatkan pembinaan kepada lembaga non formal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya.

c. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program-program penunjang keberhasilan pencapaian sasaran ke-4 tersaji pada pohon program sebagai berikut:

Tabel 33.

Pohon Program Pendukung Sasaran-4

Sasaran Strategis: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1. Rata-rata lama sekolah 2. Angka melek huruf	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan Batara pintar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Program Pengembangan Kurikulum	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Untuk mencapai target kinerja tahun 2022 melalui Dinas Pendidikan dilaksanakan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan serta kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain itu didukung dengan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Pada indikator Angka Melek Huruf belum mencapai target yang diharapkan disebabkan beberapa kendala dalam pelaksanaan program terutama pelaksanaan program Pengelolaan Pendidikan berupa kegiatan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang belum tercapai optimal karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pendidikan kesetaraan paket A dan paket B. Hal ini disebabkan rendahnya motivasi masyarakat terutama yang berdomisili pada pedalaman atau perkampungan.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan yaitu:

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan pendekatan intensif kepada kelompok masyarakat terutama pedalaman dan perkampungan tentang pentingnya Pendidikan.
- 2) Melakukan pembinaan terhadap perpustakaan desa untuk meningkatkan minat baca diantaranya melalui kegiatan sosialisasi dan pemilihan duta baca, pendataan tenaga perpustakaan desa dan pelaksanaan lomba perpustakaan desa.

3.2.5 Sasaran Lima, Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-5 adalah sebagai berikut:

Tabel 34.

Capaian kinerja sasaran ke-5 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka Harapan Hidup	tahun	71,31	71,50	100,27

a. Analisis Indikator

Angka Harapan Hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Dalam hal ini berdasarkan serangkaian *Age Specific Rate* atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu.

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 adalah 71,50. Angka Harapan Hidup tahun 2022 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang nilainya 71,30. Target kinerja tahun 2022 dapat dicapai 100,27% atau dengan kategori baik sekali.

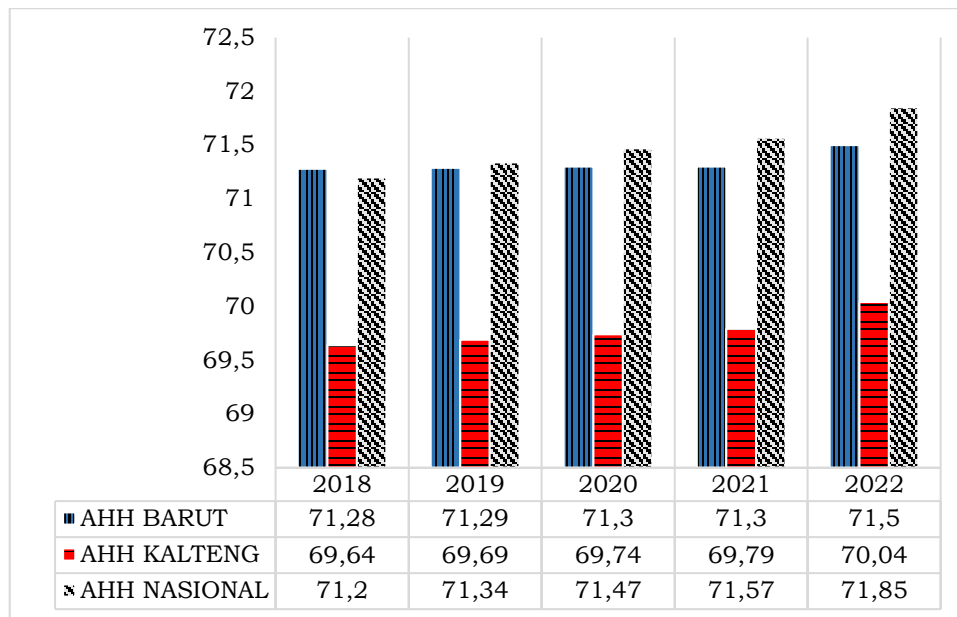
Tabel 35.

Perbandingan Capaian kinerja indikator Angka Harapan Hidup
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022

Angka Harapan Hidup	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	tahun	72,33	71,28	71,29	71,30	71,31
Realisasi	tahun	71,28	71,29	71,30	71,30	71,50
Capaian	%	98,55	100,01	100,01	100	100,27

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Selama 5 (lima) tahun terakhir sejak 2018 sampai dengan 2022, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Barito Utara terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2018-2022 terjadi peningkatan sebesar 0,22 tahun. Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah tetapi masih berada di bawah AHH Nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 4. Grafik Perbandingan AHH Kabupaten Barito Utara dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Target RPJMD untuk tahun 2022 dapat tercapai 100,27%. Bila dibandingkan antara target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 yaitu 71,32 tahun dengan realisasi tahun 2022 sebesar 71,50 tahun, maka realisasinya sebesar 100,25%.

Tabel 36.

Perbandingan capaian kinerja indikator Angka Harapan Hidup terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Angka Harapan Hidup	%	71,28	71,31	71,50	100,27	71,32	100,25

Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian target kinerja pada tahun 2022 antara lain:

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam praktik pola hidup sehat seiring dengan gencarnya kampanye Gerakan Kesehatan Masyarakat (GERMAS).
- 2) Semakin baiknya pemberian layanan pada fasilitas kesehatan yang ditunjukkan dengan baiknya hasil survei kepuasan masyarakat pengguna layanan kesehatan di Barito Utara.
- 3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan terutama dengan semakin meningkatnya pembangunan RSUD Muara Teweh serta peningkatan kualitas puskesmas.
- 4) Adanya dukungan program dari beberapa perangkat daerah yang saling bersinergi mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program-program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja daerah tersaji pada pohon program sebagai berikut:

Tabel 37.

Pohon Program Pendukung Sasaran-5

Sasaran Strategis: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Angka Harapan Hidup	Program peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk mencapai target kinerja tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Kesehatan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan:

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif
- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Selain kegiatan tersebut juga ditunjang dengan sinergi kegiatan keolahragaan dan kegiatan pelaksanaan dan pembinaan KB.

3.2.6 Sasaran Enam, Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-6 adalah sebagai berikut:

Tabel 38.

Capaian kinerja sasaran ke-6 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pengeluaran perkapita pertahun	juta rupiah	9.825	10.182	103,63

a. Analisis Indikator

Salah satu indikator membaiknya pembangunan manusia di suatu daerah adalah meningkatnya standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Tahun 2022 ditargetkan pengeluaran perkapita sebesar 9.825 juta rupiah. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita di Kabupaten Barito Utara tahun 2022 sebesar 10.182 juta sehingga capaian kinerja untuk tahun 2022 sebesar 103,63% atau dengan predikat baik sekali.

Realisasi pengeluaran perkapita pertahun untuk tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya dari 9.951 juta rupiah menjadi 10.182 juta rupiah. Persentase capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan.

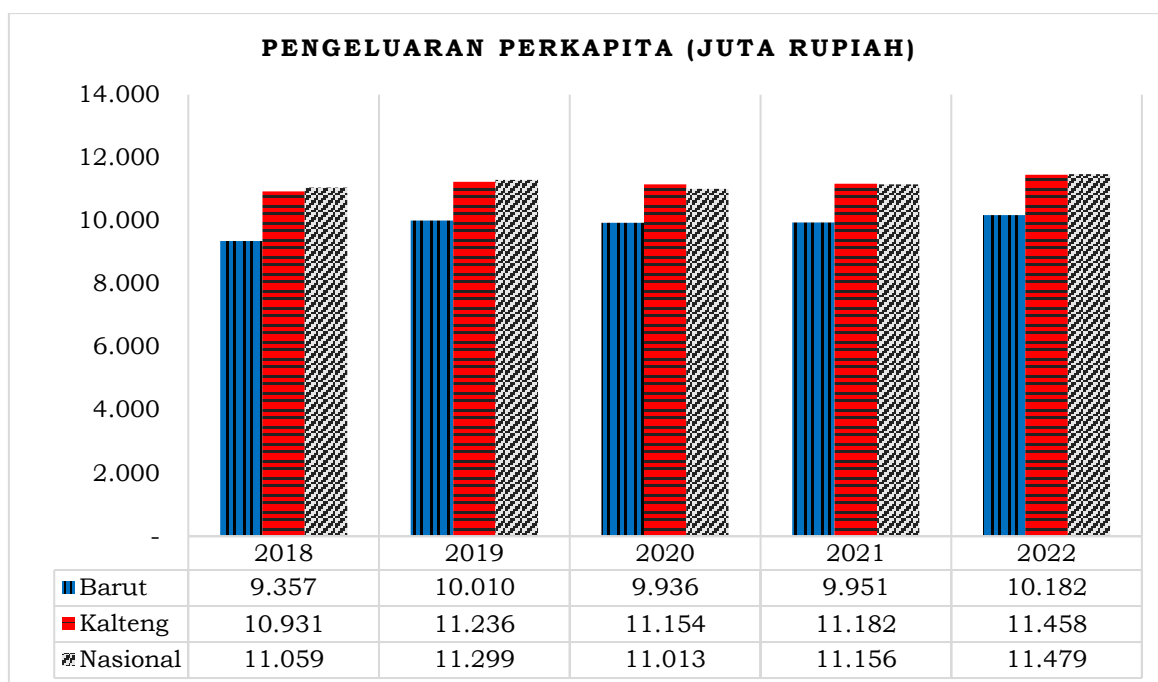
Tabel 39.

Perbandingan capaian kinerja indikator pengeluaran perkapita pertahun tahun 2018-2022

Pengeluaran perkapita pertahun	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	Juta rupiah	9.179	9.324	9.478	9.643	9.825
Realisasi	Juta rupiah	9.36	10.01	9.936	9.951	10.182
Capaian	%	101,97	107,36	104,83	103,19	103,63

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Dalam periode 2018-2022, Pengeluaran Perkapita Kabupaten Barito Utara cenderung mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan angka provinsi dan nasional maka realisasi Pengeluaran Perkapita Kabupaten Barito Utara masih berada di bawah angka provinsi maupun nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 5. Grafik Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Barito Utara dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022.

Pencapaian target pada RPJMD untuk tahun 2022 sebesar 103,63%, telah melebihi target yang telah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 untuk pengeluaran perkapita pertahun yaitu 10.027 maka capaian realisasi tahun 2022 sebesar 101,55%.

Tabel 40.

Perbandingan capaian kinerja indikator Pengeluaran perkapita pertahun terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Pengeluaran perkapita pertahun	%	9.357	9.825	10.182	103,63	10.027	101,55

Beberapa faktor pendorong keberhasilan pencapaian target kinerja tahun 2022 antara lain:

- 1) Semakin membaiknya kondisi penyebaran Covid-19 dimana terjadi penurunan penyebaran di Kabupaten Barito Utara sehingga pembatasan kegiatan masyarakat dapat diperlonggar dan kegiatan usaha bisa kembali berjalan.
- 2) Aktivitas perusahaan perlahan kembali berjalan sehingga pekerja yang sebelumnya dirumahkan bisa aktif kembali.
- 3) Pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan turut menciptakan lapangan pekerjaan di desa sehingga meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pedesaan.

b. Analisis Program Pendukung

Program-program pendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ke-6 adalah sebagai berikut:

Tabel 41.

Pohon Program Pendukung Sasaran-6

Sasaran Strategis: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pengeluaran perkapita pertahun	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
		Program Hubungan Industrial	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan

Untuk mencapai target kinerja tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berupaya meningkatkan kesempatan kerja melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan:

- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan
- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah

Selain kegiatan di atas, melalui Dinas PMPTSP, dilaksanakan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Barito Utara.

3.2.7 Sasaran Tujuh, Meningkatnya Sektor Pertanian

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-7 adalah sebagai berikut:

Tabel 42.

Capaian kinerja sasaran ke-7 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Sektor Pertanian				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
PDRB sektor pertanian	juta rupiah	618.194,5	563.159,9	91,10

a. Analisis Indikator.

Meningkatnya pembangunan sektor pertanian diukur melalui Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) sektor pertanian. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Sumber data berasal dari BPS Kabupaten Barito Utara yang dalam penentuan target dan realisasi perhitungannya juga memperhitungkan kehutanan dan penebangan kayu namun tidak termasuk perkebunan dan perikanan.

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 ditargetkan sebesar 618.194,5 juta rupiah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara untuk realisasi PDRB Sektor Pertanian tahun 2022 sebesar 563.159,93 juta rupiah sehingga capaian kinerjanya 91,10% atau dalam kategori baik.

Berdasarkan rilis data terbaru dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara Tahun 2022, realisasi PDRB Pertanian tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan akan tetapi secara pencapaian target kinerja masih belum mencapai target yang ditetapkan.

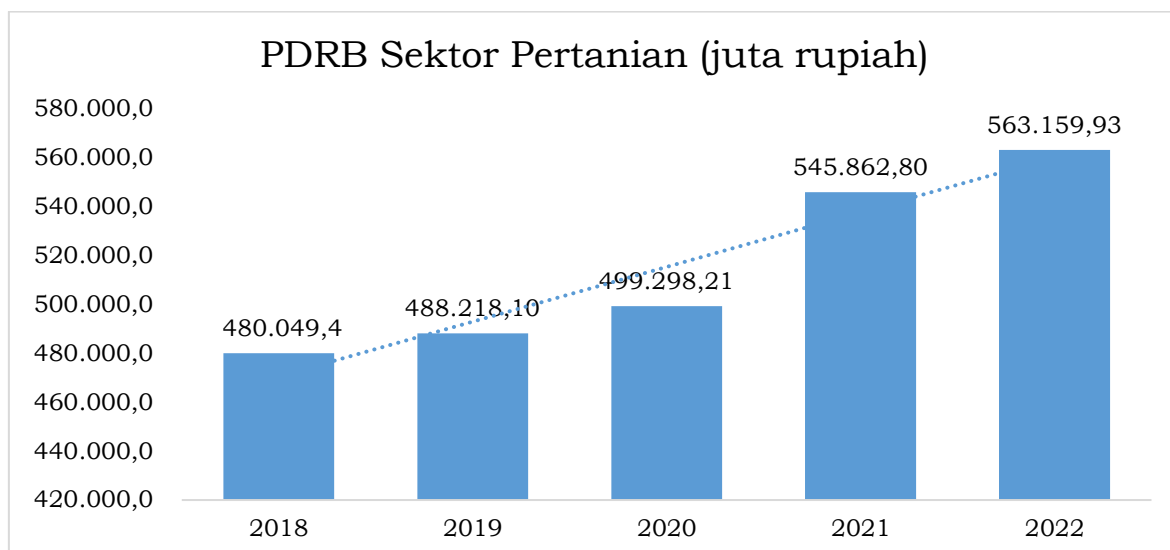
Tabel 43.

Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB sektor pertanian
tahun 2018-2022

PDRB sektor pertanian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	Juta rupiah	443.932,5	447.870,3	528.757,4	571.795,0	618.194,5
Realisasi	Juta rupiah	480.049,4	488.218,1	499.298,2	545.862,8	563.159,9
Capaian	%	108,14	109,01	94,43	95,46	91,10

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi PDRB sektor pertanian Kabupaten Barito Utara cenderung mengalami peningkatan. Data BPS menunjukkan dalam periode 2018-2022 terjadi peningkatan sebesar 83.110,53 juta rupiah.



Sumber: BPS Kab. Barito Utara, 2023

Gambar 6. Perbandingan Realisasi PDRB Sektor Pertanian
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022

Jika dibandingkan dengan pencapaian RPJMD, pencapaian target untuk tahun 2022 sebesar 91,10%, masih terdapat *gap performance* sebesar 8,90%. Target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 untuk PDRB

sektor pertanian yaitu 668.183,8 juta rupiah. Sehingga capaian realisasi tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 84,28%.

Tabel 44.

Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB Sektor Pertanian terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
PDRB Sektor Pertanian	%	480.049,4	618.194,5	563.159,9	91,10	668.183,8	84,28

Untuk meningkatkan PDRB Sektor Pertanian, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pertanian dan beberapa Dinas terkait melakukan upaya peningkatan produksi pertanian dengan melaksanakan program-program yang mendukung peningkatan produksi tanaman pangan dan produksi peternakan.

Produksi tanaman pangan tahun 2022 sebesar 122.123,24 ton mengalami penurunan sebesar 35.341,76 ton dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan produksi daging ternak dan telur tahun 2022 mencapai 2.531.675 ton. Produksi daging ternak dan telur tahun 2022 ini lebih tinggi dari tahun 2021 dengan selisih 266,17 ton.

Tabel 45.

Produksi Tanaman Pangan dan Produksi Peternakan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022

No	Produksi	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produksi Tanaman Pangan	ton	137.134,00	133.428,00	197.200,00	157.465,00	122.123,24
2.	Produksi Daging Ternak dan Telur	ton	1.771,76	2.070,95	2.188,73	2.265,51	2.531,68

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Barito Utara, 2023

Faktor penghambat sebagai penyebab belum tercapainya target kinerja tahun 2022 adalah menurunnya produksi tanaman pangan yang disebabkan oleh:

1. Tingginya intensitas hujan sehingga menyebabkan banjir tahun 2022 yang merusak lahan pertanian.
2. Terjadinya serangan hama pada sebagian wilayah yang membuat produksi tahun 2022 tidak maksimal.

Beberapa solusi untuk meningkatkan kinerja antara lain:

1. Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil pertanian.
2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
3. Penguatan kelembagaan Petani melalui bimbingan dan sosialisasi mengenai penggunaan varietas unggul, pemberian pupuk sesuai rekomendasi, optimalisasi lahan, dan pengendalian hama penyakit.
4. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran.

Program-program pendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ke-7 adalah sebagai berikut:

Tabel 46.

Pohon Program Pendukung Sasaran-7

Sasaran Strategis: Meningkatnya Sektor Pertanian			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PDRB sektor pertanian	Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	

		Program Penyuluhan Pertanian	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Untuk mencapai target PDRB sektor pertanian tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pertanian berupaya mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan:

- Pengembangan Prasarana Pertanian.
- Pembangunan Prasarana Pertanian.
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.
- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten.
- Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah.
- Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan.
- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Selain dari Dinas Pertanian, untuk meningkatkan produksi pertanian, Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara bersinergi dengan melaksanakan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah untuk menjaga sistem irigasi bekerja dengan optimal.

Untuk mendukung penyediaan dan distribusi, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Selain itu juga mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Target peningkatan produksi untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian belum tercapai secara optimal diantaranya karena pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang belum mampu mengatasi dampak yang ditimbulkan dari faktor alam berupa intensitas hujan yang tinggi sehingga terjadi banjir pada tahun 2022 yang mengganggu produksi. Selain itu terjadi serangan hama yang belum diprediksi dengan baik sebelumnya.

Solusi yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang dari sisi program adalah dengan merencanakan penganggaran yang lebih cermat pada kegiatan penanggulangan bencana pertanian untuk mengantisipasi faktor alam dan serangan hama yang mungkin terjadi pada tahun berikutnya.

3.2.8 Sasaran Delapan, Meningkatnya Sektor Perikanan

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-8 adalah sebagai berikut:

Tabel 47.

Capaian kinerja sasaran ke-8 tahun 2022

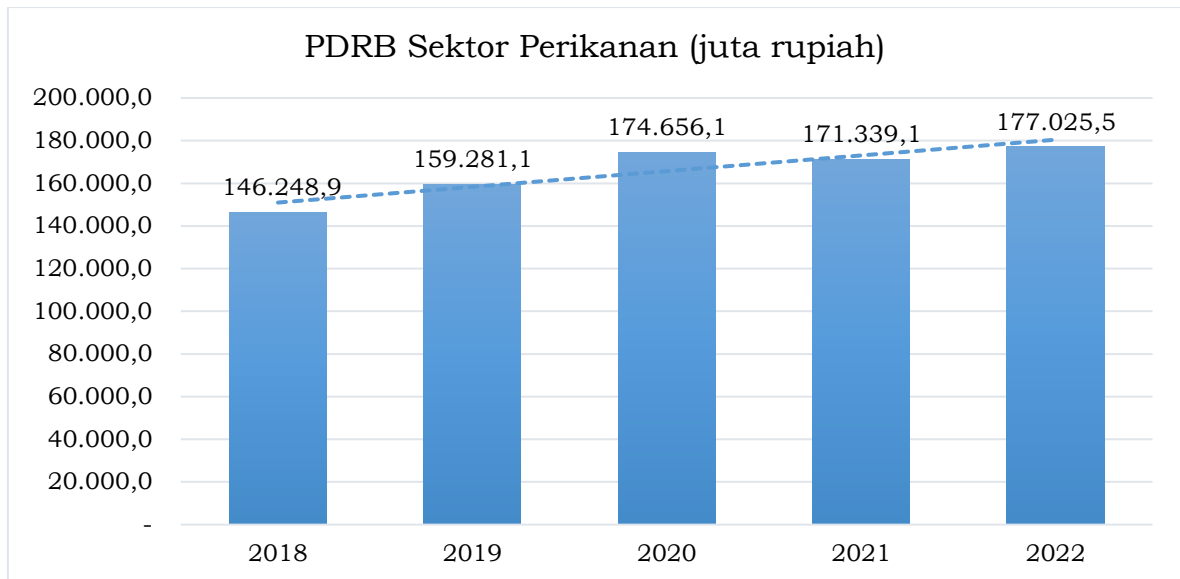
Sasaran: Meningkatnya Sektor Perikanan				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
PDRB sektor perikanan	juta rupiah	180.593,6	177.025,5	98,02

a. Analisis Indikator

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Data Realisasi PDRB Sektor Perikanan menggunakan data rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara.

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Sektor Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 ditargetkan sebesar 180.593,6 juta rupiah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara untuk realisasi PDRB Sektor Perikanan tahun 2022 sebesar 177.025,5 juta rupiah sehingga capaian kinerja sebesar 98,02% atau dalam kategori Baik.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, PDRB sektor perikanan Kabupaten Barito Utara cenderung mengalami peningkatan. Data BPS menunjukkan dalam periode 2018-2022 terjadi peningkatan sebesar 30.776,6 juta rupiah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 7. Perbandingan Realisasi PDRB Sektor Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022

Realisasi PDRB Sektor Perikanan untuk tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Terjadi peningkatan sebesar 5.686,4 juta rupiah. Pencapaian target tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya dimana terdapat selisih capaian sebesar 0,55%.

Tabel 48.

Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB sektor perikanan tahun 2018-2022

PDRB sektor perikanan	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	Juta rupiah	144.040,5	156.533,2	165.273,2	174.743,4	180.593,6
Realisasi	Juta rupiah	146.248,9	159.281,1	174.656,1	171.339,1	177.025,5
Capaian	%	101,53	101,76	105,68	98,57	98,02

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Pencapaian target RPJMD untuk tahun 2022 sebesar 98,02%, belum memenuhi target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target kondisi

akhir RPJMD di tahun 2023 untuk PDRB sektor perikanan yaitu 186.685,8 juta rupiah dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 182.138,4 juta rupiah, maka masih ada selisih sebesar 4.547,42 juta rupiah yang harus dikejar sampai dengan akhir tahun 2023.

Tabel 49.

Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB Sektor Perikanan terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
PDRB Sektor Perikanan	%	146.248,9	180.593,6	177.025,5	98,02	186.685,8	94,83

Dalam rangka mencapai target PDRB Sektor Perikanan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melakukan upaya dalam meningkatkan produksi perikanan. Tahun 2022 produksi perikanan Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan sebesar 1.754,44 ton dibandingkan produksi tahun 2021.

Tabel 50.

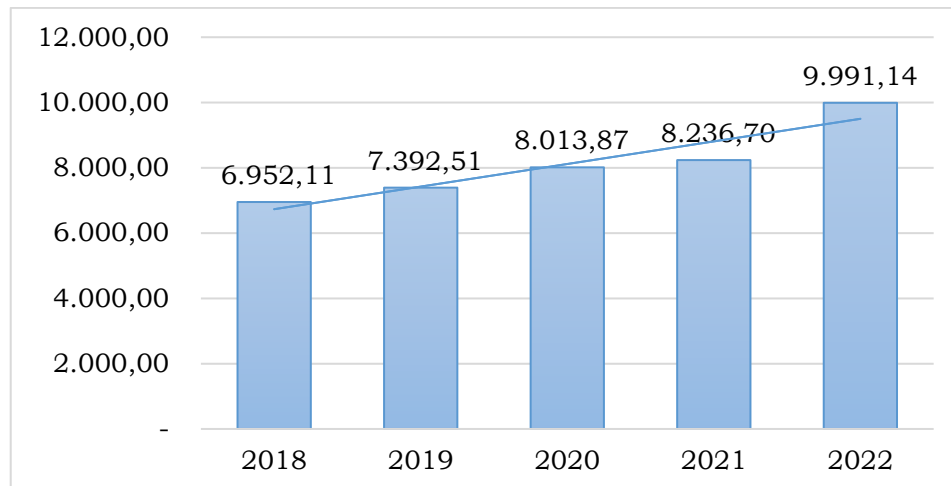
Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2019-2022

No	Produksi Perikanan	Jumlah produksi (ton) tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Perikanan Budidaya	6.298,51	6.921,47	7.751,93	8.868,04
2	Perikanan Tangkap	1.094,80	1.092,40	484,77	1.123,1
Jumlah		7.392,51	8.013,87	8.236,70	9.991,14

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2023

Produksi perikanan tangkap perairan di wilayah Kabupaten Barito Utara relatif stagnan (sulit ditingkatkan lagi) bahkan tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya pencemaran perairan, iklim, dan *illegal fishing* yang menggunakan alat atau bahan berbahaya.

Tetapi pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan setelah terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2021. Sebaliknya untuk perikanan budidaya lebih mudah untuk ditingkatkan produksinya. Data tahun 2018-2022 menunjukkan adanya peningkatan produksi perikanan terutama yang dipacu oleh peningkatan produksi ikan budidaya.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Barito Utara, 2023

Gambar 8. Grafik Produksi Perikanan Tahun 2018-2022

Pada tahun 2022 realisasi capaian mengalami sedikit penurunan dari target 10.559,51 dengan realisasi sebesar 9.991,14 ton (94,62%), namun realisasi produksi perikanan tahun 2022 lebih meningkat dari realisasi tahun 2021 yaitu 8.236,7 ton.

Faktor penghambat pencapaian target kinerja PDRB Sektor Perikanan sehingga belum tercapai antara lain:

- 1) Belum tercapainya target produksi perikanan budidaya disebabkan karena terjadinya penurunan kualitas air, hama dan penyakit serta iklim yang ekstrim menyebabkan banjir dan meluapnya air kolam budidaya.
- 2) Masih rendahnya produksi perikanan tangkap yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya disebabkan adanya pencemaran perairan sungai dan *illegal fishing* menggunakan alat ataupun bahan berbahaya.

Beberapa langkah solusi untuk meningkatkan kinerja antara lain:

- 1) Memberikan bantuan benih ikan untuk peningkatan produksi.

- 2) Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat (nelayan dan pembudidaya ikan).
- 3) Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok nelayan.
- 4) Mengembangkan produk olahan perikanan.
- 5) Meningkatkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran.

Program-program pendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ke-8 adalah sebagai berikut:

Tabel 51.

Pohon Program Pendukung Sasaran-8

Sasaran Strategis: Meningkatnya Sektor Perikanan			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PDRB sektor perikanan	Program peningkatan produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	

Untuk mencapai target kinerja tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah, Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil serta kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan.

Belum tercapainya peningkatan produksi perikanan dalam rangka peningkatan PDRB sektor perikanan diantaranya disebabkan karena:

- 1) Belum optimalnya program Pengelolaan Perikanan Budidaya terutama pada kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya yang belum berjalan optimal karena kurangnya anggaran sehingga belum mampu mengatasi penurunan kualitas air, hama dan penyakit serta iklim yang ekstrim menyebabkan banjir dan meluapnya air kolam budidaya yang terjadi di tahun 2022.
- 2) Belum optimalnya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terutama pada kegiatan Pengembangan kapasitas nelayan kecil disebabkan karena minimnya anggaran.

Alternatif Solusi yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang dari sisi program adalah dengan merencanakan penganggaran yang lebih cermat pada Pengelolaan Perikanan Budidaya terutama pada kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya selain itu juga perlu ada peningkatan anggaran pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terutama pada kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.

3.2.9 Sasaran Sembilan, Meningkatnya Sektor Perkebunan

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-9 adalah sebagai berikut:

Tabel 52.
Capaian kinerja sasaran ke-9 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Sektor Perkebunan				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
PDRB sektor perkebunan	juta rupiah	387.784,1	519.022,1	133,84

a. Analisis Indikator

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Sektor Perkebunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 ditargetkan sebesar 387.784,1 juta rupiah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara untuk realisasi PDRB Sektor Perkebunan tahun 2022 sebesar 519.022,1 juta rupiah sehingga capaian kinerja sebesar 133,84% atau dalam kategori Baik Sekali.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, PDRB Sektor Perkebunan Kabupaten Barito Utara cenderung mengalami peningkatan. Data BPS menunjukkan dalam periode 2018-2022 terjadi peningkatan PDRB Sektor Perkebunan sebesar 171.444,66 juta rupiah.

Tabel 53.
Perbandingan Realisasi PDRB Sektor Perkebunan Tahun 2018-2022

PDRB Sektor Perkebunan (juta rupiah)				
2018	2019	2020	2021	2022
347.577,4	361.067,8	436.377,2	514.446,3	519.022,1

Sumber: BPS Kab. Barito Utara, 2023

Realisasi PDRB Sektor Perkebunan untuk tahun 2018 dan 2019 belum mencapai target sedangkan untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 mampu mencapai target yang ditetapkan. Persentase capaian kinerja

tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,64%.

Tabel 54.
Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB sektor perkebunan tahun 2018-2022

PDRB sektor perkebunan	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	Juta rupiah	352.767,4	361.324,2	369.472,9	378.721,2	387.784,1
Realisasi	Juta rupiah	347.577,4	361.067,8	436.377,2	514.446,3	519.022,1
Capaian	%	98,53	99,93	118,11	133,20	133,84

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

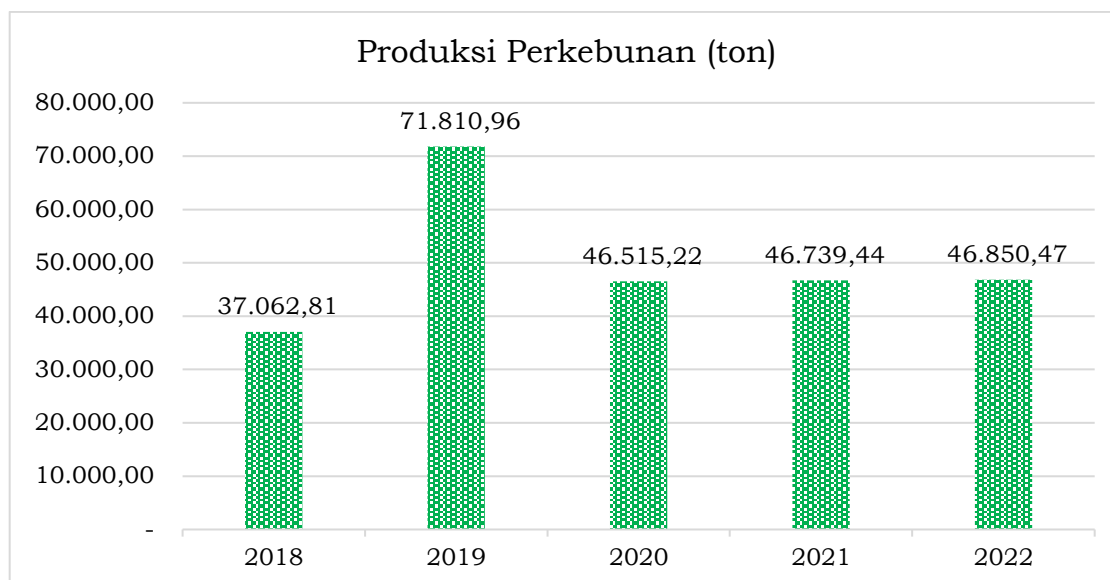
Jika dibandingkan dengan pencapaian RPJMD, pencapaian target untuk tahun 2022 sebesar 133,84%, melebihi target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 untuk PDRB sektor perkebunan yaitu 396.640,2 juta rupiah dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 519.022,1 juta rupiah, maka capaiannya sebesar 130,85%.

Tabel 55.
Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB Sektor Perkebunan terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
PDRB Sektor Perkebunan	%	347.577,4	387.784,1	519.022,1	133,84	396.640,2	130,85

Peningkatan PDRB Perkebunan diupayakan dengan memacu produksi tanaman perkebunan terutama untuk komoditas perkebunan unggulan seperti sawit, karet dan kakao. Tahun 2020 produksi tanaman perkebunan sebesar 46.515,22 ton menurun dari produksi tahun 2019 sebesar 71.810,96 ton. Produksi sawit menurun drastis disebabkan

sebagian besar perkebunan sawit yang ada berisi tanaman tua dan sedang dalam masa peremajaan. Produksi tanaman perkebunan meningkat Kembali pada tahun 2021 menjadi 46.739,44ton dan di tahun 2022 menjadi 46.850,47 ton. Peningkatan terjadi pada komoditas karet, sawit dan kakao.



Sumber: Dinas Pertanian Kab. Barito Utara, 2023

Gambar 9. Grafik Produksi Perkebunan Tahun 2018-2022

Faktor pendorong pencapaian target kinerja PDRB Sektor Perkebunan antara lain:

- 1) Produksi perkebunan meningkat dan mampu mencapai target yang ditetapkan.
- 2) Adanya perbaikan harga beberapa komoditas perkebunan unggulan seperti karet dan kakao.
- 3) Gencarnya sosialisasi dan bimbingan teknis budidaya, pemberian bibit unggul, pemberian pupuk sesuai rekomendasi, cara perawatan dan pemeliharaan tanaman perkebunan, cara panen/penyadapan yang baik dan benar, serta pengendalian hama dan penyakit.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program-program pendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ke-9 adalah sebagai berikut:

Tabel 56.
Pohon Program Pendukung Sasaran-9

Sasaran Strategis: Meningkatnya Sektor Perkebunan			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PDRB sektor perkebunan	Program peningkatan produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil perkebunan	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian	

Untuk mencapai target PDRB sektor Perkebunan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pertanian berupaya meningkatkan produksi perkebunan melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan:

- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian.
- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

3.2.10 Sasaran Sepuluh, Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM, Perdagangan serta Industri

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-10 adalah sebagai berikut:

Tabel 57.
Capaian kinerja sasaran ke-10 tahun 2022

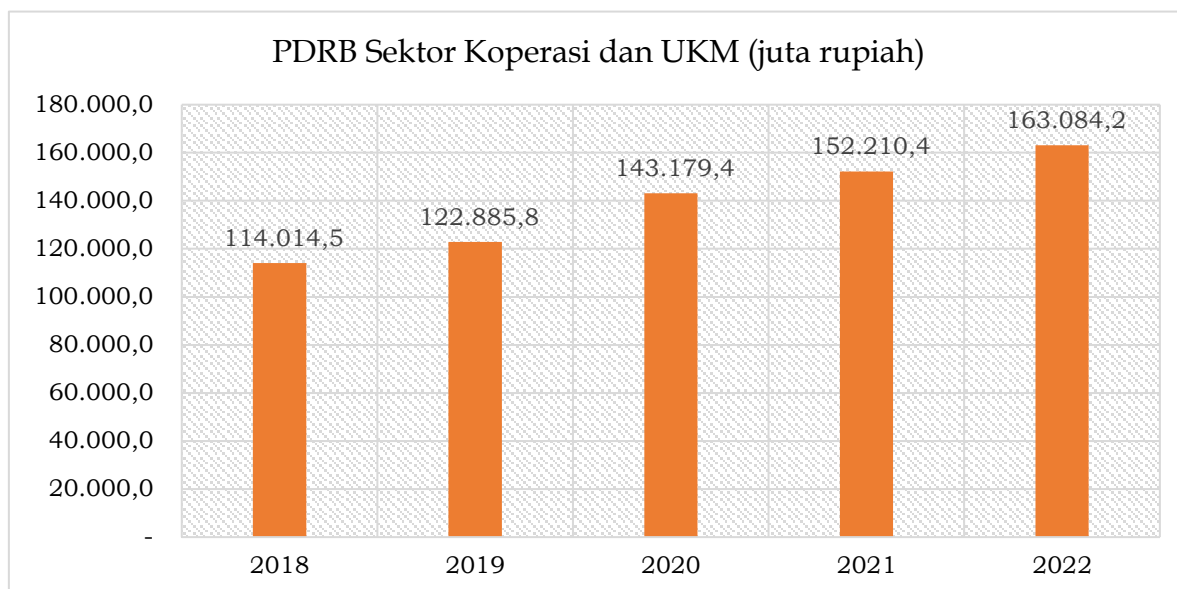
Sasaran: Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM, Perdagangan serta Industri					
No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	juta rupiah	149.466,1	163.084,2	109,11
2.	PDRB sektor perdagangan	juta rupiah	714.179,3	797.189,4	111,62
3.	PDRB sektor industri	juta rupiah	933.619,3	1.079.245,6	115,60
Rata-rata					112,11

a. Analisis Indikator 1, PDRB Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah nilai tambah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada suatu daerah. Sumber data berasal dari BPS Kabupaten Barito Utara yang dalam penentuan target dan realisasi perhitungannya termasuk jasa perantara keuangan.

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 ditargetkan sebesar 149.466,1 juta rupiah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara untuk realisasi PDRB Sektor Koperasi dan UKM tahun 2022 sebesar 163.084,19 juta rupiah sehingga capaian kinerja sebesar 109,11% atau dalam kategori Baik Sekali.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, PDRB sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Utara cenderung mengalami peningkatan. Data BPS menunjukkan dalam periode 2018-2022 terjadi peningkatan sebesar 49.069,7 juta rupiah.



Sumber: BPS Kab. Barito Utara, 2022

Gambar 10. Perbandingan Realisasi PDRB Sektor Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022

Realisasi PDRB Sektor Koperasi dan UKM untuk tahun 2022 meningkat dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Dimana terjadi peningkatan realisasi PDRB sebesar 11.350 juta rupiah.

Tabel 58.

Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB sektor Koperasi dan UKM tahun 2018-2022

PDRB sektor Koperasi dan UKM	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	Juta rupiah	111.920,3	120.314,3	129.337,9	139.038,2	149.466,1
Realisasi	Juta rupiah	114.014,5	122.885,8	142.729,4	151.510,4	163.084,2
Capaian	%	101,87	102,14	110,35	108,97	109,11

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Jika dibandingkan dengan pencapaian RPJMD, pencapaian target untuk tahun 2022 sebesar 109,11%, melebihi target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 untuk PDRB sektor koperasi dan UKM yaitu 160.676,1 juta rupiah dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 163.084,2 juta rupiah, maka capaiannya sebesar 101,50%.

Tabel 59.
Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB Sektor Koperasi dan UKM terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
PDRB Sektor Koperasi dan UKM	%	114.014,5	149.466,1	163.084,2	109,11	160.676,1	101,50

Beberapa faktor pendorong pencapaian sektor koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2022 antara lain:

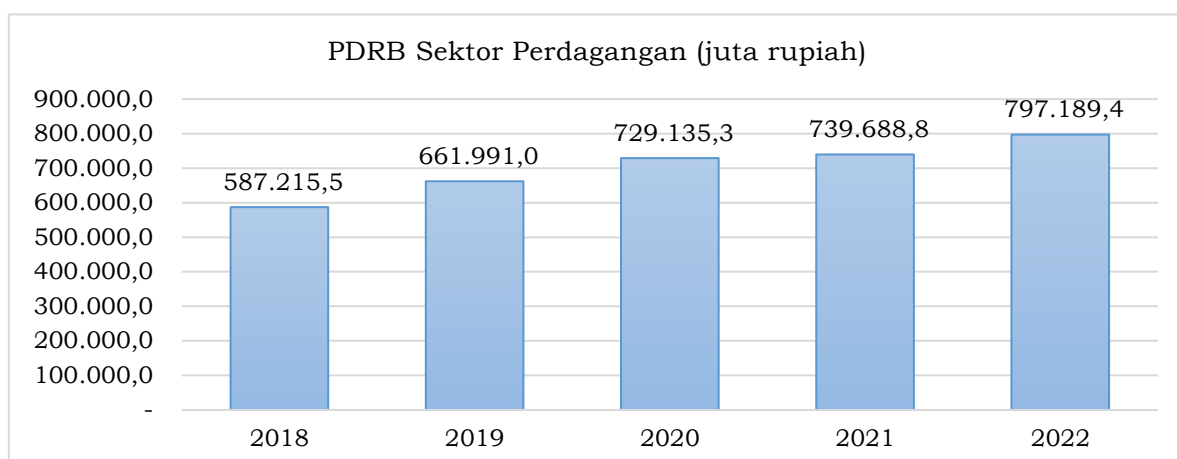
- 1) Semakin meningkatnya koperasi yang aktif dan koperasi yang sehat di Kabupaten Barito Utara.
- 2) Semakin meningkatnya usaha kecil dan menengah yang produktif.
- 3) Adanya pembinaan yang dilakukan secara bertahap terhadap pelaku UKM dengan meningkatkan jumlah usaha mikro kecil, dan jumlah seluruh UKM yang dibina serta memonitoring izin usaha mikro kecil bagi para pelaku UKM.
- 4) Adanya program pengembangan dan pembinaan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah pada kegiatan pengembangan sarana promosi hasil produksi dilakukan dengan mengembangkan usaha para pelaku UKM melalui promosi dengan memanfaatkan media online, sosial media dan lainnya.
- 5) Meningkatnya akses pembiayaan/permodalan bagi UKM.

b. Analisis Indikator 2, PDRB Sektor Perdagangan

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Sektor perdagangan adalah nilai tambah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor perdagangan pada suatu daerah. Sumber data realisasi berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara dengan perhitungan meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 ditargetkan sebesar 714.179,3 juta rupiah. Target tersebut merupakan hasil perubahan pada RPJMD dan lebih tinggi dari target sebelumnya karena berdasarkan hasil evaluasi bahwa target sebelumnya sudah jauh terlampaui sehingga perlu disesuaikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara untuk realisasi PDRB Sektor Perdagangan tahun 2022 sebesar 797.189,4 juta rupiah sehingga capaian kinerja sebesar 111,62% atau dalam kategori Baik Sekali.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, PDRB sektor perdagangan Kabupaten Barito Utara cenderung mengalami peningkatan. Data BPS menunjukkan dalam periode 2018-2022 terjadi peningkatan sebesar 209.973,9 juta rupiah.



Sumber: BPS Kab. Barito Utara, 2023

Gambar 11. Perbandingan Realisasi PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022

Realisasi PDRB Sektor Perdagangan untuk tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Persentase capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,84%.

Tabel 60.

Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB sektor perdagangan tahun 2018-2022

PDRB sektor perdagangan	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	Juta rupiah	508.735,0	509.701,6	510.873,9	712.753,8	714.179,3
Realisasi	Juta rupiah	587.215,5	661.991,0	729.135,3	739.688,8	797.189,4
Capaian	%	115,43	129,88	142,72	103,78	111,62

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Jika dibandingkan dengan pencapaian RPJMD, pencapaian target untuk tahun 2022 sebesar 111,62%, telah melebihi target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 untuk PDRB sektor perdagangan yaitu 715.607,7 juta rupiah dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 797.189,4 juta rupiah, maka realisasinya sebesar 111,40%.

Tabel 61.

Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB Sektor Perdagangan terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
PDRB Sektor Perdagangan	%	587.215,5	714.179,3	797.189,4	111,62	715.607,7	111,40

Beberapa faktor pendorong pencapaian sektor perdagangan di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2022 antara lain:

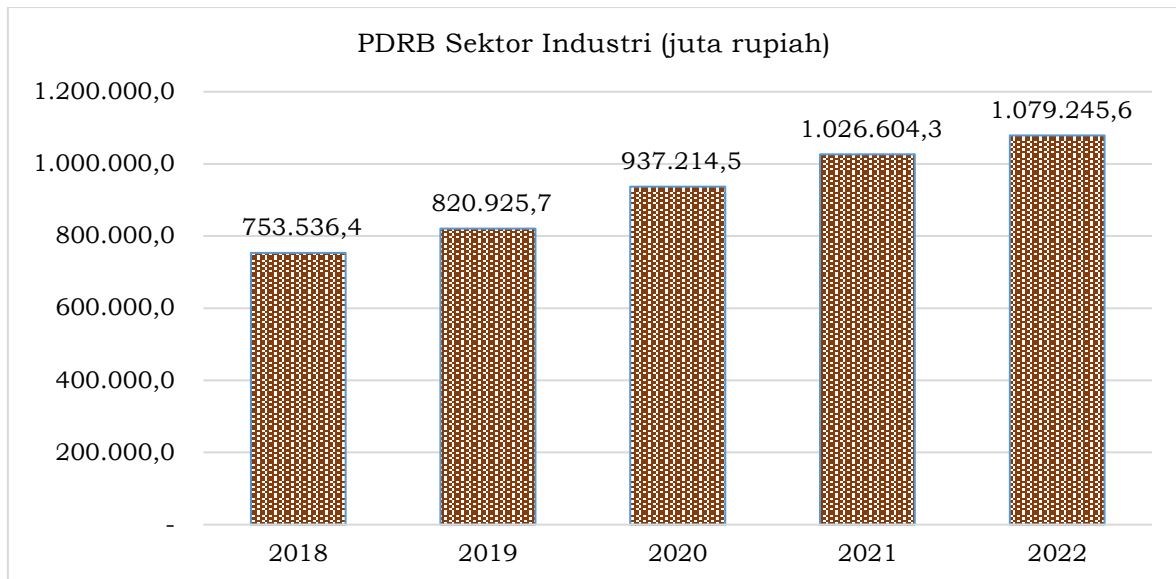
- 1) Lancarnya distribusi barang dan jasa melalui peningkatan sarana distribusi perdagangan.
- 2) Stabilnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- 3) Adanya penguatan institusi pasar yang dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan dan renovasi pasar.
- 4) Semakin meningkatnya aktivitas usaha masyarakat seiring membaiknya kondisi pandemi Covid-19 selama tahun 2022.

c. Analisis Indikator 3, PDRB Sektor Industri

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Sektor Industri adalah nilai tambah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor industri pada suatu daerah. Sumber data realisasi berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara yang memperhitungkan industri pengolahan.

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Sektor Industri Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 ditargetkan sebesar 933.619,3 juta rupiah. Target tersebut merupakan hasil perubahan pada RPJMD dan lebih tinggi dari target sebelumnya karena berdasarkan hasil evaluasi bahwa target sebelumnya sudah jauh terlampaui sehingga perlu disesuaikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara untuk realisasi PDRB Sektor Industri tahun 2022 sebesar 1.079.245,61 juta rupiah sehingga capaian kinerja sebesar 115,60% atau dalam kategori Baik Sekali.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, PDRB sektor industri Kabupaten Barito Utara cenderung mengalami peningkatan. Data BPS menunjukkan dalam periode 2018-2022 terjadi peningkatan sebesar 325.709,2 juta rupiah.



Sumber: BPS Kab. Barito Utara, 2023

Gambar 12. Perbandingan Realisasi PDRB Sektor Industri Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022

Realisasi PDRB Sektor Industri untuk tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,40%. Persentase capaian kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 27,22%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan angka target yang jauh lebih tinggi dari angka sebelumnya menyesuaikan dengan perubahan RPJMD.

Tabel 62.
Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB sektor industri tahun 2018-2022

PDRB sektor industri	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	Juta rupiah	678.892,3	680.182,2	681.746,6	931.755,8	933.619,3
Realisasi	Juta rupiah	753.536,4	820.925,7	936.773,0	1.026.694,3	1.079.245,6
Capaian	%	110,99	120,69	137,41	110,19	115,60

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Jika dibandingkan dengan pencapaian RPJMD, pencapaian target untuk tahun 2022 sebesar 115,60%, telah melebihi target yang ditetapkan.

Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 untuk PDRB sektor industri yaitu 935.486,5 juta rupiah dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 1.079.245,6 juta rupiah, maka realisasinya sebesar 115,37%.

Tabel 63.
Perbandingan Capaian kinerja indikator PDRB Sektor Industri terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
PDRB Sektor Industri	%	753.536,4	933.619,3	1.079.245,6	115,60	935.486,5	115,37

Beberapa faktor pendorong keberhasilan pencapaian target PDRB Sektor Industri tahun 2022 antara lain:

- 1) Meningkatnya nilai aset dan nilai produksi industri di Kabupaten Barito Utara.
- 2) Meningkatnya jumlah perusahaan industri kecil dibandingkan tahun sebelumnya terutama dari jenis industri kerajinan/*craft industry*.
- 3) Tumbuhnya industri pengolahan pangan di Kabupaten Barito Utara.

d. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program-program pendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ke-10 adalah sebagai berikut:

Tabel 64.
Pohon Program Pendukung Sasaran-10

Sasaran Strategis: Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM, Perdagangan serta Industri			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Program peningkatan kualitas kelembagaan	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	

Sasaran Strategis: Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM, Perdagangan serta Industri			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2. PDRB sektor perdagangan 3. PDRB sektor industri	koperasi, UKM dan peningkatan/pengembangan perdagangan dan industri	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Koperasi dan UKM
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
		Program Pengembangan UMKM	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	

Untuk mencapai target PDRB sektor Koperasi dan UKM tahun 2022, Dinas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Penilaian Kesehatan Koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro serta Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil.

Sedangkan untuk PDRB sektor perdagangan dan industri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar, Pelaksanaan Metrologi Legal dan kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri.

3.2.11 Sasaran Sebelas, Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-11 adalah sebagai berikut:

Tabel 65.

Capaian kinerja sasaran ke-11 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja					
No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka pengangguran terbuka	%	4,19	4,82	84,96
2.	Pendapatan perkapita penduduk	juta rupiah	52,79	89,23	169,03
Rata-rata					127,00

a. Analisis Indikator I, Angka Pengangguran Terbuka

Angka Pengangguran Terbuka (APT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan dan program pemerintah terkait penciptaan lapangan pekerjaan seharusnya bisa menekan angka tingkat pengangguran di Kabupaten Barito Utara. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka menurunkannya tingkat pengangguran yaitu melalui meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, sedangkan kebijakannya yakni dengan pelayanan informasi ketenagakerjaan melalui penyebaran informasi tenaga kerja. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan program kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Perhitungan capaian Angka Pengangguran Terbuka (APT) menggunakan rumus realisasi negatif karena semakin rendah APT maka semakin baik. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara tahun 2022 APT sebesar 4,82% sehingga capaian kinerja tahun 2022 sebesar 84,96%. Realisasi APT ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 5,14%. Terjadi peningkatan angka pengangguran terbuka yang cukup besar dari 3,92% di tahun 2019

menjadi 5,29% di tahun 2020 disebabkan karena faktor pandemi Covid-19. Oleh sebab itu pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian angka target APT menyesuaikan angka yang ditargetkan pada kondisi awal RPJMD.

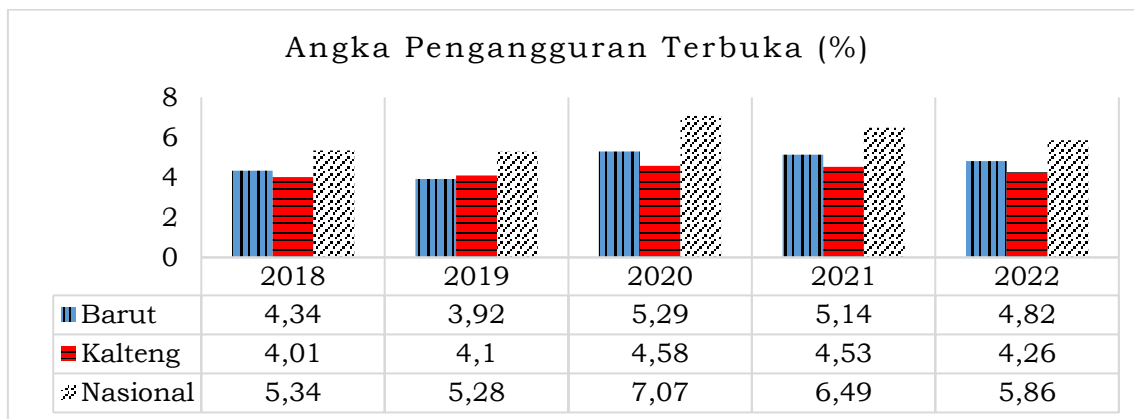
Tabel 66.

Perbandingan capaian kinerja indikator Angka Pengangguran Terbuka tahun 2018-2022

Angka Pengangguran Terbuka	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	%	4,60	4,31	3,99	4,66	4,19
Realisasi	%	4,34	3,92	5,29	5,14	4,82
Capaian	%	105,65	109,05	67,42	89,70	84,96

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2021 disebabkan karena faktor menurunnya penyebaran Covid-19 di Kabupaten Barito Utara sehingga sektor usaha bisa membaik dan aktivitas masyarakat sudah mulai kembali normal. Jika dibandingkan dengan APT Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional maka APT Kabupaten Barito Utara tahun 2022 lebih tinggi dari APT Provinsi Kalimantan Tengah tetapi masih berada di bawah APT nasional.



Gambar 13. Grafik Perbandingan APT Kabupaten Barito Utara dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Jika dibandingkan dengan pencapaian RPJMD, pencapaian target untuk tahun 2022 sebesar 84,96%, belum memenuhi target yang

ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 untuk angka pengangguran terbuka sebesar 3,46% dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 4,82%, maka masih terdapat selisih (*gap*) sebesar 1,36% yang harus diturunkan sampai dengan akhir tahun 2023.

Tabel 67.

Perbandingan capaian kinerja indikator Angka Pengangguran Terbuka terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Angka Pengangguran Terbuka	%	4,34	4,19	4,82	84,96	3,46	60,69

Beberapa faktor penyebab target kinerja tahun 2022 tidak tercapai adalah:

- 1) Laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja yang cenderung meningkat namun pertumbuhan lapangan kerja baru masih belum memadai dengan kondisi tersebut.
- 2) Rendahnya nilai investasi di Kabupaten Barito Utara dimana masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Solusi yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain:

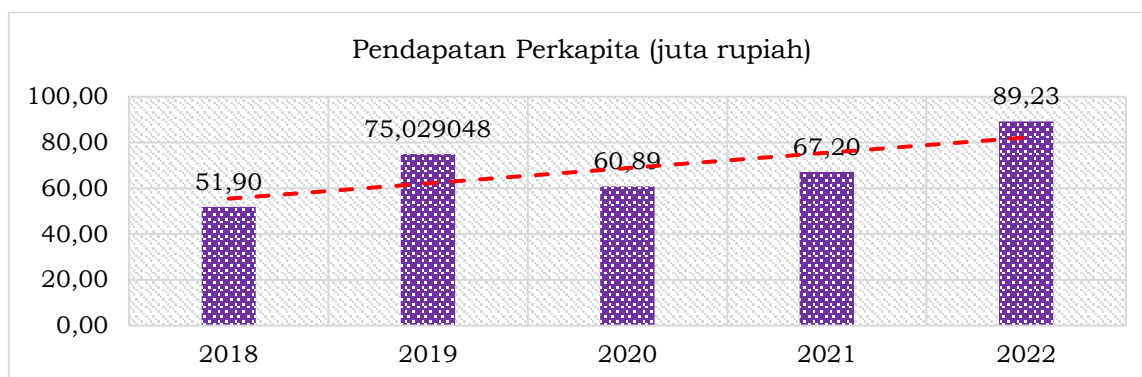
- 1) Meningkatkan Pelayanan informasi ketenagakerjaan melalui penyebaran informasi tenaga kerja.
- 2) Pelaksanaan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- 3) Peningkatan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
- 4) peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi untuk meningkatkan serapan tenaga kerja di Barito Utara melalui promosi, penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi.
- 5) Peningkatan program untuk menciptakan wirausahawan baru.

b. Analisis Indikator 2, Pendapatan Perkapita Penduduk

Pendapatan perkapita merupakan tolak ukur untuk melihat kesejahteraan dan pembangunan di suatu wilayah. Pendapatan perkapita sering disebut juga sebagai pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita ini juga merefleksikan PDRB perkapita. Data realisasi kinerja bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara yang merupakan perhitungan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku.

Pendapatan perkapita Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 ditargetkan sebesar 52,79 juta rupiah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara untuk realisasi Pendapatan perkapita tahun 2022 sebesar 89,23 juta rupiah sehingga capaian kinerja sebesar 169,03% atau dalam kategori Baik Sekali.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, Pendapatan Perkapita Kabupaten Barito Utara cenderung mengalami peningkatan. Data BPS menunjukkan dalam periode 2018-2022 terjadi peningkatan sebesar 20,55 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2020 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 14,32 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena faktor pandemi Covid-19 yang melemahkan sektor perekonomian. Tahun 2021 dan 2022 kondisi PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku kembali mengalami peningkatan seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19.



Sumber: BPS Kab. Barito Utara, 2023

Gambar 14. Perbandingan Realisasi Pendapatan Perkapita Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022

Persentase capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, dimana terjadi peningkatan realisasi pendapatan perkapita sebesar 5,17 juta rupiah.

Tabel 68.

Perbandingan capaian kinerja indikator pendapatan perkapita tahun 2018-2022

Pendapatan Perkapita	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	%	47,30	48,67	50,05	51,42	52,79
Realisasi	%	51,90	74,98	60,66	67,28	89,23
Capaian	%	109,73	154,06	121,20	130,84	169,03

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Jika dibandingkan dengan pencapaian RPJMD, pencapaian target untuk tahun 2022 sebesar 169,03%, telah melebihi target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 untuk pendapatan perkapita sebesar 54,17 juta rupiah dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 89,23 juta rupiah, maka sudah jauh melebihi target yang ditetapkan sehingga perlu penyesuaian angka target pada perencanaan selanjutnya.

Tabel 69.

Perbandingan capaian kinerja indikator Pendapatan Perkapita terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Pendapatan Perkapita	%	51,90	52,79	89,23	169,03	54,17	164,72

Beberapa faktor pendorong keberhasilan pencapaian target pendapatan perkapita tahun 2022 antara lain:

- 1) Kegiatan usaha masyarakat yang perlahan kembali berjalan seiring membaiknya kondisi penyebaran Covid-19.
- 2) Aktivitas perusahaan perlahan kembali berjalan sehingga pekerja yang sebelumnya dirumahkan bisa aktif kembali.
- 3) Pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan turut menciptakan lapangan pekerjaan di desa sehingga meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pedesaan.

c. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program-program pendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ke-11 adalah sebagai berikut:

Tabel 70.

Pohon Program Pendukung Sasaran-11

Sasaran Strategis: Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1. Angka pengangguran terbuka 2. Pendapatan Perkapita Penduduk	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	

Untuk mencapai target kinerja tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berupaya meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui Dinas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi. Selain itu untuk mempercepat pemerataan penduduk, pengembangan daerah dan memperluas kesempatan kerja, dilaksanakan kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi dan kegiatan penyuluhan transmigrasi.

Selain itu untuk meningkatkan iklim investasi dan realisasi Investasi di Kabupaten Barito Utara, melalui Dinas PMPTSP dilaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah, serta kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah.

Belum tercapainya target Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2022 diantaranya disebabkan karena masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Barito Utara yang belum sesuai target sehingga cukup berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja di Barito Utara. Dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan hal ini disebabkan karena anggaran di tahun 2022 untuk kegiatan promosi dan kerja sama sebagai upaya menarik minat calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Barito Utara masih belum tersedia, sehingga pelaksanaan promosi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Alternatif Solusi yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang dari sisi program adalah dengan merencanakan penganggaran pada Program Promosi Penanaman Modal sehingga kegiatan promosi di tahun mendatang bisa berjalan lebih baik. Selain itu dengan mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang selama ini sudah berjalan.

3.2.12 Sasaran Dua Belas, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-12 adalah sebagai berikut:

Tabel 71.
Capaian kinerja sasaran ke-12 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					
No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai	73,54	76,89	104,56

a. Analisis Indikator

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, IKLH pada tingkat Kabupaten dibentuk dari perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Tahun 2022, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara ditargetkan 73,54. Target tersebut merupakan hasil penyesuaian pada perubahan RPJMD karena berdasarkan hasil evaluasi, angka yang target ditetapkan sebelumnya terlalu tinggi dan sulit untuk direalisasikan. Realisasi IKLH tahun 2022 dengan nilai indeks 76,89 sehingga persentase capaian kinerja untuk tahun 2022 sebesar 104,56% atau dalam kategori baik sekali. Nilai realisasi indeks diperoleh dari komponen kualitas air, udara dan tutupan lahan.

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2022 merupakan hasil perhitungan dari pengujian kualitas air untuk 3 (tiga) sungai prioritas yang ada di wilayah kabupaten Barito Utara yaitu sungai Lahei, Teweh dan

Montallat. Pengujian ini dilakukan dalam 2 (dua) kali periode pemantauan tiap semester oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2022 diperoleh dari hasil perhitungan pengujian *passive sampler* yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). *Passive Sampler* dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun di 3 (tiga) titik sampling yang mewakili tiap sektor kegiatan di wilayah Kabupaten Barito Utara.

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) diperoleh dari data perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Tabel 72.
Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Uraian	Nilai Indeks	kategori
Indeks Kualitas Air (IKA)	58,10	Sedang
Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,33	Baik
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	82,46	Baik
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	76,89	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Utara, 2023

Berdasarkan tiga indikator lingkungan di atas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Barito Utara tahun 2022 sebesar 76,89 yang berarti dalam kategori Baik. Klasifikasi penjelasan kualitatif dari angka IKLH adalah sebagai berikut:

- Sangat Baik : $90 \leq \text{IKLH} \leq 100$
- Baik : $70 \leq \text{IKLH} < 90$
- Sedang : $50 \leq \text{IKLH} < 70$
- Kurang : $25 \leq \text{IKLH} < 50$
- Sangat Kurang Baik : $0 \leq \text{IKLH} < 25$

Realisasi IKLH tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Hal ini disebabkan karena peningkatan pada IKA, IKU dan IKTL.

Tabel 73.
Perbandingan capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup tahun 2018-2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	%	86,87	86,88	86,89	73,50	73,54
Realisasi	%	86,87	79,70	85,69	75,68	76,89
Capaian	%	100	91,74	98,62	102,97	104,56

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Jika dibandingkan dengan RPJMD, pencapaian target untuk tahun 2022 sebesar 104,56%, memenuhi target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 untuk IKLH sebesar 73,59 dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 76,89 maka realisasinya sebesar 102,85% .

Tabel 74.
Perbandingan capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	86,87	73,54	76,89	104,56	73,59	104,48

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan dan mampu mencapai target yang ditetapkan. Adapun faktor pendukungnya antara lain:

- 1) Program dan kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran Air dapat berjalan efektif untuk menurunkan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air, adapun pengambilan sampel air pada segmen sungai (Hulu/Tengah/Hilir) akan tetap terlaksana selama

tahun 2022. Untuk Pengambilan sampel air dilakukan pada 3 Sungai seperti Sungai Lahei, Sungai Teweh dan Sungai Montalat. Untuk pengambilan sampel air dilakukan setiap masing-masing sungai diambil sampel bagian hulu, Bagian Tengah, dan Bagian hilir.

- 2) Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi ketentuan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tetap terlaksana dengan baik.
- 3) Aktivitas pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan B3 bertambah selama tahun 2022, akan tetapi para Pelaku Usaha dan/atau kegiatan tetap taat dalam menangani limbah sesuai dengan aturan perizinan yang diberikan.
- 4) Menurunnya atau berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan turunnya kualitas udara.
- 5) Program dan kegiatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sudah berjalan maksimal karena ada beberapa kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dalam Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.
- 6) Pelaksanaan program dan kegiatan penanaman lahan yang terdegradasi (rusak).

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program-program pendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ke-12 adalah sebagai berikut:

Tabel 75.
Pohon Program Pendukung Sasaran-12

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta pengendalian	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
		Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pencemaran/ perusakan lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
		Program Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Persampahan	
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	

Dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan:

- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
- Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah
- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Pengelolaan Sampah

Selain itu didukung dengan kegiatan dari Dinas PUPR antara lain:

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3.2.13 Sasaran Tiga Belas, Meningkatnya Daya Saing Pariwisata

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-13 adalah sebagai berikut:

Tabel 76.
Capaian kinerja sasaran ke-13 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase kunjungan wisata	%	95,70	108,92	113,81

a. Analisis Indikator

Pada tahun 2022 persentase kunjungan wisata di Kabupaten Barito Utara ditargetkan sebesar 95,70% atau 95.700 dari 100.000 kunjungan. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara tahun 2022 realisasi untuk kunjungan wisata sebanyak 108.915 dari total 100.000 kunjungan yang ditargetkan atau dengan persentase 108,92% sehingga capaian kinerja untuk tahun 2022 sebesar 113,81% atau dalam kategori baik sekali.

Dalam periode tahun 2018-2022, capaian kinerja untuk persentase kunjungan wisata sempat menunjukkan penurunan pada tahun 2020 disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata. Kinerja kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022 dimana terjadi peningkatan capaian sebesar 48,33%.

Tabel 77.
Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase kunjungan wisata tahun 2018-2022

Persentase kunjungan wisata	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	%	83,2	83,2	87,3	91,50	95,7
Realisasi	%	64,71	81,46	60,59	106,28	108,92
Capaian	%	77,78	97,91	69,40	116,15	113,81

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Barito Utara tahun 2022 dihitung berdasarkan jumlah karcis masuk yang terjual di 3 objek wisata unggulan sebanyak 46.588 dan kunjungan wisatawan melalui pendataan tingkat hunian hotel (Wisatawan MICE) sebanyak 62.327 kunjungan. Hasil rekapitulasi jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 78.
Rekapitulasi Data Wisatawan Tahun 2018-2022

Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
	44.003	55.396	40.454	72.270	108.915

Sumber: Disbudparpora Kab. Barito Utara, 2023

Objek wisata unggulan di Kabupaten Barito Utara yang menjadi destinasi utama yaitu:

- 1) Objek Wisata Bumi Perkemahan Panglima Batur di Desa Trahean Kecamatan Teweh Selatan
- 2) Objek Wisata Danau Trinsing di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan
- 3) Objek Wisata Air Terjun Jantur Doyam KM 18, Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu di Desa Nihan Hilir Kecamatan Lahei Barat.

Selain dari objek wisata unggulan di atas, wisatawan dalam daerah dan luar daerah serta mancanegara juga berkunjung ke destinasi wisata lain meliputi destinasi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya dan tempat wisata lainnya.

Tabel 79.
Objek Wisata di Kabupaten Barito Utara

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
1.	Gunung Pararawen	Desa Lemo, Kecamatan Teweh Tengah	Alam
2.	Gunung Angah	Kecamatan Teweh Tengah	Alam

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
3.	Gunung Lumut	Kecamatan Gunung Purei	Alam
4.	Gunung Bocah	Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur	Alam
5.	Gunung Tanggur	Desa Muara Mea,Kecamatan Gunung Purei	Alam
6.	Danau Butong	Desa Butong, Kecamatan Teweh Selatan	Alam
7.	Danau Besar	Desa Butong, Kecamatan Teweh Selatan	Alam
8.	Danau Dulan	Desa Butong, Kecamatan Teweh Selatan	Alam
9.	Danau Oge	Desa Butong, Kecamatan Teweh Selatan	Alam
10.	Danau Muara	Desa Butong,Kecamatan Teweh Selatan	Alam
11.	Danau Trinsing	Desa Trinsing,Kecamatan Teweh Selatan	Objek Wisata Unggulan Kab.Barito Utara
12.	Air Terjun Jantur Doyam	Desa Nihan, Kecamatan Lahei Barat	Objek Wisata Unggulan Kab.Barito Utara
13.	Air Terjun Inih	Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur	Alam
14.	Air Terjun santuyun	Desa Lue Hulu,Kecamatan Lahei Barat	Alam
15.	Air Terjun Jantur Jalitung	Desa Lemo, Kecamatan Teweh Tengah	Alam
16.	Air Terjun Hongkong Dalut	Desa Karamuan, Kecamatan Lahei Barat	Alam
17.	Air Terjun Bonongkong	Desa Karamuan, Kecamatan Lahei Barat	Alam
18.	Air Terjun Bajantur	Desa Karamuan, Kecamatan Lahei Barat	Alam
19.	Air Terjun Tayun	Desa Karamuan, Kecamatan Lahei Barat	Alam
20.	Air Terjun Mansaro	Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur	Alam
21.	Goa Liang Idai	Desa Bayas, Kecamatan Teweh Tengah	Alam
22.	Goa Lambung	Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur	Alam
23.	Goa Liang Pandan	Desa Bayas, Kecamatan Teweh Tengah	Alam
24.	Goa Liang Longo	Desa Jingah, Kecamatan Teweh Baru	Alam
25.	Goa Liang Angah	Kecamatan Teweh Timur	Alam

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
26..	Goa Tengkorang/Relief	Desa Tongka, Kecamatan Gunung Timang	Alam
27.	Jeram Pemantu	Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Baru	Alam
28.	Jeram Balai Warik	Desa Karengan, Kecamatan Teweh Baru	Alam
29.	Jeram Mansaro	Hulu Sungai Lampanang, Kecamatan Teweh Timur	Alam
30.	Janah Gemutur	Desa Tumpung Laung, Kecamatan Montalat	Alam
31.	Riam Rahaden	Desa Rahaden, Kecamatan Lahei	Alam
32.	Batu Surat Uok	Kecamatan Gunung Purei	Alam
33.	Bumi Perkemahan Panglima Batur	Desa Trahaen, Kecamatan Teweh Selatan	Objek Wisata Unggulan kab.Barito Utara
34.	Taman Rekreasi Remaja	Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah	Buatan
35.	Kerangka Kapal Belanda "Onrust"	Tongtuwur, Kecamatan Teweh Tengah	Sejarah
36.	Tugu Pancasila	Muara teweh, Kecamatan teweh tengah	Sejarah
37.	Situs Batu Benawa	Kecamatan Teweh Selatan	Sejarah
38.	Benteng Belanda	Desa Jambu, Kecamatan Teweh Baru	Sejarah
39.	Situs Pendreh	Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah	Sejarah
40.	Makam Mangkusari	Desa Jambu, Kecamatan Teweh Baru	Sejarah
41.	Makam Singa Nginu	Desa Ketapang, Kecamatan Gunung Timang	Sejarah
42.	Makam Keluarga Panglima Batur	Desa Buntok Baru, Kecamatan Montalat	Sejarah
43.	Makam Panglima Sogo	Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru	Sejarah
44.	Makam Panglima Batu Bolot	Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru	Sejarah
45.	Makam Wali Gandaria	Desa Jambu, Kecamatan Teweh Baru	Sejarah
46.	Makam Sardadu Belanda	Desa Jambu, Kecamatan Teweh Baru	Sejarah
47.	Makam Tumenggung Surapati	Desa Jambu, Kecamatan Teweh Baru	Sejarah
48.	Makam Mangkomot	Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur	Sejarah
49.	Dam Trinsing	Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan	Buatan

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
50	Dam Trahean	Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan	Buatan
51.	Pemancingan dan Rumah Makan	Desa Trahean, Kecamatan teweh Selatan	Alam
52.	Taman Hutan Pinus	Desa Wonorejo, Kecamatan Teweh Tengah	Alam
53.	Taman Lampion	Jl. Wirapraja, Muara Teweh	Buatan
54.	Water Front City	Jl.Panglima Batur Muara Teweh	Buatan
55.	Taman Stadion Olah Raga Swakarya	Jl. Pramuka Muara Teweh	Buatan
56.	Water Boom	Jl. Taman Rekreasi Remaja, Muara Teweh	Buatan
57.	Rumah Betang Stadion	Jl.Pramuka, Muara Teweh	Cagar Budaya

Pencapaian target pada RPJMD untuk tahun 2022 sebesar 113,81%, telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 untuk persentase kunjungan wisata sebesar 99,9%, maka sudah melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 80.

Perbandingan capaian kinerja indikator persentase kunjungan wisata terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase Kunjungan Wisata	%	64,71	95,7	108,92	113,81	99,9	109,03

Adapun faktor pendorong peningkatan kinerja dan pencapaian target tahun 2022 antara lain:

- 1) Kondisi penyebaran Covid-19 yang menurun di tahun 2022 sehingga memungkinkan dilakukan pembukaan kembali objek wisata dengan penerapan protokol kesehatan.

- 2) Meningkatnya promosi wisata yang masif dan efektif melalui media sosial.
- 3) Pelaksanaan pagelaran seni budaya dan atraksi budaya virtual dengan latar belakang objek wisata unggulan.
- 4) Meningkatnya akses menuju objek wisata dengan pembukaan dan perbaikan akses jalan.
- 5) Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pada objek wisata.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program penunjang pencapaian indikator kinerja pada sasaran 13 tersaji pada pohon program sebagai berikut:

Tabel 81.
Pohon Program Pendukung Sasaran-13

Sasaran Strategis: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Persentase kunjungan wisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora)
		Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Program Pengembangan Kebudayaan	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
		Program Pengelolaan Permuseuman	

Untuk mencapai target kinerja tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Disbudparpora mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata; Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya; Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata; Pengelolaan Kebudayaan dan Kesenian

yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah; dan Pelestarian Kesenian Tradisional melalui pagelaran kesenian virtual.

Untuk meningkatkan daya Tarik objek wisata dilakukan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pada objek wisata pada tahun 2022 antara lain:

- Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Pembenahan taman di Objek Wisata DAM Trinsing
- Pembuatan titian dan spot foto Objek Wisata DAM Trinsing
- Pembenahan pemandian dan wahana air Objek Wisata Dam Trinsing
- Pembuatan wahana rumah pohon di Objek Wisata Air Jantur Doyam
- Pembangunan Jembatan Objek Wisata Air Terjun Jantur Doyam
- Pembangunan Play Ground Kolam Renang Anak Objek Wisata Air Terjun Jantur Doyam
- Pembuatan Portal di Objek Wisata, Pembuatan Papan Nama Objek Wisata
- Pengawasan Pembuatan Spot Foto di Objek Wisata Unggulan, Pembangunan Pagar Tebing Objek Wisata Air Terjun Jantur Doyam, Penataan Aliran Sungai Objek Wisata Air Terjun Jantur Doyam,
- Pembuatan Portal di Objek Wisata, Pembuatan Papan Nama Objek Wisata

3.2.14 Sasaran Empat Belas, Meningkatnya Ketertiban Masyarakat

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-14 adalah sebagai berikut:

Tabel 82.
Capaian kinerja sasaran ke-14 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Ketertiban Masyarakat				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,50	100	114,29

a. Analisis Indikator

Tahun 2022 ditargetkan tingkat penyelesaian pelanggaran kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) sebesar 87,5%. Berdasarkan data dari Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2022 seluruh pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan dapat diselesaikan, sehingga realisasi tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 114,29% dengan kategori baik sekali.

Tabel 83.
Perbandingan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP	16	20	16	8	8
Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan	14	17	14	9	8
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	87,5%	85%	87,5%	88,89%	100%

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab. Barito Utara, 2023

Bila dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah kasus pelanggaran K3 dari 16 kasus menjadi 20 kasus di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 jumlah kasus menurun lagi menjadi 16 kasus

pelanggaran dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 9 kasus. Tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kasus menjadi 10 tetapi semuanya dapat diselesaikan. Persentase capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 84.
Perbandingan capaian kinerja indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 tahun 2018-2022

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	%	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
Realisasi	%	87,50	85,00	87,50	88,89	100
Capaian	%	100	97,14	100	101,59	114,29

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Pencapaian target pada RPJMD untuk tahun 2022 adalah 114,29%, memenuhi target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 sebesar 93,75% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100% maka capaian kinerjanya sebesar 106,67%.

Tabel 85.
Perbandingan capaian kinerja indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	87,50	87,5	100	114,29	93,75	106,67

Faktor pendorong tercapainya kinerja tahun 2022 adalah:

- 1) Operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terlaksana dengan baik.
- 2) Penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berjalan dengan baik.

- 3) Patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh daerah.
- 4) Sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah kepada seluruh masyarakat di daerah berjalan dengan efektif.
- 5) Penegakan atas pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Analisis program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada sasaran 14 tersaji pada pohon program sebagai berikut:

Tabel 86.
Pohon Program Pendukung Sasaran-14

Sasaran Strategis: Meningkatnya Ketertiban Masyarakat			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%)	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Program Penanggulangan Bencana	BPBD

Untuk mencapai target kinerja tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penindakan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.

3.2.15 Sasaran Lima Belas, Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-15 adalah sebagai berikut:

Tabel 87.
Capaian kinerja sasaran ke-15 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	%	80	100	125

a. Analisis Indikator

Konflik sosial adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Sedangkan penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup kegiatan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

Jumlah konflik sosial yang terjadi selama tahun 2022 berdasarkan data dari Kepolisian Resort Barito Utara sebanyak 22 kasus. Konflik sosial yang terjadi antara lain: konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan, konflik tata batas, sosial budaya, dan konflik hukum. Kasus tersebut segera ditangani dengan cara dilakukan mediasi kepada kedua belah pihak dalam hal ini oleh Kepolisian Resort Barito Utara dan Pemerintah Daerah beserta Dinas/Badan/Instansi terkait. Kasus yang tertangani dan selesai sepanjang 2022 sebanyak 22 kasus sehingga realisasi kinerja sebesar 100% atau dengan capaian kinerja 125% dalam kategori baik sekali.

Jika dibandingkan antara capaian pada tahun 2020 dan 2019 maka persentase capaian kinerja tahun 2021 mengalami sedikit penurunan. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah kasus konflik sosial yang terjadi pada tahun 2021 dan belum semuanya bisa diselesaikan. Namun demikian kinerja penyelesaian kasus konflik sosial Kembali meningkat di tahun 2022.

Tabel 88.
Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Penyelesaian Konflik Sosial tahun 2018-2022

Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	%	80	80	80	80	80
Realisasi	%	80	100	100	89,47	100
Capaian	%	100	125	125	111,84	125

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Pencapaian target pada RPJMD untuk tahun 2022 sebesar 125%. Hal ini menunjukkan sudah adanya upaya yang optimal dan efektif yang dilakukan semua elemen pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito Utara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kinerja penanganan kasus konflik ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang terutama diarahkan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

Tabel 89.
Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Penyelesaian Konflik Sosial terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	%	80	80	100	125	80	125

Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja tahun 2022 antara lain:

- 1) Peran serta Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Konflik Sosial yang mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di daerah. Dalam rangka mendukung tim kewaspadaan dini telah dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) untuk memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat berbagai kegiatan pemerintah daerah dan laporan tentang kondusivitas wilayah.
- 2) Adanya forum-forum strategis yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, antara lain: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forkopimda dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Keberadaan forum-forum ini berperan penting dalam mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di wilayah Kabupaten Barito Utara.
- 3) Terjalinnnya koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda dalam rangka melakukan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 4) Tersusunnya Rencana Aksi Terpadu penanganan konflik sosial di kabupaten Barito Utara Tahun 2022.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program pendukung pencapaian kinerja sasaran ke-15 tersaji pada pohon program berikut:

Tabel 90.
Pohon Program Pendukung Sasaran-15

Sasaran Strategis: Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	Program Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	
		Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
		Program Penetapan Tanah Ulayat	

Pencapaian target kinerja tahun 2022 dioptimalkan melalui pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa:

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- Pembentukan forum-forum strategis antara lain: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forkopimda dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda dalam rangka melakukan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial

Selain itu untuk penanganan potensi konflik yang timbul akibat sengketa pertanahan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan; Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah; Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah; Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee serta Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten.

3.2.16 Sasaran Enam Belas, Menurunnya Penyandang Masalah Sosial

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-16 adalah sebagai berikut:

Tabel 91.
Capaian kinerja sasaran ke-16 tahun 2022

Sasaran: Menurunnya Penyandang Masalah Sosial				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase PMKS yang Mandiri	%	21,40	24,08	112,52

a. Analisis Indikator

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Tahun 2022 ditargetkan persentase PMKS yang mandiri sebesar 21,40% dan mampu terealisasi sebesar 24,08%. Capaian kinerja untuk tahun 2022 sebesar 112,52% atau dengan predikat baik sekali.

Adapun PMKS Mandiri merupakan penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial yang meningkat kesejahteraannya, mampu memenuhi kebutuhan dasar sehingga sudah memenuhi kriteria mandiri dan tidak memperoleh bantuan lagi. Tahun 2022 jumlah PMKS Mandiri sebanyak 2.300 jiwa, dibagi dengan jumlah total PMKS sebanyak 9.553 jiwa sehingga persentasenya sebesar 24,08%.

Tabel 92.
PMKS Mandiri Tahun 2022

No.	Jenis	Jumlah yang mandiri Tahun 2022
1.	Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	150
2.	Orang dengan kecacatan/penyandang cacat fisik dan mental/ disabilitas	10
3.	Program Keluarga Harapan (PKH)	174
4.	PMKS/ Penyandang Disabilitas Terlantar/ Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar	20
5.	Psikotik (Disabilitas Mental)	50
6.	BPNT	1.896
Jumlah PMKS yang mandiri		2.300
Total PMKS		9.553
Persentase PMKS yang mandiri		24,08%

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Utara, 2023

Persentase capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Fokus yang dilakukan pemerintah bersama Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui upaya penanganan dan pembinaan khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin agar lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri.

Tabel 93.
Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase PMKS yang mandiri tahun 2018-2022

Persentase PMKS yang mandiri	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	%	20,16	20,47	20,78	21,09	21,40
Realisasi	%	2,01	2,20	23,00	24,07	24,08
Capaian	%	9,97	10,75	110,68	114,13	112,52

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Pencapaian target pada RPJMD untuk tahun 2022 sebesar 112,52%, melampaui target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 sebesar 21,73% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 24,08% maka realisasinya sebesar 110,80%.

Tabel 94.
Perbandingan capaian kinerja indikator PMKS yang mandiri terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase PMKS yang mandiri	%	2,01	21,4	24,08	112,51	21,73	110,80

Persentase PMKS yang mandiri mengalami peningkatan dan telah memenuhi target kinerja pada tahun 2022. Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja tahun 2022 antara lain:

- 1) Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, tentang standar teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial.
- 2) Program prioritas daerah berupa program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS yang mampu dijalankan dengan baik melalui sinergi beberapa perangkat daerah.
- 3) Adanya fokus yang dilakukan pemerintah bersama Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui upaya penanganan dan pembinaan khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin agar lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri.
- 4) Adanya dukungan sarana prasarana pelayanan Sosial dan sumber daya manusia penyelenggara pelayanan sosial.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Analisis program pendukung pencapaian kinerja sasaran ke-16 tersaji pada pohon program berikut:

Tabel 95.
Pohon Program Pendukung Sasaran-16

Sasaran Strategis: Menurunnya Penyandang Masalah Sosial			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Persentase PMKS yang Mandiri (%)	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, fakir miskin, KAT dan PMKS	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
		Program Penanganan Bencana	
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		Program Perlindungan Khusus Anak	
		Program Pengendalian Penduduk	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas PRKPP
		Program Kawasan Permukiman	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUPR

Keberhasilan pencapaian target kinerja tahun 2022 terutama dengan optimalisasi kegiatan dari Dinas Sosial PMD berupa:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar.
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten.
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten.

3.2.17 Sasaran Tujuh Belas, Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-17 adalah sebagai berikut:

Tabel 96.
Capaian kinerja sasaran ke-17 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (nilai)	B (60,01)	CC (51,16)	83,87

a. Analisis Indikator

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Guna memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode atau tahun berikutnya. Evaluasi pelaksanaan RB mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk kali kedua mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi, selain untuk level kabupaten juga mengikutsertakan 10 Perangkat Daerah sampel yang terdiri dari Inspektorat, Dinas PUPR, DPMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Disdukcapil, Dinas Sosial PMD, Disdagrin dan BKPSDM. Adapun hasil penilaian RB tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 97.

Rekapitulasi Penilaian Indeks RB Barito Utara Tahun 2021-2022.

Komponen Penilaian		Bobot	Nilai	
			2021	2022
A	Pengungkit			
	1. Pemenuhan	20	8,68	9,02
	2. Hasil Antara Area Perubahan	10	4,31	4,86
	3. Reformasi	30	6,20	7,56
	Total Komponen Pengungkit	60	19,19	21,44
B	Hasil			
	1. Akuntabilitas Kinerja	10	7,21	7,30
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10	8,13	8,26
	3. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,59	8,06
	4. Kinerja Organisasi	10	5,89	6,10
	Total Komponen Hasil	40	28,82	29,72
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	48,01	51,16

Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 belum memenuhi target yaitu predikat B dengan nilai 61. Namun demikian, hasil ini meningkat dari tahun sebelumnya, dimana Pemerintah Kabupaten Barito Utara masih mendapatkan predikat CC dengan penilaian 51,16.

Tabel 98.

Perbandingan capaian kinerja indikator Indeks RB tahun 2018-2022

Indeks RB	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	Kategori (Nilai)	-	C (31)	B (60,01)	B (60,01)	B (61)
Realisasi	Kategori (Nilai)	-	-	-	C (48,01)	CC (51,16)
Capaian	%	-	-	-	80	83,87

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Hasil penilaian tahun 2022 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Sekretariat Daerah tahun 2023 maka capaiannya sebesar 78,71%.

Tabel 99.

Perbandingan capaian kinerja indikator Indeks RB terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2021			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2021 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks RB	%	-	B (61)	CC (51,16)	83,87	B (65)	78,71

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyusun *road map* reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Tujuan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Kinerja dengan sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan melaksanakan 8 (delapan) area perubahan dan 9 (sembilan) program reformasi birokrasi serta melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 100.

Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang diharapkan

No.	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
2.	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai

No.	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
		dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
3.	Peraturan Perundang-undangan	Terbentuknya Produk Hukum Daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
4.	Sumber daya manusia Aparatur	Sumber Daya Manusia apatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
6.	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7.	Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8.	Mental Aparatur atau Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang Tinggi

Tabel 101.
Program Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

No.	Program	Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Manajemen Perubahan (Mental Aparatur/Pola Pikir dan Budaya Kerja)	Penguatan tim reformasi birokrasi	Dapat terwujud budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (budaya birokrasi yang bersih dan melayani) serta integritas, profesionalisme, citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat semakin meningkat yang bermuara pada kepuasan masyarakat
		Penyusunan <i>road map</i> reformasi birokrasi tahap 3	
		Peningkatan sosialisasi /internalisasi <i>road map</i> reformasi birokrasi kepada PD/unit kerja dan pegawai	
		Mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur	
		Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	
2.	Penataan Peraturan Perundang-	Melakukan harmonisasi produk hukum daerah (evaluasi, identifikasi dan	Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas

No.	Program	Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
	undangan	deregulasi)	dan berpihak pada publik, harmonis dan tidak tumpang tindih
		Peningkatan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah	
		Penyusunan dan penyebarluasan produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya	
3.	Penguatan Kelembagaan	Melakukan evaluasi organisasi/kelembagaan	Kelembagaan/ organisasi berbasis kinerja (<i>performance based organization</i>), tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih efektif dan efisien.
		Melakukan penataan organisasi/kelembagaan	
4.	Penguatan Ketatalaksanaan	Peningkatan proses bisnis/Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya bidang pelayanan	Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-government</i> .
		Pengembangan <i>e-government</i>	
		Peningkatan keterbukaan informasi publik	
		Peningkatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa	
5.	Penataan Sistem Sumber Daya Manusia	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi	Dapat meningkatkan manajemen kinerja individu, menyempurnakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai.
		Proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	
		Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	
		Promosi jabatan dilaksanakan secara terbuka	

No.	Program	Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
		khususnya eselon II Penetapan dan pengukuran kinerja individu Penegakan aturan disiplin /kode etik/kode perilaku pegawai Penyempurnaan pelaksanaan evaluasi jabatan Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian	
6.	Penguatan Pengawasan	Melaksanakan kebijakan gratifikasi Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peningkatan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat Merencanakan dan melaksanakan <i>whistle blowing system</i> Merencanakan dan melaksanakan Penanganan benturan kepentingan Pembangunan zona integritas Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Dapat meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
7.	Penguatan Akuntabilitas	Mengembangkan budaya kinerja dari level pimpinan sampai dengan staf (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan, pemantauan/penilaian/pengukuran kinerja) Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja (peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang membidangi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat disemua PD, menyempurnakan integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan pimpinan Perangkat

No.	Program	Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
		Instansi Pemerintah, penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja, reviu indikator kinerja utama, penyusunan indikator kinerja individu yang berkualitas berbasis elektronik, membangun dan mengembangkan penyusunan perjanjian kinerja/pengukuran kinerja berbasis elektronik, membangun aplikasi <i>cascading</i> kinerja/pohon kinerja)	Daerah mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahkan meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari CC menjadi B
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Menerapkan standar pelayanan (memaklumkan standar pelayanan, perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP/ reviu standar pelayanan)	Dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
		Melaksanakan budaya pelayanan prima (sosialisasi/ pelatihan, mempermudah akses layanan, pemberlakuan sanksi/ <i>reward</i> bagi pelaksana pelayanan, membentuk Mal Pelayanan Publik, peningkatan inovasi pelayanan)	
		Meningkatkan pengelolaan pengaduan (Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pengaduan, pemantapan/pengintegrasian sistem pelayanan pengaduan secara manual dan online, evaluasi penanganan pengaduan)	
		Melaksanakan penilaian kepuasan terhadap layanan (survei tingkat kepuasan masyarakat secara berkala)	

No.	Program	Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
		Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelayanan	
		Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan publik (monitoring dan evaluasi/ penilaian terhadap kinerja pelayanan publik)	
9.	<i>Quick Wins</i> Reformasi Birokrasi	Menyusun rumusan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi	Mendapatkan momentum positif dan meningkatkan kepercayaan diri Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dalam melakukan langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat
		Menetapkan dan melaksanakan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi	
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi	

Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target kinerja untuk penerapan reformasi birokrasi pada Pemkab Barito Utara antara lain:

- 1) Agen Perubahan belum mampu menggerakkan perubahan dalam organisasi secara optimal.
- 2) Penerapan tata kelola SPBE belum maksimal dengan masih rendahnya indeks SPBE.
- 3) Belum melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.

- 4) *Assessment* baru dilakukan pada sebagian pegawai dan masih rendahnya nilai Profesionalitas ASN yang masih dalam kategori sangat rendah;
- 5) Belum disusun kebijakan terkait manajemen talenta sehingga di Pemerintah Kabupaten Barito Utara belum dilakukan pemetaan berdasarkan talenta.
- 6) Kebijakan pengawasan internal yang disusun masih perlu peningkatan dalam implementasinya, melalui monitoring dan evaluasi secara berkala untuk diketahui tingkat kepatuhan atas kebijakan tersebut.
- 7) Belum dilakukan penancangan dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- 8) Implementasi pelayanan publik khususnya di perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan dalam hal sistem kompensasi kepada penerima layanan dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Tindak lanjut untuk meningkatkan penerapan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara antara lain:

- 1) Mendorong agen perubahan sehingga dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, *Core Values* ASN BerAKHLAK, dan area perubahan dalam reformasi birokrasi.
- 2) Melakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap reformasi birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasikan terhadap seluruh pegawai.
- 3) Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Barito Utara sesuai dengan kriteria dalam penerapan SPBE yang telah ditetapkan dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur SPBE Nasional.

- 4) Melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
- 5) Melaksanakan *assessment* kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi.
- 6) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan internal pengawasan dan integritas, serta menyusun laporan atas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi tersebut.
- 7) Melakukan penancangan dan pembangunan Zona Integritas.
- 8) Memastikan implementasi pelayanan publik dengan penerapan budaya pelayanan prima, melakukan inovasi layanan, menginformasikan hasil survei eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program-program pendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ke-17 adalah sebagai berikut:

Tabel 102.

Pohon Program Pendukung Sasaran-17

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi			
Indikator Kinerja Utama	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Program pada Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Indeks Reformasi Birokrasi	Program penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan Penataan Organisasi)	Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi			
Indikator Kinerja Utama	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Program pada Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
		Program Penataan Desa	Dinas Sosial PMD
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan

Untuk mencapai target kinerja tahun 2022, diupayakan dengan melaksanakan kegiatan pada perangkat daerah terkait antara lain:

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan; Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana; Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Mutasi dan Promosi ASN; Pengembangan Kompetensi ASN; Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- Penyelenggaraan Pengawasan Internal; Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; Pendampingan dan Asistensi.
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

Belum tercapainya target Indeks Reformasi birokrasi Kabupaten Barito Utara dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan antara lain disebabkan oleh:

- 1) Pelaksanaan program penunjang untuk Reformasi Birokrasi masih Sebagian besar berjalan pada tingkat pemerintah daerah sedangkan untuk tingkat Perangkat Daerah belum teranggarkan dengan baik.
- 2) Pelaksanaan program pengawasan belum berjalan optimal terutama yang berkaitan dengan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan internal pengawasan dan integritas.
- 3) Belum ada kegiatan khusus untuk penancangan zona integritas.
- 4) Anggaran bimtek belum dioptimalkan untuk peningkatan SDM berkaitan Reformasi Birokrasi.

Alternatif Solusi yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang dari sisi program adalah:

- 1) Membuat perencanaan yang lebih cermat terutama untuk penganggaran pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan fasilitasi reformasi birokrasi di tingkat Perangkat Daerah.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan program pengawasan daerah dalam hal *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan internal pengawasan dan integritas.
- 3) Merencanakan untuk penancangan zona integritas.
- 4) Mengoptimalkan pelaksanaan bimtek untuk peningkatan SDM di bidang Reformasi Birokrasi pada setiap Perangkat Daerah.

3.2.18 Sasaran Delapan Belas, Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Kinerja

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-18 adalah sebagai berikut:

Tabel 103.
Capaian kinerja sasaran ke-18 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Kinerja				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	B (65)	B (61,42)	94,49

Keterangan: *angka sementara menunggu hasil evaluasi tahun 2022 dikeluarkan

a. Analisis Indikator

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian diberikan kepada seluruh komponen SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Tabel 104.
Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP

No	Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30%
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30%
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100%

Sumber: Permen PANRB No.88 Tahun 2021

Implementasi SAKIP tahun 2022 telah dievaluasi oleh Kementerian PANRB mulai tanggal 29 Agustus 2022 dengan metode *desk evaluation*. Hasil evaluasi SAKIP untuk Pemkab Barito Utara yaitu predikat “B” dengan skor penilaian 61,42. Penilaian tersebut menunjukkan implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaian dengan tahun sebelumnya.

Tabel 105.
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai				2022*	
			2018	2019	2020	2021	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	18,06	18,90	19,83	19,86	30	21,00
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,41	13,91	14,92	14,97	30	17,00
c.	Pelaporan Kinerja	15	8,77	9,24	9,91	9,94	15	10,22
d.	Evaluasi Internal	10	3,84	4,68	4,99	4,99	25	13,10
e.	Capaian Kinerja	20	9,88	10,38	10,51	10,53	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi	100	53,97	57,11	60,16	60,29	100	61,42
	Predikat		CC	CC	B	B		B

Keterangan:

*Hasil evaluasi tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaian dengan tahun sebelumnya.

Pencapaian indikator kinerja Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 yaitu 61,42 dengan predikat B, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 60,29 dengan predikat B. Adapun capaian kinerja untuk tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 disebabkan karena adanya peningkatan target dari skor 61 menjadi 65.

Tabel 106.

Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Tahun 2018-2022

Nilai SAKIP	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	%	CC (51,00)	CC (54,00)	B (60,01)	B (61)	B (65)
Realisasi	%	CC (53,97)	CC (57,11)	B (60,16)	B (60,26)	B (61,42)
Capaian	%	105,82	105,76	100,25	98,84	94,49

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

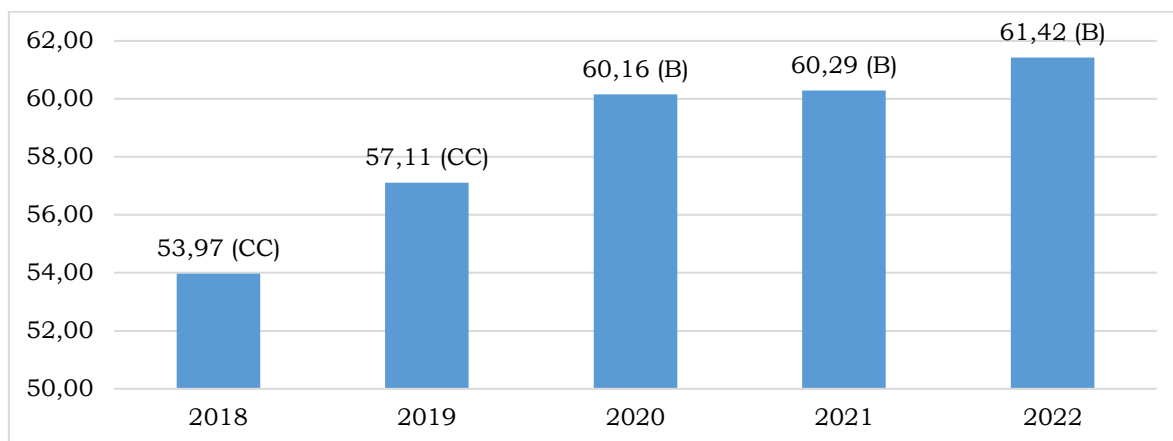
Jika dibandingkan dengan target pada RPJMD 2018-2023, capaian kinerja untuk tahun 2022 sebesar 94,49%, belum memenuhi target disebabkan ada peningkatan target dari tahun sebelumnya dimana predikat B yang ditargetkan meningkat dari 61 menjadi 65 poin. Jika dibandingkan antara realisasi sementara untuk tahun 2022 dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 yaitu predikat B dengan nilai 69,00 maka masih terdapat selisih (gap) nilai sebesar 8 poin yang perlu dikejar hingga akhir 2023.

Tabel 107.

Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai SAKIP terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Nilai SAKIP	%	CC (53,97)	B (65)	B (61,42)	94,49	B (69,00)	89,01

Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam empat tahun terakhir memiliki kecenderungan yang meningkat mulai dari predikat CC pada kondisi awal RPJMD tahun 2018 sampai dengan predikat B di tahun 2021 dan 2022.



Gambar 15. Nilai SAKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2022

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja tahun 2022 antara lain:

- 1) Perencanaan kinerja pada level pemerintah daerah belum sepenuhnya menjawab isu strategis pemerintah daerah, khususnya terkait dengan penanganan resiko bencana. Selain itu, pada perencanaan level PD masih ditemukan rumusan sasaran strategis yang tidak berorientasi *outcome*/tidak menggambarkan kondisi hasil yang ingin diwujudkan.
- 2) Masih dijumpai rumusan indikator kinerja utama pada perangkat daerah yang belum memenuhi kriteria SMART.
- 3) Penetapan target dalam perencanaan kinerja masih ditemukan target yang ditetapkan lebih rendah daripada capaian kinerja tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan sudah tidak menantang dan realistis.
- 4) Pada tingkat perangkat daerah masih ditemukan data kinerja yang kurang relevan dan tidak mendukung pencapaian realisasi kinerja.

- 5) Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dilakukan belum menggunakan elektronik.
- 6) Pimpinan PD belum sepenuhnya berkomitmen untuk terlibat dalam pemantauan atas kinerja berjenjang.
- 7) Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk dijadikan landasan melakukan penyesuaian aktivitas dan anggaran yang lebih berfokus menunjang peningkatan pencapaian kinerja.
- 8) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
- 9) Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD.
- 10) *Monitoring* atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal yang disampaikan belum dilakukan secara berkala sehingga belum terjadi perbaikan pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada PD.

Rencana tindak lanjut rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan SAKIP tahun mendatang antara lain:

- 1) Menyusun rumusan sasaran strategis pada Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) kedepan sehingga mampu menjawab seluruh isu strategis daerah.
- 2) Memperbaiki rumusan sasaran strategis beberapa PD agar lebih berorientasi *outcome* dan rumusan IKU agar memenuhi kriteria SMART.
- 3) Memperbaiki penetapan target pada dokumen perencanaan agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.
- 4) Merumuskan kembali penjabaran kinerja dengan menyusun pohon kinerja yang menggambarkan uraian penjabaran kondisi kinerja yang dilakukan berdasarkan *logical framework* yang menggambarkan hubungan "sebab-akibat" dan berdasarkan *critical success factor* (CSF) antar level kondisi kinerja yang dijabarkan

sehingga dapat dipastikan pencapaian kinerja level bawah berpengaruh pada pencapaian kinerja level diatasnya.

- 5) Memastikan data kinerja yang ada di dalam pengukuran kinerja relevan dan mendukung pencapaian realisasi kinerja sehingga dipastikan pengukuran kinerja benar-benar didukung oleh data kinerja yang andal dan valid.
- 6) Mendorong pimpinan PD untuk lebih berkomitmen dalam pelaksanaan pemantauan atas kinerja berjenjang dengan memberikan *feedback* perbaikan pencapaian realisasi kinerja dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala.
- 7) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk dijadikan landasan melakukan penyesuaian aktivitas dan anggaran yang lebih berfokus menunjang peningkatan pencapaian kinerja dan juga dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* ke setiap individu pegawai.
- 8) Memastikan penyusunan laporan kinerja di level PD memberikan informasi terkait dengan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya.
- 9) Mendorong pemanfaatan Informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
- 10) Menyusun pedoman evaluasi dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan juga memastikan laporan hasil evaluasi berisi rekomendasi yang sesuai dengan catatan/temuan yang ada sehingga PD dapat lebih tepat menindaklanjuti hal yang menjadi catatan/temuan.
- 11) Mendorong Inspektorat untuk melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja PD secara berkala sehingga terdapat perbaikan pelaksanaan akuntabilitas kinerja PD secara signifikan.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program-program pendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ke-18 adalah sebagai berikut:

Tabel 108.
Pohon Program Pendukung Sasaran-18

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Kinerja			
Indikator Kinerja Utama	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Program pada Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Nilai SAKIP	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (subkegiatan Peningkatan Kinerja dan RB)	Sekretariat Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kecamatan
		Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM

Dalam rangka mewujudkan target kinerja tahun 2022 dalam penerapan manajemen kinerja, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan kegiatan:

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Belum tercapainya target nilai SAKIP Kabupaten Barito Utara dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan antara lain disebabkan oleh:

- 1) Masih terdapat kendala anggaran untuk pengadaan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Unit Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan/unit kerja pada khususnya dan kinerja Instansi pada umumnya.
- 2) Masih rendahnya program/kegiatan untuk peningkatan kualitas SDM yang menangani SAKIP di setiap Perangkat Daerah.

Alternatif Solusi yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang dari sisi program adalah:

- 1) Mengupayakan penganggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas SDM yang menangani SAKIP Perangkat Daerah melalui kegiatan asistensi.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan program-program perencanaan dan pengawasan yang sudah berjalan.

3.2.19 Sasaran Sembilan Belas, Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Publik

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 109.

Capaian kinerja sasaran ke-19 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Publik				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (Nilai)	B (76,90)	B (79,71)	103,65

a. Analisis Indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan pada unit penyelenggara pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Unsur SKM yang dinilai yakni persyaratan; prosedur; waktu; biaya/tarif; produk layanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana prasarana dan penanganan pengaduan.

Tabel 110.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai persepsi	Nilai interval IKM	Nilai interval konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam rangka melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah membentuk tim pelaksana yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/362/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barito Utara Tahun 2022, dan memerintahkan 15 (lima belas) orang mahasiswa perguruan tinggi di Muara Teweh sebagai Petugas Survei di lapangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 094/70/Org untuk menjamin independensi pelaksanaan survei di lapangan.

Survei tahun 2022 dilaksanakan pada 15 (lima belas) perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, yakni ditunjuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, Puskesmas Lanjas, Puskesmas Muara

Teweh, Kecamatan Teweh Tengah, Kelurahan Lanjas, Kelurahan Melayu dan PDAM Tirta Dharma Muara Teweh.

Hasil SKM Tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 15 unit penyelenggara pelayanan publik, 6 unit (40%) dengan mutu pelayanan C (cukup), 7 unit (46,67%) dengan mutu pelayanan B (baik) dan 2 unit (13,33%) yang memiliki mutu A (sangat baik). Secara keseluruhan nilai SKM untuk Kabupaten Barito Utara sebesar 79,71 atau berada pada mutu B (kinerja pelayanan baik). Secara umum setiap unsur sudah berada pada penilaian baik.

Hasil SKM untuk masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 111.

Hasil SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Barito Utara
Tahun 2018-2022

No.	Unit Kerja Pelayanan Publik	2018		2019		2021		2022	
		Skor	Mutu	Skor	Mutu	Skor	Mutu	Skor	Mutu
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,70	C	78,20	B	88,14	B	80,13	B
2	Dinas Perhubungan	-	-	78,98	B	-	-	-	-
3	Dinas Pendidikan	-	-	71,15	C	-	-	-	-
4	Dinas Kesehatan	-	-	73,52	C	-	-	-	-
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	78,35	B	83,91	B	83,70	B
6	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	77,35	B	74,18	C	77,47	B	76,04	C
7	Puskesmas Lanjas	74,79	C	76,04	C	79,13	B	76,67	B
8	Puskesmas Muara Teweh	79,05	B	78,82	B	79,13	B	79,82	B
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	79,61	B	80,14	B	91,05	A	71,46	C
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	74,37	C

No.	Unit Kerja Pelayanan Publik	2018		2019		2021		2022	
		Skor	Mutu	Skor	Mutu	Skor	Mutu	Skor	Mutu
11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	83,85	B
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	82,58	B	75,65	C	75,79	C	90,95	A
13	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	81,66	B	-	-	73,64	C
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	74,83	C	78,38	B	84,83	B	86,09	B
15	Kecamatan Teweh Tengah	-	-	90,78	A	84,71	B	94,09	A
16	Kelurahan Lanjas	-	-	79,40	B	77,19	B	74,26	C
17	Kelurahan Melayu	-	-	77,66	B	82,95	B	78,51	B
18	PDAM Tirta Dharma Muara Teweh	66,29	C	71,39	C	60,25	D	72,01	C
	Hasil SKM Kabupaten Barito Utara	75,21	C	77,77	B	80,38	B	79,71	B

Sumber : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022. Tahun 2020 tidak dilaksanakan SKM karena adanya *refocusing* anggaran akibat Covid-19

Terdapat perbedaan jumlah unit kerja yang menjadi sampel dalam Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 sampai 2022. Tahun 2018 mengambil 8 sampel unit kerja, tahun 2019 mengambil 16 unit kerja, tahun 2021 mengambil 12 unit kerja, kemudian pada tahun 2022 mengambil 15 sampel unit kerja. Tahun 2020 tidak dilaksanakan SKM karena kondisi pandemi Covid 19 yang menyebabkan adanya *refocusing* anggaran.

Pencapaian Indikator kinerja mutu pelayanan terhadap kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 capaian kinerja sebesar 101,51%, tahun 2021 capaian kinerja sebesar 104,66%, kemudian pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 103,65%.

Tahun 2020 tidak dilaksanakan SKM karena terkendala kondisi pandemi Covid-19 sehingga data realisasi menggunakan data SKM tahun 2019.

Tabel 112.

Perbandingan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018-2022.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	%	B (76,61)	B (76,61)	B (76,71)	B (76,80)	B (76,90)
Realisasi	%	C (75,21)	CC (77,77)	B (77,77)	B (80,38)	B (79,71)
Capaian	%	98	101,51	101,40	104,66	103,65

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2018-2023, capaian kinerja untuk tahun 2022 sebesar 103,65%, melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan jika dibandingkan antara realisasi tahun 2022 (predikat B nilai 79,71) dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 yaitu predikat B dengan nilai indeks 77, maka sudah memenuhi target, sehingga kinerja dalam 4 tahun mendatang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi.

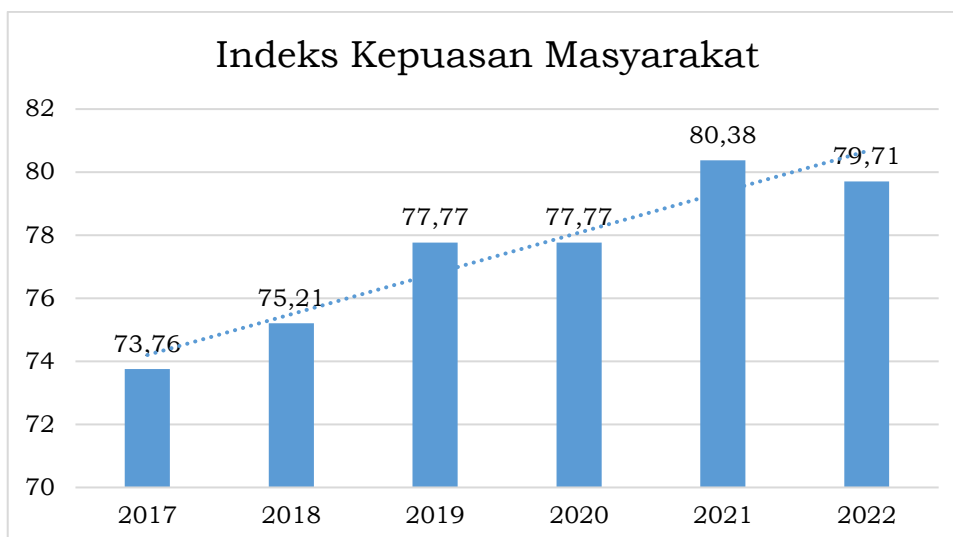
Tabel 113.

Perbandingan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Barito Utara terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2018)	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir Renstra (2023)	Realisasi 2022 terhadap Kondisi Akhir Renstra (2023)
			Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (Nilai)	C (75,21)	B (76,90)	B (79,71)	103,65%	B (77)	103,78%

Dalam lima tahun terakhir, hasil SKM Kabupaten Barito Utara mengalami kecenderungan peningkatan. Hal ini terlihat dari Gambar 16. Tahun 2017 pelaksanaan survei masih mengacu pada Peraturan Menteri

PANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sedangkan tahun 2018-2022 menggunakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



Gambar 16. Grafik Hasil SKM Tahun 2017-2022

Faktor pendorong peningkatan mutu pelayanan dari hasil survei kepuasan masyarakat sehingga target kinerja 2022 dapat dicapai adalah:

- 1) Adanya tindak lanjut dari beberapa unit penyelenggara pelayanan publik atas beberapa kelemahan yang dijumpai pada hasil SKM tahun sebelumnya terutama untuk masalah antrian, perbaikan sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan.
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik.
- 3) Adanya arahan dan penekanan untuk Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) terutama dalam upaya penyederhanaan prosedur pelayanan.
- 4) Adanya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi Ombudsman terhadap tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil evaluasi tersebut digunakan oleh Bupati Barito Utara untuk memberikan penekanan

kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang ada agar melakukan pembenahan sehingga minimal bisa masuk dalam zona hijau.

- 5) Adanya *reward* dari Bupati Barito Utara terhadap unit kerja yang telah menerapkan standar pelayanan publik dengan baik.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program-program pendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ke-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 114.

Pohon Program Pendukung Sasaran-19

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pengelolaan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Subkegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana)	Sekretariat Daerah
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Dinas PRKPP
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	

Dalam rangka mewujudkan target kinerja tahun 2022 dalam peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Perangkat Daerah terkait mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan:

- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
- Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pelayanan Pencatatan Sipil; Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan; Penyusunan Profil Kependudukan.
- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah; Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah.
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

3.2.20 Sasaran Dua Puluh, Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ke-20 adalah sebagai berikut:

Tabel 115.
Capaian kinerja sasaran ke-20 tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	WTP (1)	WTP (1)	100%

a. Analisis Indikator

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu

transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2022 atas laporan keuangan tahun 2021, Kabupaten Barito Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*). Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai. Dengan demikian tercapai kinerja tahun 2022 yaitu opini BPK bisa direalisasikan dengan capaian kinerja 100% atau dalam kategori baik. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Barito Utara mampu mempertahankan opini WTP untuk yang kedelapan kalinya.

Tabel 116.
Perbandingan Opini BPK untuk Laporan Keuangan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2022

IKU	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Ket: opini BPK atas laporan keuangan tahun sebelumnya (n-1)								

Kinerja tahun 2022 tercapai 100% sama dengan kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 117.
Perbandingan capaian kinerja indikator Opini BPK
tahun 2018-2022

Opini BPK	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Target	Predikat (Opini ke-)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)
Realisasi	Predikat (Opini ke-)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)
Capaian	%	100	100	100	100	100

Keterangan: Target 2018-2020 menggunakan RPJMD 2018-2023 dan target tahun 2021-2022 menggunakan Perubahan RPJMD 2018-2023

Jika dibandingkan dengan target pada RPJMD 2018-2023, capaian kinerja untuk tahun 2022 sebesar 100%, telah memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan jika dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD di tahun 2023 yaitu kembali memperoleh WTP, maka kinerja dalam mendatang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi agar mampu memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 118.

Perbandingan capaian kinerja indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara terhadap target RPJMD 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Tahun 2022			Target Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	100	WTP (1)	100

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian WTP atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara antara lain:

- 1) Penyusunan APBD Kabupaten Barito Utara tepat waktu.
- 2) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
- 3) Laporan akuntabilitas nilai aset daerah dan laporan keuangan lainnya sebagai pendukung kelengkapan administrasi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Barito Utara.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program-program pendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ke-20 adalah sebagai berikut:

Tabel 119.
Pohon Program Pendukung Sasaran-20

Sasaran Strategis: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Opini BPK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	

Dalam rangka mewujudkan target kinerja tahun 2022 dalam penerapan pengelolaan keuangan dan aset, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Perangkat Daerah terkait mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan:

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah; Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Pengelolaan pendapatan Daerah.
- Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

3.3 Analisis Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.3.1 Program Pendukung Kinerja

Program penunjang sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kabupaten Barito Utara tahun 2022 mulai dari Program Pembangunan Daerah yang tercantum pada RPJMD dan diturunkan pada program di tingkat perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 120.
Program Pendukung Sasaran Strategis dan IKU Kabupaten Barito Utara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
			Program Peningkatan Pelayanan angkutan	Dinas Perhubungan
			Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	
			Program Pengelolaan Pelayanan	
2. Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	Program pembangunan infrastruktur perdesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah (Bag. Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3. Menurunnya desa/kelurahan blankspot	Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	Program pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Aplikasi Informatika	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
4. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	a. Rata-rata lama sekolah b. Angka melek huruf	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Batara Pintar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan
			Program Pengelolaan Pendidikan	
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pengembangan Kurikulum	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	Program peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
			Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	
			Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Hubungan Industrial	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
7. Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Program Peningkatan Produksi, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Penyuluhan Pertanian	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8. Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
9. Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perkebunan	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
10. Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	a. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah b. PDRB sektor perdagangan c. PDRB sektor industri	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi , UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industri	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Program Pengembangan UMKM	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
11.Meningkatnya daya saing tenaga kerja	a. Angka pengangguran terbuka b. Pendapatan Perkapita Penduduk	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
12.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta pengendalian pencemaran / perusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
			Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
			Program Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup	
			Program Pengelolaan Persampahan	
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan PenataaRuang
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
13.Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwiwsata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Program Pengembangan Kebudayaan	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pengelolaan Permuseuman	
14.Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15.Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik sosial	Program Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Prganisasi Kemasyarakatan	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
16. Menurunnya penyanggah masalah sosial	Persentase PMKS yang mandiri	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, fakir miskin, KAT dan PMKS	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			Program Penanganan Bencana	
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Perempuan	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
			Program Perlindungan Khusus Anak	
			Program Pengendalian Penduduk	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
			Program Pengembangan Perumahan	
			Program Kawasan Permukiman	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17.Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Program penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan Penataan Organisasi)	Sekretariat Daerah
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah
			Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
			Program Penataan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
18.Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	Nilai SAKIP	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (subkegiatan Peningkatan Kinerja dan RB)	Sekretariat Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kecamatan
			Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
19.Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pengelolaan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Subkegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana)	Sekretariat Daerah
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Program Pengelolaan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
			Program Pengelolaan Izin Lokasi	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD	Program pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
20.Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

3.3.2 Alokasi Anggaran Program

Pembagian alokasi anggaran disesuaikan dengan prioritas untuk mencapai sasaran strategis pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Anggaran untuk masing-masing program daerah berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 121.
Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Kabupaten Barito Utara TA 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	95.154.573.035
2. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya	2.359.929.750
3. Menurunnya desa/kelurahan blankspot	Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	Program pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi	2.580.423.199
4. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah Angka melek huruf	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Batara Pintar	125.067.436.604
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	Program peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan	215.939.143.285
6. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif	733.137.000
7. Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Program Peningkatan Produksi, Penyediaan dan Pengembangan	39.534.547.753

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
		Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian	
8. Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perikanan	982.500.000
9. Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perkebunan	1.279.273.050
10. Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi , UKM dan peningkatan/pengembangan perdagangan dan industri	1.651.639.501
	PDRB sektor perdagangan		
	PDRB sektor industri		
11. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi	2.437.355.059
	Pendapatan Perkapita Penduduk		
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup	41.078.445.715
13. Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kenaikan jumlah wisatawan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan	4.276.657.501
14. Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	19.285.356.064

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
15. Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Angka konflik sosial	Program Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5.209.714.546
16. Menurunnya penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang mandiri	Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial, fakir miskin, KAT dan PMKS	29.766.638.478
17. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Program penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	55.013.807.640
18. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	Nilai SAKIP	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	201.614.423.775
19. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pengelolaan Pelayanan Publik	26.555.883.218
20. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah	Opini BPK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	208.288.608.815

3.3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dari setiap indikator kinerja utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis dengan capaian realisasi keuangan program pendukung sasaran strategis. Tingkat efisiensi positif (+) menunjukkan ada efisiensi dan sebaliknya inefisiensi jika negatif (-).

Tabel 122.
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran serta Tingkat Efisiensi Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	5 - 8
1. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah (%)	92,23	99,02	107,36	95.154.573.035	89.570.798.261	94,13	13,23
2. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik (%)	88,35	86,41	97,80	2.359.929.750	1.954.749.035	82,83	14,97
3. Menurunnya desa/kelurahan blankspot	Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i> (%)	7,77	5,83	124,97	2.580.423.199	2.542.410.029	98,53	26,44
4. Meningkatnya aksesibilitas dan	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,6	8,90	103,49	123.430.320.604	117.492.553.310	95,19	8,30

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	5 - 8
kualitas pendidikan	Angka melek huruf (%)	99,60	99,53	99,93	1.637.116.000	1.320.930.800	80,69	19,24
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup (tahun)	71,31	71,50	100,27	215.939.143.285	166.324.184.447	77,02	23,25
6. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun (juta rupiah)	9.825	10.182	103,63	733.137.000	635.653.550	86,70	12,08
7. Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian (juta rupiah)	618,194,5	563.159,9	91,10	39.534.547.753	31.239.785.415	79,02	3,51
8. Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan (juta rupiah)	180.593,6	177.025,5	98,02	982.500.000	928.624.638	94,52	35,15
9. Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan (juta rupiah)	387.784,1	519.022,1	133,84	1.279.273.050	1.262.537.433	98,69	14,07
10. Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah (juta rupiah)	149.466,1	163.084,2	109,11	139.000.000	129.111.904	92,89	16,22
	PDRB sektor perdagangan (juta rupiah)	714.179,3	797.189,4	111,62	1.440.639.501	1.418.634.921	98,47	13,15

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	5 - 8
	PDRB sektor industri (juta rupiah)	933.619,3	1.079.245,6	115,60	72.000.000	71.506.000	99,31	16,29
11. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka (%)	4,19	4,82	84,96	1.247.652.530	1.069.088.172	85,69	-0,73
	Pendapatan Perkapita Penduduk (juta rupiah)	52,79	89,23	169,03	1.189.702.530	1.012.622.972	85,12	83,91
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,54	76,89	104,56	41.078.445.715	34.470.035.643	83,91	20,65
13. Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata (%)	95,70	108,92	113,81	4.276.657.501	4.226.773.755	98,83	14,98
14. Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) (%)	87,50	100	114,29	19.285.356.064	15.055.103.323	78,06	36,23

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 =4/3	6	7	8 =7/6	5 - 8
15. Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik sosial (%)	80	100	125	5.209.714.546	2.818.406.592	54,10	70,90
16. Menurunnya penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang mandiri (%)	21,40	24,08	112,52	29.766.638.478	29.000.833.478	97,43	15,09
17. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,01)	CC (51,16)	83,87	55.013.807.640	51.712.560.302	94,00	-10,13
18. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	Nilai SAKIP	B (65)	B (61,42)	94,49	201.614.423.775	187.755.410.293	93,13	1,37
19. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (76,90)	B (79,71)	103,65	26.555.883.218	23.786.610.573	89,57	14,08
20. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP (1)	WTP (1)	100	208.288.608.815	172.397.800.157	82,77	17,23

3.4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 123.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

No. Urut	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	1.267.021.206.458,00	1.596.527.188.734,29	126,01	1.233.738.208.873,61
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.555.819.458,00	111.128.237.727,69	76,35	104.047.427.279,40
4.1.1	Pajak Daerah	21.706.872.729,00	20.200.409.777,20	93,06	16.940.885.077,00
4.1.2	Retribusi Daerah	14.724.760.817,00	10.131.945.418,00	68,81	9.028.294.247,40
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00	10.058.366.983,00	100,58	10.432.755.624,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	99.124.185.912,00	70.737.515.549,49	71,36	67.645.492.331,00
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.121.465.387.000,00	1.465.272.565.169,60	130,66	1.106.886.282.594,21
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.101.465.387.000,00	1.403.589.853.954,93	127,43	1.061.165.398.850,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.021.528.889.000,00	1.323.653.355.954,93	129,58	940.660.520.850,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	2.461.865.000,00	2.461.865.000,00	100,00	26.028.179.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	77.474.633.000,00	77.474.633.000,00	100,00	94.476.699.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.000.000.000,00	61.682.711.214,67	308,41	45.720.883.744,21
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	20.000.000.000,00	61.532.711.214,67	307,66	45.720.883.744,21
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00

No. Urut	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	0,00	20.126.385.837,00	0,00	22.804.499.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	20.126.385.837,00	0,00	22.804.499.000,00
5	BELANJA DAERAH	1.453.394.697.170,00	1.268.218.023.307,23	87,26	1.096.531.378.792,81
5.1	BELANJA OPERASI	967.497.039.803,00	816.168.051.807,00	84,36	751.524.627.556,00
5.1.1	Belanja Pegawai	516.661.366.688,00	433.763.233.912,00	83,96	425.050.404.307,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	408.941.443.835,00	346.868.904.199,00	84,82	297.645.444.167,00
5.1.4	Belanja Subsidi	2.000.200.000,00	19.708.000,00	0,99	82.622.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	37.311.979.280,00	33.106.872.821,00	88,73	26.458.506.782,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.582.050.000,00	2.409.332.875,00	93,31	2.287.650.300,00
5.2	BELANJA MODAL	322.434.773.542,00	293.304.641.939,00	90,97	184.184.390.098,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.605.890.154,00	380.061.720,00	14,58	148.397.840,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.589.017.342,00	66.398.066.568,00	87,84	39.303.536.881,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.490.320.421,00	113.547.863.236,00	96,64	79.166.290.365,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	126.178.037.625,00	112.512.217.795,00	89,17	64.743.196.512,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	571.508.000,00	466.432.620,00	81,61	822.968.500,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.929.785.964,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	2.929.785.964,00	0,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	160.533.097.861,00	158.745.329.561,23	98,89	160.822.361.138,81
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.643.163.361,00	2.441.566.961,23	67,02	2.252.685.138,81
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	156.889.934.500,00	156.303.762.600,00	99,63	158.569.676.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(186.373.490.712,00)	328.309.165.427,06	(176,16)	137.206.830.080,80

No. Urut	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	384.876.677.305,00	384.827.096.545,39	99,99	247.669.847.224,59
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	384.876.677.305,00	384.827.096.545,39	99,99	247.669.847.224,59
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.000.000.000,00	3.000.000.000,00	27,27	0,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	8.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	373.876.677.305,00	381.827.096.545,39	102,13	247.669.847.224,59
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	187.503.186.593,00	710.136.261.972,45	378,73	384.876.677.305,39

Sumber : BPKA Kabupaten Barito Utara 2023

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 107,50% (predikat Baik Sekali) mengalami peningkatan dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 104,85%. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2022, yaitu 16 indikator atau 66,67% bermakna Baik Sekali dan 8 indikator atau 33,33% bermakna Baik.

Dari 24 Indikator Kinerja Utama (IKU), 17 indikator mampu memenuhi/melampaui target 100% dan 7 indikator belum memenuhi target (di bawah 100%). Adapun IKU yang mampu memenuhi target dengan capaian kinerja 100% atau lebih antara lain:

1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah
2. Persentase desa/kelurahan *blankspot*
3. Rata-rata lama sekolah
4. Angka Harapan Hidup
5. Pengeluaran perkapita pertahun
6. PDRB sektor perkebunan
7. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah
8. PDRB sektor perdagangan
9. PDRB sektor industri
10. Pendapatan Perkapita Penduduk
11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
12. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)
13. Persentase kunjungan wisata
14. Persentase penyelesaian konflik sosial
15. Persentase PMKS yang mandiri
16. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

17. Opini BPK

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mampu mencapai target 100% antara lain:

1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik
2. Angka Melek Huruf
3. PDRB sektor pertanian
4. PDRB sektor perikanan
5. Angka pengangguran terbuka
6. Indeks Reformasi Birokrasi
7. Nilai SAKIP

4.2 Rencana Tindak Lanjut

4.2.1 Tindak Lanjut untuk IKU yang Belum Memenuhi Target

Rencana tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk meningkatkan kinerja pencapaian indikator yang masih belum memenuhi target 100% tahun 2022 antara lain:

1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik

- a. Meningkatkan dukungan dan koordinasi dengan PLN dalam rangka penanganan permasalahan pembangunan jaringan listrik berkaitan masalah pembebasan jalan (row) dengan memediasi pertemuan antara warga beserta dengan perwakilan dari PLN. Telah dibentuk tim terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder dalam penanganan permasalahan pembebasan lahan.
- b. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terutama dalam pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
- c. Meningkatkan kinerja pembangunan akses jalan dan jembatan dari pusat kecamatan menuju desa-desa yang belum teraliri listrik.

2. Angka Melek Huruf

- a. Melaksanakan sosialisasi dan pendekatan intensif kepada kelompok masyarakat tentang pentingnya Pendidikan.
- b. Melaksanakan kampanye dan pembudayaan gemar membaca sampai ke tingkat desa.
- c. Meningkatkan pembinaan kepada lembaga non formal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya.

3. PDRB sektor pertanian

- a. Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil pertanian.
- b. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
- c. Penguatan kelembagaan Petani melalui bimbingan dan sosialisasi mengenai penggunaan varietas unggul, pemberian pupuk sesuai rekomendasi, optimalisasi lahan, dan pengendalian hama penyakit.
- d. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan.

4. PDRB sektor pertanian

- a. Memberikan bantuan benih ikan untuk peningkatan produksi.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat (nelayan dan pembudidaya ikan).
- c. Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok nelayan.
- d. Mengembangkan produk olahan perikanan.
- e. Meningkatkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

5. Angka pengangguran terbuka

- a. Meningkatkan Pelayanan informasi ketenagakerjaan melalui penyebaran informasi tenaga kerja.
- b. Pelaksanaan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- c. Peningkatan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

- d. peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi untuk meningkatkan serapan tenaga kerja di Barito Utara melalui promosi, penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi.
- e. Peningkatan program untuk menciptakan wirausahawan baru.

6. Indeks Reformasi Birokrasi

- a. Mendorong agen perubahan sehingga dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, *Core Values* ASN BerAKHLAK, dan area perubahan dalam reformasi birokrasi.
- b. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap reformasi birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasikan terhadap seluruh pegawai.
- c. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Barito Utara sesuai dengan kriteria dalam penerapan SPBE yang telah ditetapkan dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur SPBE Nasional.
- d. Melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
- e. Melaksanakan *assessment* kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi.
- f. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan internal pengawasan dan integritas, serta menyusun laporan atas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi tersebut.
- g. Melakukan penancangan dan pembangunan Zona Integritas.
- h. Memastikan implementasi pelayanan publik dengan penerapan budaya pelayanan prima, melakukan inovasi layanan, menginformasikan hasil survei eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap

komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

7. Nilai SAKIP

- a. Menyusun rumusan sasaran strategis pada Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) kedepan sehingga mampu menjawab seluruh isu strategis daerah.
- b. Memperbaiki rumusan sasaran strategis beberapa PD agar lebih berorientasi *outcome* dan rumusan IKU agar memenuhi kriteria SMART.
- c. Memperbaiki penetapan target pada dokumen perencanaan agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.
- d. Merumuskan kembali penjabaran kinerja dengan menyusun pohon kinerja yang menggambarkan uraian penjabaran kondisi kinerja yang dilakukan berdasarkan *logical framework* yang menggambarkan hubungan "sebab-akibat" dan berdasarkan *critical success factor* (CSF) antar level kondisi kinerja yang dijabarkan sehingga dapat dipastikan pencapaian kinerja level bawah berpengaruh pada pencapaian kinerja level di atasnya.
- e. Memastikan data kinerja yang ada di dalam pengukuran kinerja relevan dan mendukung pencapaian realisasi kinerja sehingga dipastikan pengukuran kinerja benar-benar didukung oleh data kinerja yang andal dan valid.
- f. Mendorong pimpinan PD untuk lebih berkomitmen dalam pelaksanaan pemantuan atas kinerja berjenjang dengan memberikan *feedback* perbaikan pencapaian realisasi kinerja dan pemantuan pencapaian kinerja secara berkala.
- g. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk dijadikan landasan melakukan penyesuaian aktivitas dan anggaran yang lebih berfokus menunjang peningkatan pencapaian kinerja dan juga

dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment ke setiap individu pegawai.

- h. Memastikan penyusunan laporan kinerja di level PD memberikan informasi terkait dengan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya.
- i. Mendorong pemanfaatan Informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
- j. Menyusun pedoman evaluasi dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan juga memastikan laporan hasil evaluasi berisi rekomendasi yang sesuai dengan catatan/temuan yang ada sehingga PD dapat lebih tepat dalam tindak lanjutnya.
- k. Mendorong Inspektorat untuk melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja PD secara berkala sehingga terdapat perbaikan pelaksanaan akuntabilitas kinerja PD secara signifikan.



LAMPIRAN

Tabel Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	92,23	99,02	107,36
2.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	2. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	88,35	86,41	97,80
3.	Menurunnya desa/kelurahan <i>blankspot</i>	3. Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	%	7,77	5,83	124,97
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	4. Rata-rata lama sekolah	tahun	8,6	8,90	103,49
		5. Angka Melek Huruf	%	99,60	99,53	99,93
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	6. Angka Harapan Hidup	tahun	71,31	71,50	100,27
6.	Meningkatnya daya beli masyarakat	7. Pengeluaran perkapita pertahun	juta rupiah	9.825	10.182	103,63
7.	Meningkatnya sektor pertanian	8. PDRB sektor pertanian	juta rupiah	618.194,5	563.159,9	91,10
8.	Meningkatnya sektor perikanan	9. PDRB sektor perikanan	juta rupiah	180.593,6	177.025,5	98,02
9.	Meningkatnya sektor perkebunan	10. PDRB sektor perkebunan	juta rupiah	387.784,1	519.022,1	133,84
10.	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM, perdagangan serta industri	11. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	juta rupiah	149.466,1	163.084,2	109,11
		12. PDRB sektor perdagangan	juta rupiah	714.179,3	797.189,4	111,62
		13. PDRB sektor industri	juta rupiah	933.619,3	1.079.245,6	115,60

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
11.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	14. Angka Pengangguran Terbuka	%	4,19	4,82	84,96
		15. Pendapatan Per Kapita Penduduk	juta rupiah	52,79	89,23	169,03
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai	73,54	76,89	104,56
13.	Meningkatnya daya saing pariwisata	17. Persentase kunjungan wisata	%	95,70	108,92	113,81
14.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	18. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,50	100	114,29
15.	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	19. Persentase Penyelesaian konflik sosial	%	80	100	125
16.	Menurunnya penyandang masalah sosial	20. Persentase PMKS yang mandiri	%	21,40	24,08	112,52
17.	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	21. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	B (60,01)	CC (51,16)	83,87
18.	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	22. Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	B (65)	B (61,42)	94,49
19.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	23. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (Nilai)	B (76,90)	B (79,71)	103,65
20.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	24. Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	WTP (1)	WTP (1)	100

Tabel Penjelasan/Perhitungan IKU Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan/Perhitungan Realisasi	Perhitungan Capaian (%)
1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	$\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$ $\frac{102}{103} \times 100\% = 99,02\%$	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{99,02}{92,23} \times 100\% = 107,36\%$
2. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	$\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan yang terhubung jaringan listrik}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$ $\frac{89}{103} \times 100\% = 86,41\%$	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{86,41}{88,35} \times 100\% = 97,80\%$
3. Persentase desa/kelurahan blankspot	%	$\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan blankspot}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$ $\frac{6}{103} \times 100\% = 5,83\%$	$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{7,77 - (5,83 - 7,77)}{7,77} \times 100\% = 124,97\%$
4. Rata-rata lama sekolah	tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang tamatkan. Data BPS, RLS Barut Tahun 2022 = 8,90	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{8,90}{8,60} \times 100\% = 103,49\%$
5. Angka Melek Huruf	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk} \geq 15\text{thn yang melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk} \geq 15\text{thn}} \times 100\%$ $\frac{121.417}{121.988} \times 100\% = 99,53\%$	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{99,53}{99,60} \times 100\% = 99,93\%$

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan/Perhitungan Realisasi	Perhitungan Capaian (%)
6. Angka Harapan Hidup	tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Data BPS Tahun 2022 = 71,50 tahun	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{71,50}{71,31} \times 100\% = 100,27\%$
7. Pengeluaran perkapita pertahun	juta rupiah	Perhitungan Pengeluaran perkapita dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Data BPS Tahun 2022 = 10.182 juta rupiah	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{10.182}{9.825} \times 100\% = 103,63\%$
8. PDRB sektor pertanian	juta rupiah	Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2023. Dalam perhitungan termasuk kehutanan dan penebangan kayu namun tidak termasuk perkebunan dan perikanan. PDRB sektor pertanian tahun 2022 = 563.159,9	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{563.159,9}{618.194,5} \times 100\% = 91,10\%$
9. PDRB sektor perikanan	juta rupiah	Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2023. PDRB sektor perikanan tahun 2022 = 177.025,5	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{177.025,5}{180.593,6} \times 100\% = 98,02\%$
10. PDRB sektor perkebunan	juta rupiah	Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2022. PDRB sektor perkebunan tahun 2022 = 519.022,1	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{519.022,1}{387.784,1} \times 100\% = 133,84\%$
11. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	juta rupiah	Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2023. Dalam perhitungan termasuk jasa perantara keuangan. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah tahun 2022 = 163.084,2	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{163.084,2}{149.466,1} \times 100\% = 109,11\%$

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan/Perhitungan Realisasi	Perhitungan Capaian (%)
12. PDRB sektor perdagangan	juta rupiah	Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2023. Dalam perhitungan meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. PDRB sektor perdagangan tahun 2022 = 797.189,4	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{797.189,4}{714.179,3} \times 100\% = 111,62\%$
13. PDRB sektor industri	juta rupiah	Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2023. Dalam perhitungan meliputi industri pengolahan. PDRB sektor industri tahun 2022 = 1.079.245,6	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{1.079.245,6}{933.619,3} \times 100\% = 115,60\%$
14. Angka Pengangguran Terbuka	%	Perhitungan Pengeluaran perkapita dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Data BPS Tahun 2022 = 4,82%	$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{4,19 - (4,82 - 4,19)}{4,19} \times 100\% = 84,96\%$
15. Pendapatan Per Kapita Penduduk	juta rupiah	Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang didapat dari keseluruhan rata-rata penduduk pada suatu periode tertentu. Perhitungan Pendapatan perkapita dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2022. Pendapatan Per Kapita Penduduk tahun 2022 = 89,23	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{89,23}{52,79} \times 100\% = 169,03\%$
16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai	Data DLH 2022: Indeks Kualitas Air (IKA) = 58,10 Indeks Kualitas Udara (IKU) = 91,33 Indeks Kualitas Lahan (IKL) = 82,46 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) = (0,376 x 58,10) + (0,405 x 91,33) + (0,219 x 82,46) = 76,89	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{76,89}{73,54} \times 100\% = 104,56\%$
17. Persentase kunjungan wisata	%	$\frac{\text{Jumlah realisasi kunjungan wisata}}{\text{Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan}} \times 100\%$ $\frac{108.915}{100.000} \times 100\% = 108,92\%$	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{108,92}{95,70} \times 100\% = 113,81\%$

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan/Perhitungan Realisasi	Perhitungan Capaian (%)
18. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang terjadi}} \times 100\%$ $= \frac{8 \text{ pelanggaran}}{8 \text{ pelanggaran}} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{100}{87,50} \times 100\% = 114,29\%$
19. Persentase Penyelesaian konflik sosial	%	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus konflik sosial}} \times 100\%$ $= \frac{22 \text{ kasus}}{22 \text{ kasus}} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$
20. Persentase PMKS yang mandiri	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mandiri}}{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}} \times 100\%$ $= \frac{2.300}{9.553} \times 100\% = 24,08\%$	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{24,08}{21,40} \times 100\% = 112,52\%$
21. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap penerapan RB Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Hasil Evaluasi tahun 2022 = CC (51,16)	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{\text{CC (51,16)}}{\text{B (61)}} \times 100\% = 83,87\%$

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan/Perhitungan Realisasi	Perhitungan Capaian (%)
22. Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	Predikat hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kabupaten Barito Utara memperoleh nilai 61,42 (B)	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{B (61,42)}{B (65)} \times 100\% = 94,49\%$
23. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (Nilai)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil SKM tahun 2022, indeks kepuasan masyarakat B (79,71)	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{B (79,71)}{B (76,90)} \times 100\% = 103,65\%$
24. Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	Penilaian opini yang di keluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah. Hasil evaluasi 2022 terhadap laporan keuangan tahun 2021 memperoleh opini WTP (1)	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{WTP (1)}{WTP (1)} \times 100\% = 100\%$

Tabel Perbandingan Realisasi dengan Target pada RPJMD sampai dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019			2020			2021			2022			Target Akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	84,47	88,35	104,59	84,47	88,35	104,59	85,35	89,32	104,65	92,23	99,02	107,36	92,23
2. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	66,99	64,08	95,66	74,76	75,73	101,30	81,55	79,61	97,62	88,35	86,41	97,80	95,15
3. Persentase desa/kelurahan blankspot	%	46,60	17,48	162,49	27,18	15,53	142,86	17,18	14,56	115,25	7,77	5,83	124,97	0
4. Rata-rata lama sekolah	tahun	8,60	8,57	99,65	8,70	8,58	98,62	8,5	8,58	100,94	8,6	8,90	103,49	8,7
5. Angka Melek Huruf	%	98,80	99,61	100,82	99,00	98,17	99,16	99,20	99,53	100,33	99,60	99,53	99,93	99,60
6. Angka Harapan Hidup	tahun	71,28	71,29	100,01	71,29	71,30	100,01	71,30	71,30	100,00	71,31	71,50	100,27	71,32
7. Pengeluaran perkapita pertahun	juta rupiah	9.324	10.010	107,36	9.478	9.936	104,83	9.643	9.951	103,19	9.825	10.182	103,63	10.027
8. PDRB sektor pertanian	juta rupiah	447.870,3	488.218,1	109,01	528.757,4	499.298,2	94,43	571.795,0	545.862,8	95,46	618.194,5	563.159,9	91,10	668.183,8
9. PDRB sektor perikanan	juta rupiah	156.533,2	159.281,1	101,76	165.273,2	174.656,1	105,68	174.743,4	171.339,1	98,05	180.593,6	177.025,5	98,02	186.685,8
10. PDRB sektor perkebunan	juta rupiah	361.324,2	361.067,8	99,93	369.472,9	436.377,2	118,11	378.721,2	514.446,3	135,84	387.784,1	519.022,1	133,84	396.640,2
11. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	juta rupiah	120.314,3	122.885,8	102,14	129.337,9	143.179,4	110,70	139.038,2	152.210,5	109,47	149.466,1	163.084,2	109,11	160.676,1
12. PDRB sektor perdagangan	juta rupiah	509.701,6	661.991,0	129,88	510.873,9	729.135,3	142,72	712.753,8	739.688,8	103,78	714.179,3	797.189,4	111,62	715.607,7
13. PDRB sektor industri	juta rupiah	680.182,2	820.925,7	120,69	681.746,6	937.214,5	137,47	931.755,8	1.026.604,3	110,18	933.619,3	1.079.245,6	115,60	935.486,5
14. Angka pengangguran terbuka	%	4,31	3,92	109,05	3,99	5,29	67,42	4,66	5,14	89,70	4,19	4,82	84,96	3,17
15. Pendapatan Perkapita Penduduk	juta rupiah	48,67	75,03	154,16	50,05	60,89	121,66	51,42	67,2	130,69	52,79	89,23	169,03	54,17
16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai	86,879	79,704	91,74	86,889	85,688	98,62	73,50	75,684	102,97	73,54	76,89	104,56	73,59
17. Persentase kunjungan wisata	%	83,2	81,46	97,91	87,3	60,59	69,40	91,50	106,28	116,15	95,70	108,92	113,81	99,80

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019			2020			2021			2022			Target Akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
18. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,50	85	97,14	87,50	87,50	100,00	87,50	88,89	101,59	87,50	100	114,29	93,75
19. Persentase penyelesaian konflik sosial	%	80	100	125,00	80	100	125,00	80	89,47	111,84	80	100	125	80
20. Persentase PMKS yang mandiri	%	42,52	2,20	5,17	20,78	23,01	110,73	21,09	24,07	114,13	21,40	24,08	112,52	21,73
21. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	C (31)	Belum dilakukan evaluasi	-	B (60,01)	Belum dilakukan evaluasi	-	B (60,01)	C (48,01)	80,00	B (61)	CC (51,16)	83,87	B (65)
22. Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	CC (54,00)	CC (57,11)	105,76	B (60,01)	B (60,16)	100,25	B (61)	B (60,29)	98,84	B (65)	B (61,42)	94,49	B (69)
23. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (Nilai)	B (76,61)	B (77,77)	101,51	B (76,70)	B (77,77)	101,40	B (76,80)	B (80,38)	104,66	B (76,90)	B (79,71)	103,65	B (77,00)
24. Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	WTP (1)	WTP (1)	100	WTP (1)	WTP (1)	100	WTP (1)	WTP (1)	100	WTP (1)	WTP (1)	100	WTP (1)



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/356/2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 356 /2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BARITO UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	$\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	Data Bina Marga	1. Dinas PUPR 2. Dinas Perhubungan
2.	Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	$\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan yang terhubung jaringan listrik}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	Data jaringan PLN	Bagian Adm. Perekonomian Setda
3.	Menurunnya desa/ kelurahan <i>blankspot</i>	Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	$\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan } blankspot}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	Data jaringan komunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang tamatkan	Data rata-rata lama sekolah	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Angka melek huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk} \geq 15\text{thn yang melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk} \geq 15\text{thn}} \times 100\%$	Data Melek Huruf	
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi	Data BPS, Dinas Kesehatan Prov. Kalteng	1. Dinas Kesehatan 2. Disdalduk-KBPPPA 3. Disbudparpora

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.		
6.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	$\frac{\text{Jumlah total pengeluaran}}{\text{Jumlah penduduk}}$	Publikasi BPS	1. Disnakertranskop-UKM 2. DPMPTSP 3. Kecamatan
7.	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Perhitungan Produk Domenstik Regional Bruto sektor pertanian yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik	Publikasi BPS	Dinas Pertanian
8.	Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Perhitungan Produk Domenstik Regional Bruto sektor perikanan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik	Publikasi BPS	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
9.	Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	Perhitungan Produk Domenstik Regional Bruto sektor perkebunan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik	Publikasi BPS	Dinas Pertanian
10.	Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Perhitungan Produk Domenstik Regional Bruto sektor koperasi dan usaha kecil menengah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik	Publikasi BPS	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		PDRB sektor perdagangan	Perhitungan Produk Domenstik Regional Bruto sektor perdagangan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik	Publikasi BPS	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		PDRB sektor industri	Perhitungan Produk Domenstik Regional Bruto sektor industri yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik	Publikasi BPS	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
11.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran terbuka usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Data angkatan kerja	1. Disnakertranskop-UKM
		Pendapatan Perkapita Penduduk	Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang didapat dari keseluruhan rata-rata penduduk pada suatu periode tertentu.	Publikasi BPS	2. DPMPTSP

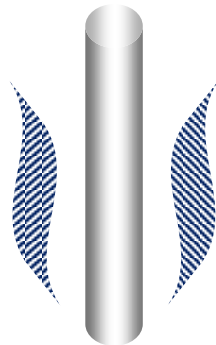
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH : (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL)	Data kualitas LH	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas PUPR
13.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kenaikan jumlah wisatawan	$\frac{(\text{Jlh wisatawan tahun ini} - \text{jlh wisatawan tahun lalu})}{\text{Jumlah wisatawan tahun lalu}} \times 100\%$	Data kunjungan wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
14.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang terjadi}} \times 100\%$	Data pelanggaran K3	1. SatpolPP Damkar 2. BPBD
15.	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Angka Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus konflik sosial}} \times 100\%$	Data Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik	1. Badan Kesbangpol 2. Dinas PRKPP
16.	Menurunnya penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mandiri}}{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}} \times 100\%$	Data Bidang Sosial	1. Dinas Sosial PMD 2. Disdalduk-KBPPPA 3. Dinas PRKPP 4. Dinas PUPR
17.	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap penerapan RB Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi Indeks RB dari Kementerian PANRB	1. Setda 2. Inspektorat 3. BKPSDM 4. Semua Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
18.	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	Nilai SAKIP	Predikat hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB	1. Bappedalitbang 2. Setda 3. Inspektorat 4. BKPSDM 5. Kecamatan 6. Semua Perangkat Daerah
19.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
20.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah	Opini BPK	Penilaian opini yang di keluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keungan daerah	Laporan BPK	1. Semua Perangkat Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset


 BUPATI BARITO UTARA,
 NADALSYAH



**PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2022**



**MUARA TEWEH
2022**



BUPATI BARITO UTARA

PERJANJIAN KINERJA 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. NADALSYAH**
Jabatan : **BUPATI BARITO UTARA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muara Teweh, Januari 2022.



BUPATI BARITO UTARA,

H. NADALSYAH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KABUPATEN BARITO UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	92,23
2.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	88,35
3.	Menurunnya desa/kelurahan <i>blankspot</i>	Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	%	7,77
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	tahun	8,6
		Angka Melek Huruf	%	99,60
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	71,31
6.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	juta rupiah	9.825
7.	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	juta rupiah	618.194,5
8.	Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	juta rupiah	180.593,6
9.	Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	juta rupiah	387.784,1
10.	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM, perdagangan serta industri	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	juta rupiah	149.466,1
		PDRB sektor perdagangan	juta rupiah	714.179,3
		PDRB sektor industri	juta rupiah	933.619,3
11.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka	%	4,19
		Pendapatan Per Kapita Penduduk	juta rupiah	52,79
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,54
13.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase Kunjungan Wisata	%	95,70
14.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,50
15.	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase Penyelesaian konflik sosial	%	80
16.	Menurunnya penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang mandiri	%	21,40
17.	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	B (61)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
18.	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	B (65)
19.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (Nilai)	B (76,90)
20.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	WTP (1)

No.	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 68.993.704.113
2.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp. 640.000.000
3.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.178.384.000
4.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 284.823.000
5.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 85.003.139.005
6.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 44.999.000
7.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 105.020.227.880
8.	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Rp. 12.478.700.000
9.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 330.000.000
10.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 24.826.202.625
11.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 27.500.000
12.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 325.000.000
13.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 5.000.000
14.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	Rp. 15.000.000
15.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 15.218.622.120
16.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	Rp. 1.088.498.958
17.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	Rp. 487.500.125
18.	Program Perizinan Usaha Pertanian.	Rp. 401.773.125
19.	Program Penyuluhan Pertanian.	Rp. 671.163.250
20.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 492.500.000
21.	Program Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 78.980.000
22.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 133.594.750
23.	Program Perencanaan dan Pembangunan Perindustrian	Rp. 101.799.875
24.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 51.725.000
25.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 27.461.000
26.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 28.427.000
27.	Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 621.055.000

No.	Program	Anggaran
28.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 426.571.000
29.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.200.000
30.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.816.083.863
31.	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.590.000.000
32.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 22.985.000
33.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 56.000.000
34.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Rp. 31.000.000
35.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 1.410.500
36.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 25.000.000
37.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 41.605.000
38.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 16.988.000
39.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 3.457.843.250
40.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 390.000.000
41.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 1.513.858.000
42.	Program Pengendalian dan Gangguan Kegiatan	Rp. 39.360.000
43.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 29.680.000
44.	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 360.544.000
45.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 590.000.000
46.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 313.994.000
47.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 51.752.000
48.	Program Penanganan Bencana	Rp. 70.040.000
49.	Program Penataan Desa	Rp. 10.000.000
50.	Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 302.815.000
51.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 564.214.000
52.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Rp. 1.129.994.162
53.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 716.388.000
54.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Rp. 1.042.866.625
55.	Program Perekonomian dan Pembangunan.	Rp. 597.441.125

No.	Program	Anggaran
57.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 93.363.000
58.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 886.916.275
59.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 206.765.000
60.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 550.023.875
61.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 329.500.000
62.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 172.166.320
63.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 1.999.369.250
64.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 859.676.000

Muara Teweh, Januari 2022.

BUPATI BARITO UTARA,



H. NADALSYAH



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA INSPEKTORAT

Jalan Vetro Sinseng No. Telp. (0519) 21169 Fax. (0519) 22503 Muara Teweh Provinsi Kalimantan Tengah – 73811
Email : itkab@baritoutarakab.go.id website : www.baritoutarakab.go.id

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

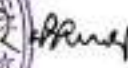
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Muara Teweh, 20 Maret 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO UTARA,


RAKHMAT MURATNI
Pembina Utama Muda (IV/c) 7
NIP. 19670731 199503 1 003 7